

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Kondisi Fisik

Identifikasi kondisi fisik digunakan untuk mengetahui potensi dan masalah fisik Desa Slamparejo dalam mendukung upaya pengembangan Desa Slamparejo menuju Desa Mandiri Pangan. Karakteristik fisik yang dibahas antara lain fisik dasar dan fisik binaan. Fisik dasar merupakan karakteristik alamiah dari suatu daerah. Karakteristik fisik dasar Desa Slamparejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang meliputi kondisi topografi, geologi, klimatologi dan hidrologi. Kondisi fisik binaan dalam pembahasan ini terbagi dalam kondisi tata guna lahan, kondisi prasarana, struktur tata ruang dan sarana.

##### 4.1.1 Kondisi Geografis

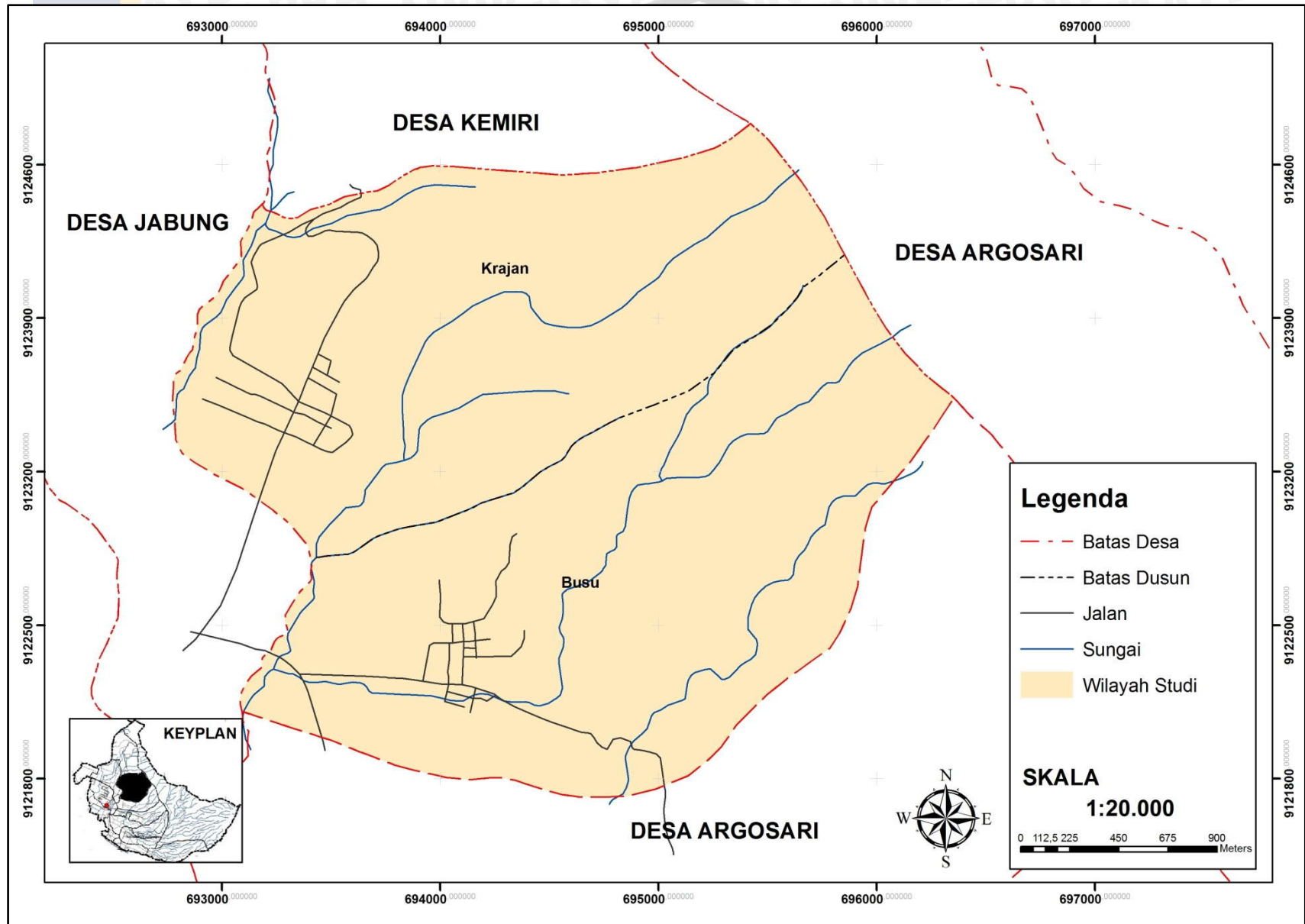
Desa Slamparejo secara struktural merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari sistem perwilayahan Kecamatan Jabung. Secara geografis Desa Slamparejo terletak pada wilayah selatan lereng Gunung Bromo. Desa Slamparejo memiliki potensi yang cukup strategis dengan luas wilayah 867,982 Ha, terbagi menjadi 2 dusun yaitu Dusun Busu dan Dusun Krajan.

Batas wilayah administratif Desa Slamparejo adalah :

- Sebelah Utara : Desa Kemiri
- Sebelah Selatan : Desa Jabung dan Argosari
- Sebelah Barat : Desa Jabung
- Sebelah Timur : Desa Argosari

Jarak Desa Slamparejo dari pusat pemerintahan Kecamatan Jabung dan dari pusat pemerintahan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :

- Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Jabung : 4 Km
- Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten Malang : 21 Km



Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Slamparejo

#### 4.1.2 Kondisi Topografi

Kondisi topografi Desa Slamparejo secara garis besar yaitu berupa dataran yang luasnya 479,782 Ha dan 388,200 Ha perbukitan/ pegunungan yang terletak di ketinggian rata-rata 540 m di atas permukaan laut (dpl) dengan tingkat kemiringan tanah (kelerengan) cukup kompleks mulai dari 0% sampai lebih dari 45%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi topografi di Desa Slamparejo bervariasi mulai dari dataran hingga pegunungan yang terjal. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kondisi kemiringan lereng Desa Slamparejo dari arah selatan berupa dataran, sampai ke arah utara kemiringan lerengnya menjadi semakin besar berupa pegunungan terjal.

#### 4.1.3 Kondisi Geologi

Secara geologis tanah di Desa Slamparejo merupakan tanah latosol coklat kemerahan dan brown forest soil, dimana jenis tanah ini tergolong jenis tanah yang subur sehingga cocok digunakan untuk lahan pertanian dan hutan. Sedangkan jenis batuan di Desa Slamparejo terdiri dari batuan gunung gendis dan tuf malang. Berdasarkan Data Dasar Profil Desa/ Kelurahan Slamparejo Kecamatan Jabung tahun 2008, pada umumnya kedalaman tanah di Desa Slamparejo adalah sekitar 10 - 20 m.

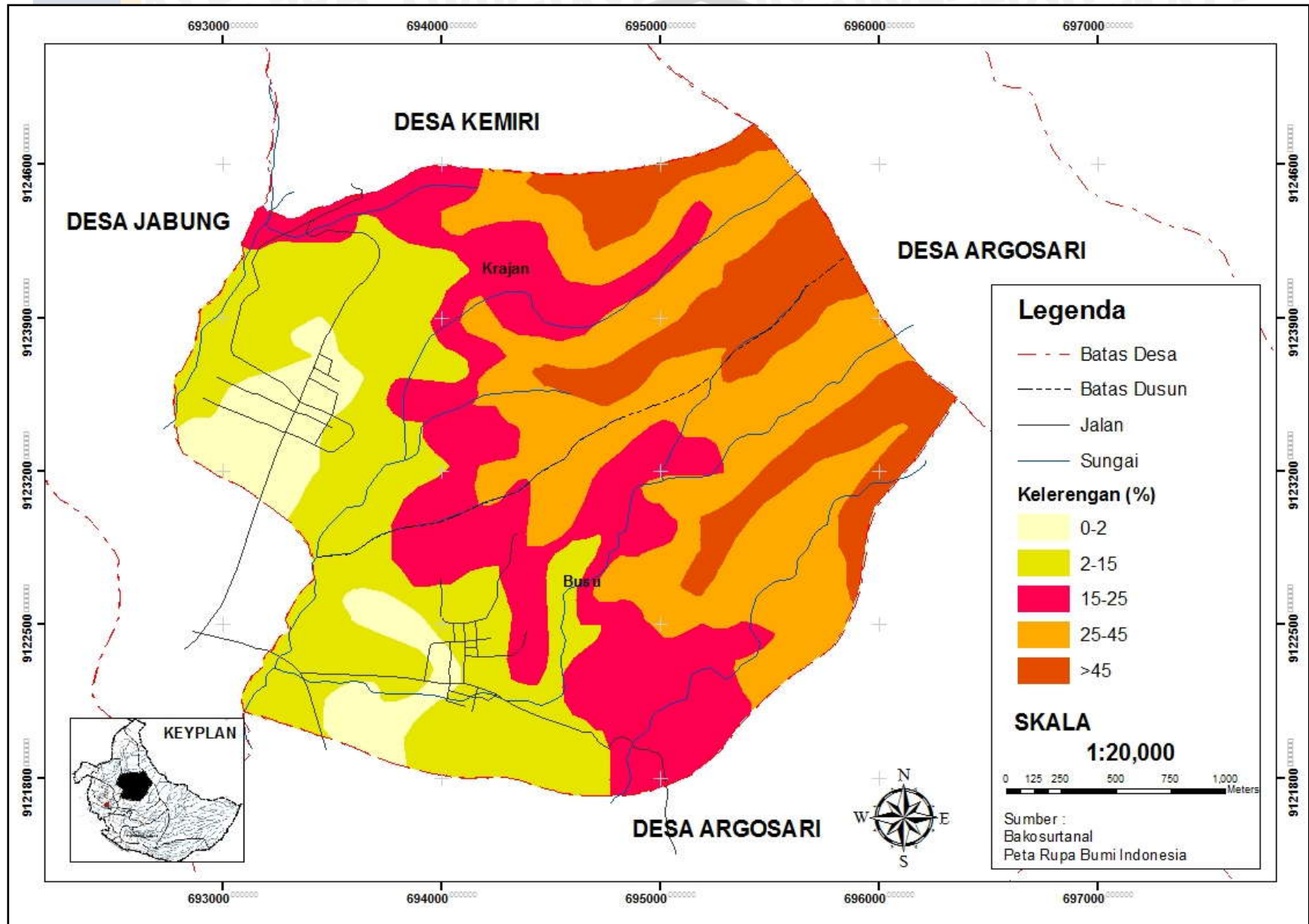
#### 4.1.4 Kondisi Klimatologi

Suhu rata-rata harian 20-35 °C dengan curah hujan rata-rata 2.750 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember hingga April. Sedangkan jumlah bulan hujannya yaitu 4 bulan sehingga termasuk wilayah yang memiliki curah hujan tinggi. Keadaan iklim di Desa Slamparejo termasuk dalam iklim tropis.

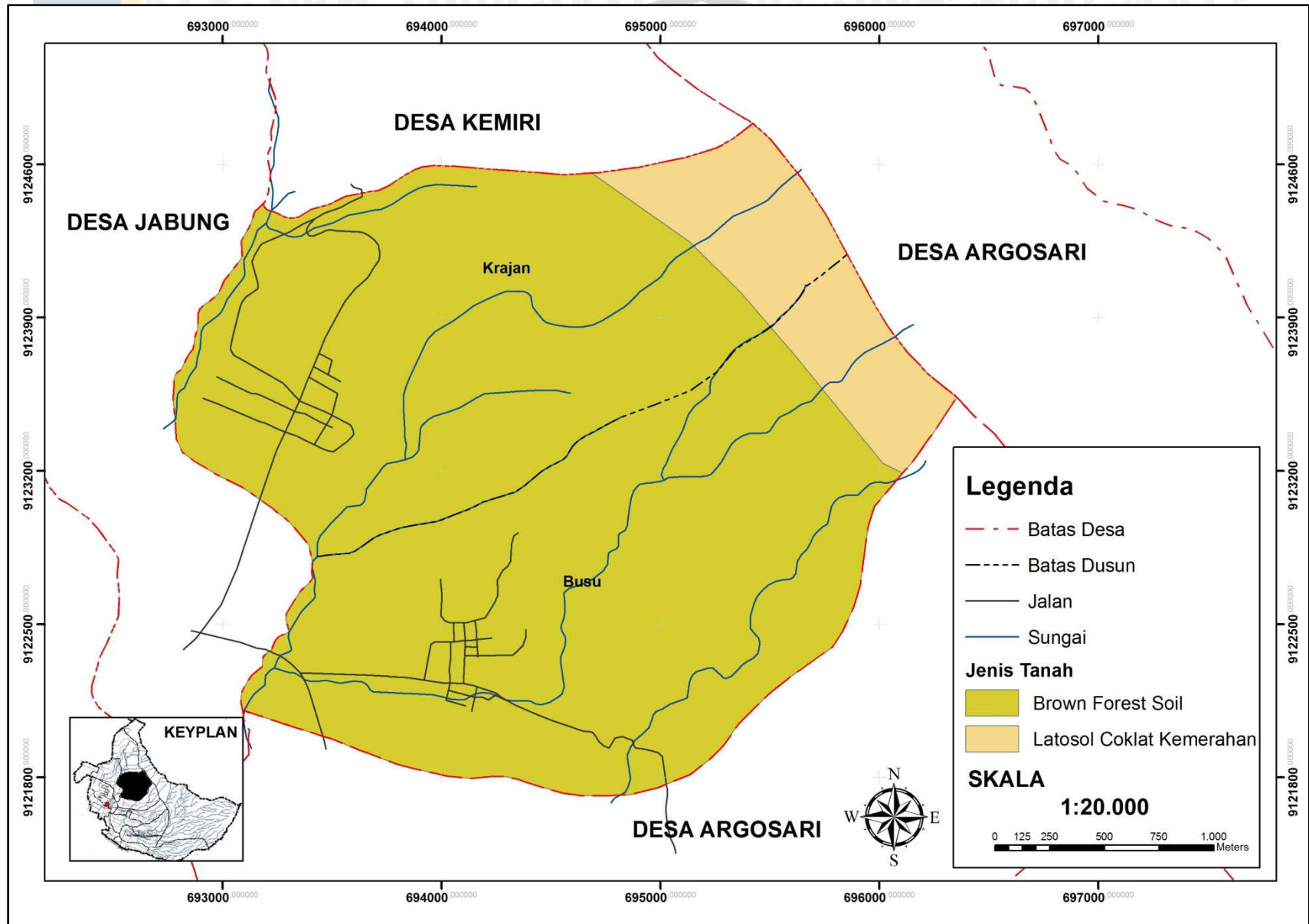
#### 4.1.5 Kondisi Hidrologi

Desa Slamparejo dilalui oleh 4 buah sungai. Sungai tersebut oleh penduduk dimanfaatkan untuk irigasi atau pengairan sawah/ ladang, serta untuk MCK warga sekitar sungai yang tidak memiliki MCK pribadi. Air dari sungai didistribusikan melalui saluran-saluran irigasi primer dan sekunder lalu masuk ke sawah/ladang penduduk. Di Desa Slamparejo terdapat 9 mata air. Air di alirkan dengan pipa ke tiap-tiap tandon, kemudian penduduk mengambil ke tandon-tandon tersebut.





Gambar 4.2 Peta Topografi Desa Slamparejo



Gambar 4.3 Peta Jenis Tanah Desa Slamparejo

#### **4.1.6 Kondisi Tata Guna Lahan**

##### **a. Permukiman**

Penggunaan lahan permukiman di Desa Slamparejo memiliki luas lahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan lahan untuk pertanian dan hutan produksi. Penggunaan lahan untuk permukiman yaitu seluas 65,139 Ha. Ini merupakan salah satu potensi bagi Desa Slamparejo dalam mendukung pengembangan menuju desa mandiri pangan di mana masyarakatnya lebih banyak menggunakan lahan bagi pertanian dan hutan.

Pola permukiman yang terdapat di Desa Slamparejo adalah linier memanjang mengikuti jaringan jalan. Pola ini terbentuk mengikuti prasarana transportasi yang ada untuk memudahkan pergerakan menuju ke lokasi lainnya, terutama untuk penyebaran hasil pertanian. Permukiman yang mengikuti jaringan jalan ini tidak hanya mengikuti jalan utama tetapi juga mengikuti jalan lokal. Dengan adanya pola persebaran permukiman yang mendekati jaringan jalan, maka hal tersebut akan mempermudah aksesibilitas mereka baik dalam hal menjalankan aktivitas bekerja maupun bersosialisasi.

##### **b. Pertanian**

Untuk penggunaan lahan di bidang pertanian memiliki komposisi yang paling besar yaitu untuk lahan sawah dan sektor pertanian yang lain. Untuk luas lahan sawah yaitu seluas 58 Ha dan tegalan seluas 239,377 Ha. Lahan pertanian yang paling luas yaitu lahan pertanian padi yang merupakan komoditas utama. Selain itu juga terdapat jagung dan ubi kayu serta tanaman buah-buahan seluas 11 Ha antara lain salak, alpokat, pisang dan durian. Penggunaan lahan pertanian saat ini cukup mendukung upaya pemenuhan cadangan pangan, namun perlu dilakukan perhitungan untuk mengetahui kecukupan kebutuhan pangan per kapita sesuai dengan standard yang digunakan.

##### **c. Hutan Produksi**

Penggunaan lahan untuk hutan memiliki komposisi yang cukup besar yaitu untuk hutan rakyat dan hutan negara. Untuk luas hutan rakyat yaitu seluas 50 Ha dan hutan negara seluas 388,200 Ha. Hutan ini terletak berbatasan dengan Desa Argosari dan Desa Kemiri. Hutan ini juga sebagai kawasan konservasi Gunung Bromo.

##### **d. Perkebunan**

Penggunaan lahan untuk perkebunan seluas 139 Ha. Penggunaan lahan perkebunan sebagian besar adalah tebu dengan luas 115 Ha. Sedangkan untuk selain tebu antara lain kelapa 13 Ha, kopi 16 Ha, dan ketela pohon 5 Ha. Penggunaan lahan kering untuk perkebunan merupakan penggunaan lahan terbesar kedua setelah hutan. Besaran penggunaan lahan ini terkait dengan penguasaan lahan serta prasarana yang menunjang.



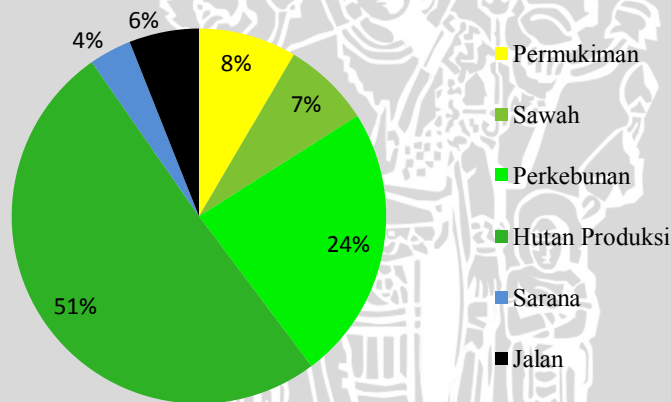
e. **Sarana**

Guna lahan yang berupa sarana antara lain RTH, sekolah, dan perkantoran. Perkantoran yang ada di Desa Slamparejo adalah kantor pemerintahan desa memiliki luas 0.25 Ha. Perkantoran Pemerintahan yang ada yaitu berupa Balai Desa dan kantor desa yang terletak di Dusun Krajan. Sedangkan RTH yang ada antara lain makam, dan lapangan olah raga yang memiliki total luasan 27,1 Ha.

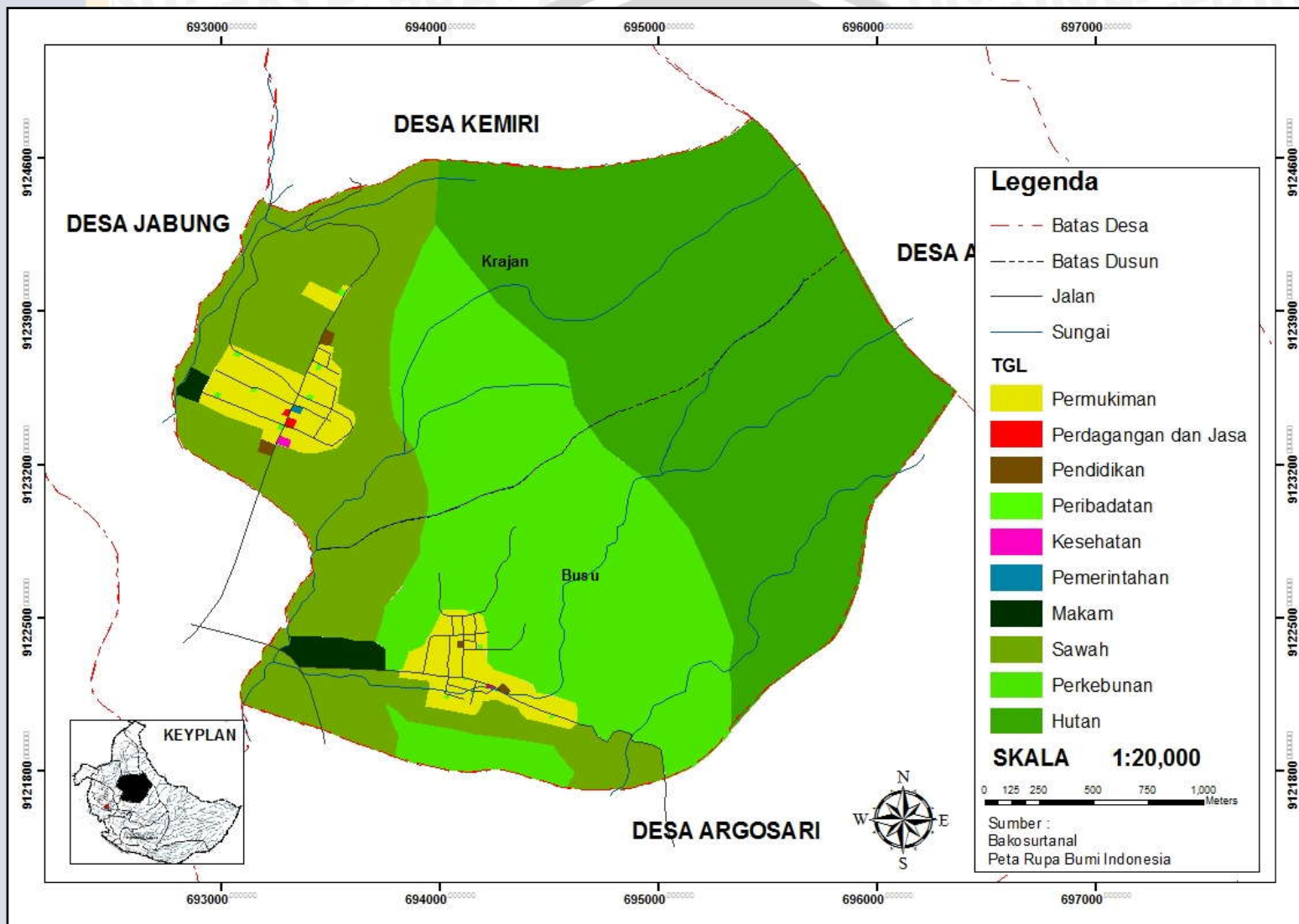
**Tabel 4.1 Penggunaan Lahan Desa Slamparejo**

Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Permukiman	65,139
Sawah	58
Perkebunan	182,234
Hutan Produksi	388,250
Sarana	28,35
Jalan	46
<b>Total</b>	<b>767,972</b>

Sumber : Profil Desa Slamparejo, 2010



**Gambar 4. 4 Persentase Penggunaan Lahan Desa Slamparejo**



Gambar 4.5 Peta Guna Lahan Desa Slamparejo



#### 4.1.7 Prasarana

Berdasarkan pedoman umum progra aksi desa mandiri pangan, prasarana sebagai salah satu komponen dasar penunjang dalam upaya pengembangan Desa Slamparejo menuju desa mandiri pangan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi guna mengetahui permasalahan, peluang serta potensi prasarana di Desa Slamparejo dalam mendukung upaya menuju desa mandiri pangan.

##### A. Transportasi darat

Tidak semua jalan di Desa Slamparejo memiliki kondisi yang baik. Di kedua dusun Desa Slamparejo masih terdapat jalan makadam yang kondisinya tidak cukup baik. Selain itu, masih ada jalan yang hanya berupa perkerasan tanah yaitu jalan yang menuju ke sawah dan perkebunan maupun gang-gang kecil yang ada diantara rumah-rumah.

**Tabel 4.2 Prasarana Transportasi Darat di Desa Slamparejo**

No	Prasarana Transportasi Darat	Keterangan Baik / Rusak
1	Jalan Desa	Sedang
2	Jalan Kab / Propinsi	Sedang
3	Jembatan	Baik

*Sumber: Survaiy Primer, 2011*

Jalan merupakan jaringan utama yang memberikan aksesibilitas kegiatan masyarakat termasuk dalam pendistribusian hasil produksi pangan. Berdasarkan hirarkinya, jalan di Desa Slamparejo terdiri dari :

##### 1. Jalan Kolektor Sekunder

Yang tergolong jalan kolektor sekunder di Desa Slamparejo adalah jalan utama yang menghubungkan Desa Slamparejo dengan Desa lain. Jalan kolektor sekunder yang dari Dusun Busu menuju ke desa-desa lain memiliki kondisi rusak. Jalan ini juga merupakan satu-satunya akses dari dan ke Dusun Busu.

##### 2. Jalan Lokal Sekunder

Jalan lokal sekunder ini menghubungkan antara pusat-pusat lingkungan dengan pusat lingkungan permukiman atau antar lingkungan permukiman.

##### 3. Jalan Lingkungan Sekunder

Yang termasuk dalam kategori jalan lingkungan di Desa Slamparejo adalah jalan desa yang menghubungkan jalan utama dengan permukiman di sekitarnya, menghubungkan antar permukiman maupun sebagai penghubung dari permukiman penduduk menuju ke lahan perikanan, pertanian, dan perkebunan.

Sedangkan berdasarkan jenis perkerasannya, jalan di Desa Slamparejo dibedakan menjadi :

#### 1. Jalan aspal

Jalan yang menggunakan perkerasan aspal di Desa Slamparejo adalah sepanjang jalan utama masuk desa yang menghubungkan antara desa Slamparejo dan Jabung. Panjang jalan aspal di dalam Desa Slamparejo yaitu 6,94 km sedangkan panjang jalan aspal yang menghubungkan Desa Slamparejo dengan desa atau kecamatan lain yaitu sepanjang 1 km, sehingga panjang jalan aspal yang menjadi milik Desa Slamparejo kurang lebih adalah 7,94 km. Kondisi jalan aspal ini baik namun ada sepanjang 400 m yang rusak. Hal ini membuat kendaraan yang melintasi jalan tersebut mengalami kesulitan, terutama kendaraan roda empat.

#### 2. Jalan tanah

Jalan dengan perkerasan tanah dijumpai pada jalan desa yang menghubungkan antar permukiman maupun sebagai penghubung dari permukiman penduduk menuju ke lahan pertanian. Kondisi jalan ini baik, maksudnya jalannya relatif rata. Hanya saja pada musim hujan jalan ini sulit dilalui karena becek dan adanya genangan air di beberapa titik. Kondisi ini sebagian besar ada di Dusun Busu, sedangkan untuk Dusun Krajan relative baik. Panjang jalan tanah di Desa Slamparejo kurang lebih adalah 5,95 Km.

#### 3. Jalan plester

Sedangkan untuk jalan plester dapat dijumpai di jalan lingkungan di Dusun Busu. Kondisi jalan ini cukup baik.

Fasilitas pelengkap jalan, terutama lampu penerangan pada ruas jalan utama belum memadai. Belum ada lampu penerangan jalan yang memberikan intensitas cahaya belum maksimal, dalam artian belum cukup terang. Untuk penerangan pada ruas jalan lingkungan hanya berasal dari penerangan rumah penduduk. Hal ini menyebabkan kerawanan kejahatan khususnya untuk jalan yang menuju ke Dusun Busu yang sebagian besar melalui area persawahan dan makam. Fasilitas pelengkap yang lain berupa polisi tidur.

**Tabel 4.3 Kondisi Jaringan Jalan Desa Slamparejo**

No	Jenis Perkerasan	Panjang Perkerasan	Kondisi
1.	Jalan Aspal	7,9 km	Baik
		400 m	Rusak
2.	Jalan Tanah	5,95 km	Baik
4.	Jalan konblok/semen/beton	2,15 k m	Baik
5.	Jalan Makadam	8 k m	Baik
<b>Total</b>		<b>16,8 Km</b>	

Sumber : Data tingkat perkembangan Desa Slamparejo, 2010



Jalan menuju Dusun Busu mengalami kondisi rusak. Jalan ini terletak bersebelahan dengan sungai yang melalui permukiman penduduk. Kondisi jalan yang rusak ini disebabkan oleh banjir dari air sungai yang meluap dan menggenangi jalan tersebut ketika musim hujan. Kondisi jalan yang rusak ini mengakibatkan aksesibilitas dari dan ke Dusun Busu sulit. Akses fisik berupa jalan yang sulit, menurut Hanafie dalam bukunya pengantar ekonomi pertanian, dapat menyebabkan kerawanan pangan bagi masyarakat Dusun Busu. Dampak panjang akibat kondisi jalan yang rusak menuju Dusun Busu adalah perkembangan dusun ini menjadi terhambat. Oleh sebab itu, hal ini perlu mendapat perhatian lebih dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun kecamatan, guna memperlancar akses menuju ke Dusun Busu sehingga mampu mendukung upaya Desa Slamparejo menuju desa mandiri pangan.

### B. Jaringan Komunikasi

Jaringan komunikasi di Desa Slamparejo telah memberikan kontribusi bagi masyarakat Desa Slamparejo dalam hal kebutuhan komunikasi dan informasi termasuk dalam mendukung upaya pengembangandes menupu desa mandiri pangan. Namun, jaringan pesawat telepon belum ada di Desa Slamparejo, hal ini disebabkan jauhnya jarak dari kabupaten dan luasnya sawah serta hutan sehingga biaya yang dibutuhkan untuk memasang kabel telepon menjadi mahal. Perkembangan teknologi dan kemampuan ekonomi mendorong penduduk mememnuhi kebutuhan akan komunikasi dengan menggunakan telepon pribadi. Selain itu juga terdapat layanan TV/Radio, ada 1730 unit TV yang digunakan penduduk Desa Slamparejo telah memiliki TV maupun Radio sehingga mereka dapat mengetahui informasi yang ada di luar Desa Slamparejo.

**Tabel 4.4 Prasarana Komunikasi dan Informasi**

No	Prasarana	Jumlah
1	GSM	47
	CDMA	560
2	TV	1730
3	Wartel	1
4	Warnet	1

*Sumber : Data tingkat perkembangan Desa Slamparejo, 2010*

### C. Jaringan Air Bersih

Prasarana air bersih di Desa Slamparejo berasal dari 9 mata air yang tersebar di kedua dusun, di Dusun Krajan antara lain Sumber Suko, Sumber Pakem, Sumber Poros, Sumber Jurangmas. Sedangkan di Dusun Busu terdapat Sumber Wedus, Sumber Dayangan, Sumber Pakel, Sumber Lipi, Sumber Tretes. Enam dari sembilan sumber



mata air ini telah dimanfaatkan oleh penduduk dan airnya didistribusikan ke tandon-tandon melalui sistem perpipaan, dari tandon ini air kemudian di ambil oleh penduduk. Dari enam mata air yang telah dimanfaatkan ada satu yang kondisinya rusak.

Sistem air bersih di Desa Slamparejo menggunakan sistem perpipaan dan non-perpipaan. Untuk sistem perpipaan merupakan jasa layanan dari HIPAM. Sedangkan untuk yang non-perpipaan berupa penggunaan sumur, baik sumur gali maupun sumur pompa yang dimanfaatkan secara individual maupun komunal dan dari sungai. Sedangkan untuk masyarakat yang berada di sisi sungai lebih memilih untuk memanfaatkan air sungai dibandingkan menggunakan HIPAM.

Adapun proses pendistribusian air bersih di Desa Slamparejo antara lain : Pertama, air yang berasal dari mata air ditransmisikan melalui pipa 6 Ø (dm) ke tandon-tandon yang berada di empat tempat baik yang terdapat pada Dusun Krajan dan Dusun Busu. Kemudian penduduk mengambil air ke tandon-tandon tersebut. Jenis pipa yang digunakan adalah pipa PVC.

Sedangkan untuk penyediaan air bersih dengan sistem non-perpipaan adalah berupa penggunaan sumur gali dan bor yang dikembangkan baik secara individual maupun komunal. Sumur gali yang digunakan ada 16 unit, sedangkan sumur bor ada 3 unit. Pengguna kedua sumur tersebut pada umumnya merupakan masyarakat Dusun Krajan.

#### **D. Sampah dan Sanitasi**

Di Desa Slamparejo sudah ada TPA yang berfungsi sebagai pengelolaan dan tempat pembuangan akhir sampah. Hal ini ditunjang dengan adanya gerobak sampah sebanyak 10 unit yang dimiliki desa. Namun dari kedua dusun baik krajan maupun busu untuk sistem persampahan sekarang, sebagian besar masyarakat membuat lubang atau *landfill* untuk menimbun sampah dan membuang sampah, atau membakar sampah itu sendiri.

Sedangkan untuk sanitasinya, di Desa Slamparejo tidak semua rumah memiliki MCK sendiri. Sistem sanitasi yang berupa jamban keluarga hanya dimiliki oleh 430 KK. Kebanyakan dari mereka yang belum mempunyai MCK sendiri menggunakan sungai untuk kegiatan mandi, mencuci dan lain-lain. Untuk mengatasi permasalahan MCK, perangkat Desa Slamparejo telah membuat MCK umum bagi masyarakat sekitar sebanyak 1 unit.

### **E. Jaringan Listrik**

Pendistribusian listrik di Desa Slamparejo menggunakan jasa PLN dan listrik desa pelayanannya sudah merata hingga mencapai keseluruhan desa. Ada 967 KK yang telah menggunakan jasa pelayanan listrik PLN. Selain itu masyarakat Desa Slamparejo juga menggunakan Bio Gas. Sebanyak 28 unit Biogas yang dimanfaatkan sekitar 50 KK. Listrik berpengaruh sangat penting pada kelancaran aktivitas dan proses transfer informasi masyarakat Desa Slamparejo dalam upaya menuju desa mandiri pangan. Penggunaan Biogas ini juga sangat membantu upaya kemandirian desa akan kebutuhan energi, sehingga sangat mendukung upaya kemandirian pangan.

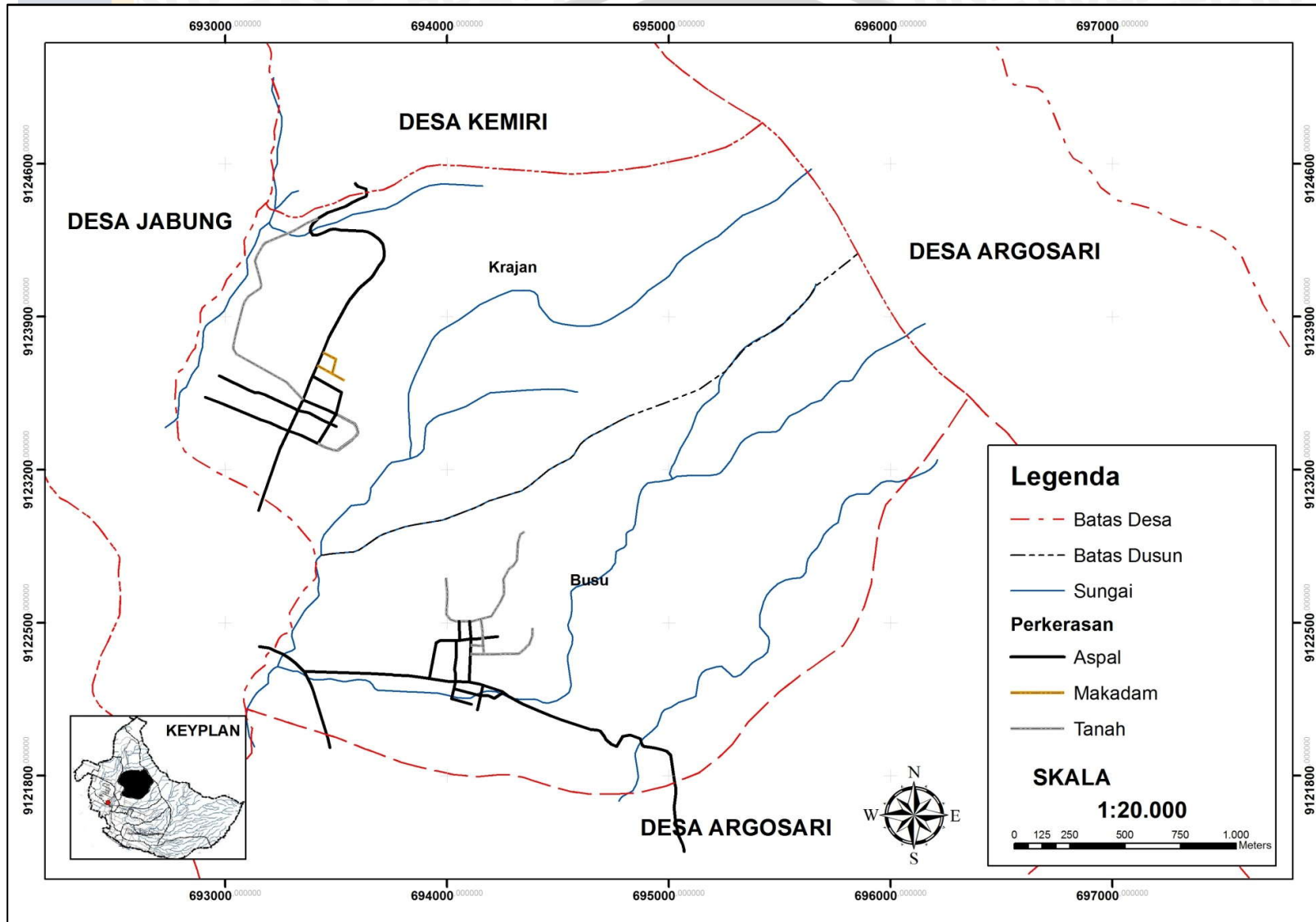
### **F. Sistem Drainase**

Sistem drainase di desa Slamparejo umumnya masih bersifat tradisional. Masyarakat masih menganggap tanah dapat menyerap limpasan air baik limbah rumah tangga maupun air hujan dapat begitu saja terserap tanpa menimbulkan genangan yang nantinya dapat menimbulkan penyakit. Sebagian besar bagian dari desa Slamparejo untuk sistem drainase masih terbuka belum berupa perkerasan, baik itu saluran buangan rumah tangga maupun selokan di tepi-tepi jalan desa. Akibatnya ketika terjadi hujan deras limbah rumah tangga dan ternak mengalir di saluran drainase sehingga menyebabkan bau dan tidak baik untuk kesehatan masyarakat. Selain itu, air hujan yang meluap dapat menyebabkan kerusakan jalan.

### **G. Irigasi**

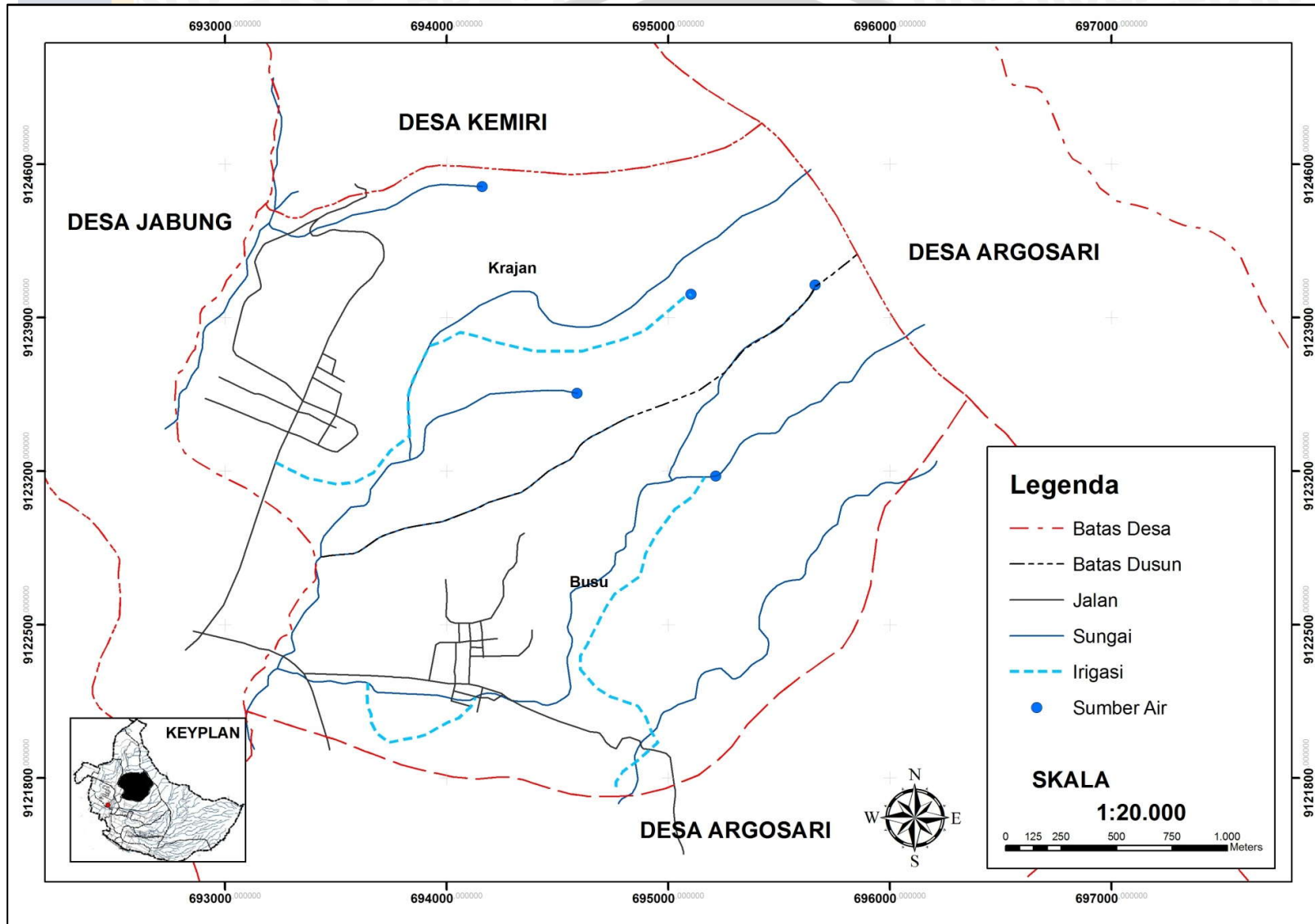
Air yang digunakan untuk saluran irigasi sawah yang ada di Desa Slamparejo menggunakan air Sungai Suko. Pembagian jatah air dilakukan oleh waker. Saluran irigasi di Desa Slamparejo hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan. Hal ini dipengaruhi juga karena lahan sawah irigasi yang kecil. Selain itu kondisi irigasi yang rusak dan belum pernah dilakukan perbaikan.

Berdasarkan identifikasi kondisi prasarana Desa Slamparejo diketahui prasarana yang memiliki kondisi kurang mendukung upaya kemandirian pangan dan perlu mendapat prioritas perbaikan. Prasarana yang perlu mendapat prioritas perbaikan antara lain irigasi dan jalan. Kondisi irigasi paling prioritas karena kondisinya telah lama rusak dan tidak pernah mendapat perbaikan. Sedangkan untuk jalan, kondisi yang rusak adalah yang menuju Dusun Busu. Kondisi jalan yang rusak ini juga diperparah dengan tidak adanya lampu penerangan jalan, sehingga semakin mempersulit akses masyarakat Dusun Busu untuk menuju ke pusat desa maupun ke desa-desa lainnya. Berikut adalah peta prasarana irigasi dan jalan.



Gambar 4.7 Peta Perkerasan Jalan





Gambar 4.8 Peta Jaringan Irigasi



#### 4.1.8 Struktur Tata Ruang Desa

Struktur desa yang terbentuk di Desa Slamparejo ada dua, yaitu pusat desa dan sub pusat desa. Pusat desa merupakan bagian desa yang cenderung berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, di mana terdapat sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan biasanya terletak dekat pusat pemerintahan sehingga jumlah sebaran pergerakan lebih banyak. Sedangkan sub pusat desa merupakan bagian desa yang menjadi pusat pelayanan ke dua setelah pusat desa. Di daerah ini terdapat sarana dan prasarana yang cukup memadai tetapi jangkauan layanannya cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan pusat desa.

Struktur ruang Desa Slamparejo didasarkan pada beberapa konsep, yaitu :

- a. Penentuan pusat dan sub pusat desa didasarkan pada persebaran sarana maupun prasarana dan skala pelayanan prasarana, serta persebaran penduduk pada masing-masing sub wilayah administratif.
- b. Hubungan antara pusat dan sub pusat desa ditinjau berdasarkan pola kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Slamparejo.
- c. Pusat dan sub pusat desa berada pada wilayah yang mudah dijangkau oleh seluruh warga desa sehingga tingkat kehidupannya meningkat.
- d. Peningkatan perkembangan desa yang lebih merata menjadi konsep penentuan struktur ruang desa.

Berdasarkan struktur ruang Desa Slamparejo dapat terlihat bahwa terdapat pemusatan kegiatan dan pelayanan pada pusat dan sub pusat tersebut. Pada masing-masing pusat maupun sub pusat terdapat fungsi yang ternaungi di dalamnya. Dusun Krajan sebagai pusat Desa Slamparejo menaungi fungsi pemerintahan yang ditunjukkan dengan adanya balai desa di wilayah tersebut sehingga pusat kegiatan dan pelayanan pemerintahan bagi masyarakat Desa Slamparejo berada di wilayah dusun tersebut. Selain itu fasilitas kesehatan berupa puskesmas juga terdapat di Dusun Krajan, sehingga kegiatan berobat yang berada di bawah pemerintahan juga terdapat di Dusun Krajan.

Penentuan pusat dan sub pusat desa di Desa Slamparejo dapat diketahui melalui perhitungan jumlah dan persebaran sarana berdasarkan hasil survaii. Adapun persebaran fasilitas tiap dusun di Desa Slamparejo, bisa dilihat pada Tabel 4.12.

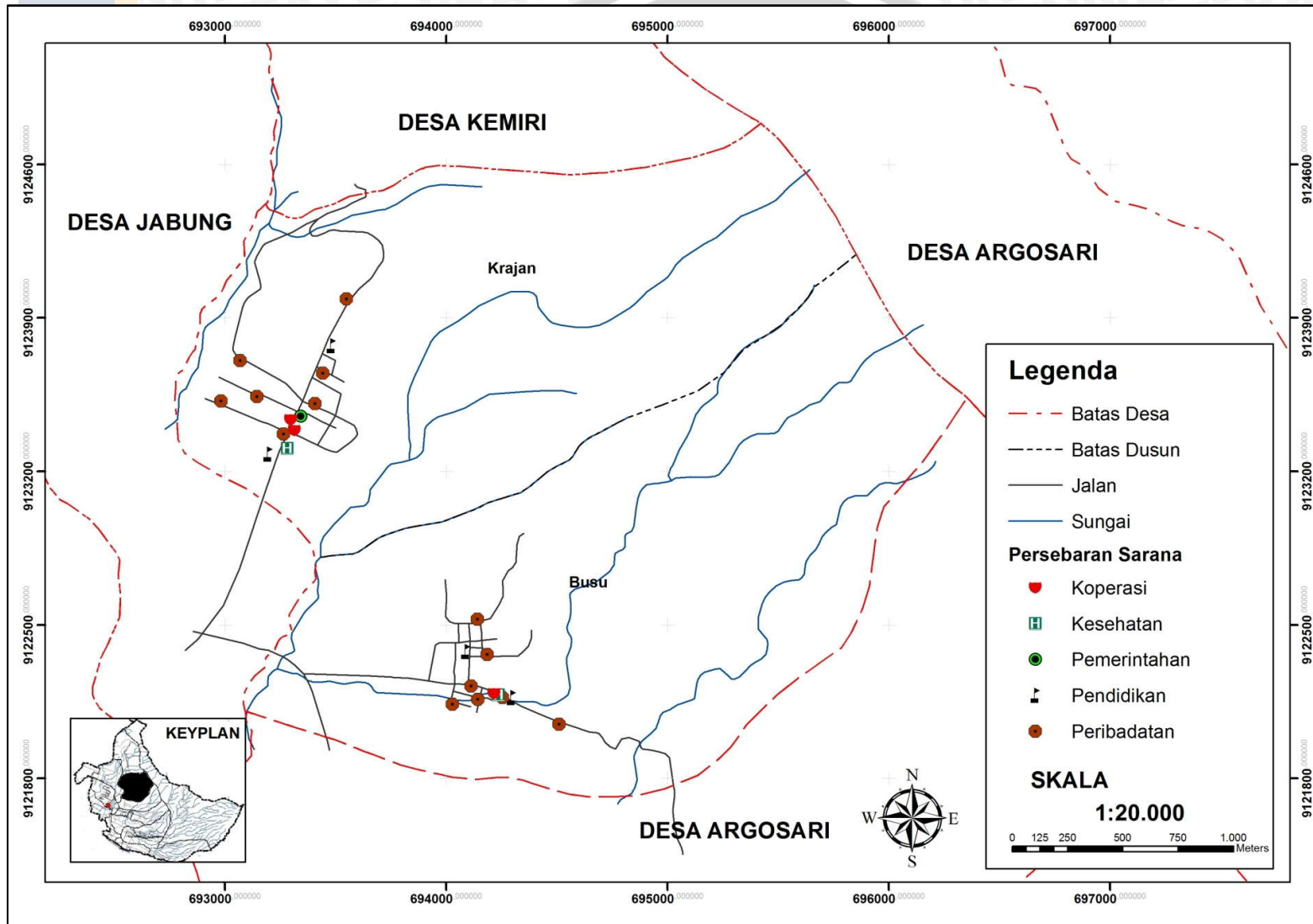
**Tabel 4.5 Persebaran Fasilitas Tiap Dusun di Desa Slamparejo Tahun 2011**

No	Dusun	Jenis Fasilitas	Jumlah
1	Krajan	Fasilitas pendidikan	
		• Taman Kanak-Kanak	1 unit
		• Sekolah Dasar Negeri	1 unit
		• Sekolah Menengah Pertama Negeri	1 unit
		Fasilitas kesehatan	
		• Puskesmas	1 unit
		• Bidan	1 unit
		Fasilitas peribadatan	
		• Masjid	1 unit
		• Musholla	7 unit
		Fasilitas pemerintahan	
		• Kantor desa	1 unit
		• Balai desa	1 unit
		Fasilitas perdagangan dan jasa	
		• Kios Perseorangan	12 unit
		• Toko	6 unit
		• Warnet	1 unit
• Wartel	1 unit		
Fasilitas Keamanan			
▪ Pos Kamling	11 unit		
2	Busu	Fasilitas olahraga	
		• Lapangan sepak bola	1 unit
		Fasilitas pendidikan	
		• Taman Kanak-Kanak	1 unit
		• Sekolah Dasar Negeri	1 unit
		Fasilitas kesehatan	
		• Polindes	1 unit
		Fasilitas peribadatan	
		• Masjid	1 unit
		• Musholla	7 unit
		Fasilitas perdagangan dan jasa	
• Kios Perseorangan	8 unit		
• Toko	4 unit		
• Penjahitan	1 unit		
• Koperasi Susu	1 unit		
Fasilitas makam	2 unit		
Fasilitas Keamanan			
• Pos kamling	4 unit		

Sumber : Survaiky primer, 2011

Sedangkan peta persebaran fasilitas tiap dusun di Desa Slamparejo, bisa dilihat pada Gambar 4.9.





Gambar 4.9 Peta Persebaran Sarana Desa Slamparejo

## 1. Pusat kegiatan atau pelayanan

Desa Slamparejo memiliki pusat kegiatan atau pelayanan di Dusun Krajan. Beberapa fungsi yang memegang peranan penting bagi kehidupan masyarakat Desa Slamparejo berada di wilayah tersebut. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

### a) Fungsi Pemerintahan

Pemusatan fungsi pemerintahan Desa Slamparejo berada di Dusun Krajan yang ditandai dengan adanya fasilitas pemerintahan berupa balai desa di wilayah tersebut. Lokasinya berada jalan utama Desa Slamparejo.

### b) Fungsi Pendidikan

Di wilayah Dusun Krajan terdapat sebuah TK, SD, dan SMP yaitu SD Slamparejo 1, TK Dharma Wanita dan SMP N 2 Jabung. SMP N 2 Jabung yang terletak di Dusun Krajan memiliki skala pelayanan hingga lintas desa.

### c) Fungsi Kesehatan

Di wilayah Desa Slamparejo, terdapat sebuah polindes yang terletak di Dusun Busu di depan SDN 3 Slamparejo. Fungsi kesehatan yang di Dusun Busu digunakan sebagai tempat berobat bagi seluruh penduduk dengan skala pelayanan 1 desa. Akan tetapi, saat ini fungsi polindes sedang terhambat karena kondisi bangunan yang rusak. Selain polindes, di Dusun Busu juga terdapat bidan yang berjumlah 1 orang sehingga pengganti fungsi polindes untuk sementara dipindahkan ke bidan. Selain memiliki Polindes Desa Slamparejo juga memiliki Puskesmas yang terletak di Dusun Krajan. Puskesmas ini selain melayani warga Desa Slamparejo juga melayani warga dari desa lain.

### d) Fungsi Perdagangan dan Jasa

Jumlah sarana perdagangan dan jasa di Desa Slamparejo sudah mencukupi kebutuhan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya kios-kios dan toko-toko yang terletak di sepanjang jalan baik di Dusun Krajan maupun Busu.

Bila ditinjau berdasarkan aspek aksesibilitasnya, Dusun Krajan memiliki tingkat aksesibilitas yang cukup baik. Namun hal tersebut berbeda dengan di Dusun Busu. Kondisi fisik jaringan jalan Dusun Busu hampir seluruh jaringan jalannya memiliki jenis perkerasan berupa aspal dengan kondisi yang kurang baik atau cukup rusak. Kondisi perkerasan aspal di desa Slamparejo yang rusak terutama di Dusun Busu dapat membuat perjalanan pengguna jalan terganggu dan tidak lancar, kondisi perkerasan yang rusak lebih disebabkan oleh banjir yang terjadi hamper setiap tahun. Selian itu juga karena kurangnya

perhatian dari pemerintah tentang perawatan jalan dan sering dilewati kendaraan berat yang mengangkut hasil pertanian.

## 2. Sub pusat kegiatan atau pelayanan

Sub pusat kegiatan atau pelayanan di Desa Slamparejo berada di dua sub wilayah administratif Desa Slamparejo, yaitu Dusun Busu. Dusun Busu merupakan salah satu sub pusat kegiatan atau pelayanan di Desa Slamparejo. Wilayah dusun tersebut ditandai dengan adanya permukiman dengan pola linear terhadap jaringan jalan, baik jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, maupun jalan lingkungan. Beberapa fungsi yang ternaungi pada Dusun Busu antara lain fungsi perdagangan dan jasa, fungsi pendidikan (TK dan SD) dan fungsi peribadatan (masjid dan musholla). Namun persebaran sarana dan prasarana serta skala pelayanannya lebih minim daripada Dusun Krajan, sehingga jumlah sebaran pergerakan juga lebih sedikit sehingga Dusun Krajan yang menjadi pusat kegiatan. Selain itu, jaringan jalan menuju Dusun Busu kondisinya rusak. Sehingga aksesibilitas menuju dusun ini sulit, Hal ini berbeda dengan Dusun Krajan yang merupakan jalur utama antar desa maupun yang menuju ke kawasan wisata Gunung Bromo.

## 3. Linkage Sistem

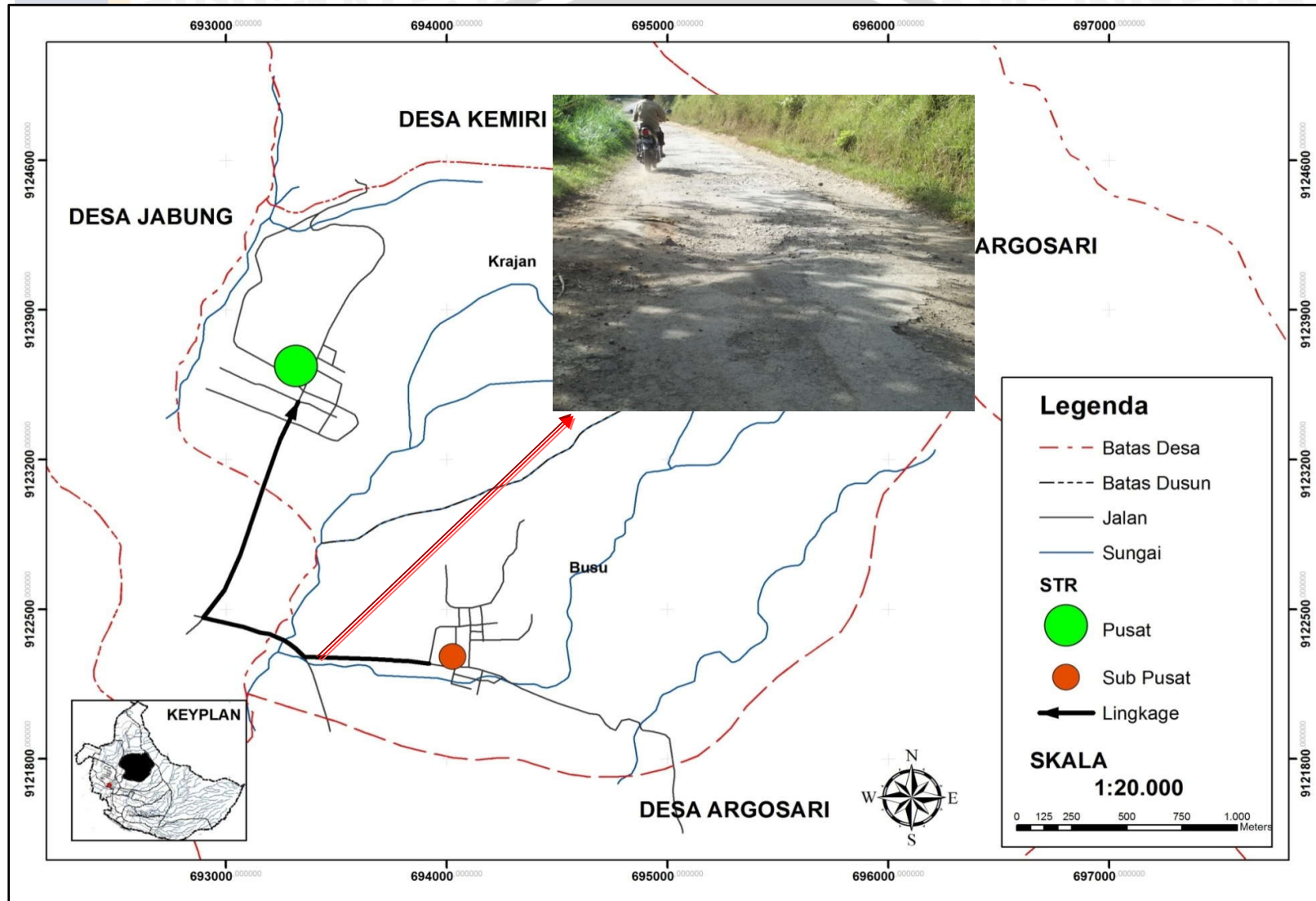
*Linkage system* adalah hubungan antara titik pusat pelayanan dengan titik sub pusat dan sub-sub pusat pelayanan. Hubungan aktivitas antara pusat dan sub pusat kegiatan Desa Slamparejo dirasakan kurang seimbang oleh masyarakat desa tersebut, terutama Dusun Busu. Hal ini disebabkan karena Dusun Busu terletak terpisah dengan Dusun Krajan sebagai pusat kegiatan dengan jarak 3 km maupun dengan sub pusat kegiatan lainnya. Akses yang dilalui juga sulit dan melewati lahan tegalan jagung dan tebu, selain itu penerangan jalan belum ada Akibatnya rawan terjadi tindak kejahatan dan kriminalitas. Akses sulit disebabkan jaringan jalan yang menghubungkan antara sub pusat dan pusat kegiatan dalam kondisi kurang baik/ rusak selain itu juga harus melalui desa lain yaitu Desa Jabung sehingga jarak pun jauh. Hal ini menyebabkan perkembangan Dusun Busu lebih lambat dari pada Dusun Krajan. Selain itu timbulnya semacam “gap” untuk Dusun Busu dari Dusun Krajan karena kondisi social masyarakatnya yaitu Dusun Busu lebih didominasi oleh masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah dari pada Dusun Krajan yang masyarakatnya memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup. Akses yang sulit ini dapat mempengaruhi penduduk dalam memperoleh dan menyediakan pangan.





**Gambar 4.10 Kondisi Jalan yang menghubungkan Dusun Busu dengan Desa Jabung**





Gambar 4.11 Peta Struktur Tata Ruang



## 4.2 Kondisi Non-Fisik

Identifikasi kondisi fisik digunakan untuk mengetahui potensi dan masalah fisik Desa Slamparejo dalam mendukung upaya pengembangan Desa Slamparejo menuju Desa Mandiri Pangan. Non-Fisik yang meliputi jumlah penduduk usia kerja, kapasitas pendidikan dan pelatihan, karakteristik kerawanan pangan dan ketahanan pangan masyarakat.

### 4.2.1 Kondisi Sumber Daya Pangan

Kondisi sumber daya pangan di Desa Slamparejo terdiri dari sumber daya pertanian, perkebunan dan peternakan. Berdasarkan kondisi yang ada dilakukan perbandingan dengan standard kebutuhan pangan PPH.

#### A. Pertanian

Pertanian Desa Slamparejo terdapat di kedua dusun yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data profil desa tahun 2010 lahan penggunaan sawah dibedakan menjadi tiga yaitu :

**Tabel 4.6 Penggunaan Lahan Pertanian**

Jenis Sawah	Luas (Ha)
Sawah Irigasi	12
Sawah Setengah Teknis	35
Sawah Tadah Hujan	11
Total	58

Sumber: Profil Desa Slamparejo, 2010

Luas penggunaan lahan keseluruhan untuk sawah di Desa Slamparejo adalah 58 Ha. Sedangkan luas ladang/tegalan adalah 239,377 Ha. Hasil pertanian di Desa Slamparejo meliputi : tanaman palawija dan buah-buahan.

1. Luas pertanian tanaman palawija : 28 Ha

Tanaman palawija yang dihasilkan adalah berupa jagung (luas 20 Ha, hasil panen 8 Ton/Th), ubi kayu (luas 60 Ha, hasil panen 40 Ton/Th) dan kacang tanah (luas 5 Ha, hasil panen 18 Ton/Th).

2. Luas pertanian tanaman padi : 212 Ha

Tanaman padi berupa sawah seluas 58 Ha dengan hasil panen sebanyak 406 Ton/Th, sedangkan hasil tanaman padi dari ladang seluas 154 Ha adalah 250 Ton/Th. Jadi total padi yang dihasilkan di Desa Slamparejo setiap tahun adalah 656 Ton.



3. Luas pertanian tanaman buah-buahan : 11 Ha  
 Jenis buah-buahan yang ditanam antara lain salak, pisang, alpokat, dan durian.  
 Berikut adalah tabel hasil tanaman buah-buahan :

**Tabel 4.7 Penggunaan Lahan Pertanian Buah-buahan**

Jenis Buah-buahan	Luas (Ha)	Ton/Tahun
Salak	0,5	2,5
Pisang	8	3,2
Alpokat	2	1,8
Durian	0,5	1,5
	11	9,0

Sumber: Profil Desa Slamparejo, 2010

Secara umum, mekanisme pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Desa Slamparejo dengan cara dijual melalui tengkulak. Pemasaran dengan sistem ini kurang baik namun masyarakat tetap menggunakannya karena keterbatasan akses maupun rendahnya sumber daya manusia yang ada.

#### **B. Perkebunan**

Hasil tanaman perkebunan Desa Slamparejo menurut jenis komoditasnya antara lain kelapa , kopi, ketela pohon dan tebu. Hasil tanaman tebu terbesar dibanding tanaman perkebunan lainnya, dari 115 Ha mampu menghasilkan 3300 ton/tahun. Hasil kebun terbesar kedua adalah ketela pohon dengan luas 5 ha mampu menghasilkan 150 ton/tahun. Sedangkan kopi dengan luas lahan 17 Ha dan kelapa 13 Ha mampu menghasilkan 11 ton/tahun dan 40,62 ton/tahun.

Cara pemasaran hasil kebun ini bermacam-macam. Namun cara yang paling sering digunakan adalah menjualnya melalui tengkulak. Meski cara ini sering digunakan, tetapi tidak menutup kemungkinan penduduk menjualnya melalui KUD dan langsung kepada konsumen. Hal ini tergantung dari kondisi dan permintaan.

#### **C. Peternakan**

Potensi ternak yang dikembangkan di Desa Slamparejo meliputi: sapi, ayam buras, ayam ras, itik, entok, angsa, kambing dan domba. Namun tidak semua pemilik usaha ternak ini adalah penduduk Desa Slamparejo. Usaha ternak yang dimiliki oleh penduduk Desa Slamparejo hanya sapi, kambing dan domba. Berikut adalah Tabel 4.8, populasi ternak Desa Slamparejo.

**Tabel 4.8 Populasi Ternak**

No.	Jenis Ternak	Jumlah Populasi Ternak	Jumlah Pemilik
1.	Sapi Perah	978	579
2.	Sapi Potong	10	-
3.	Kambing	467	36
4.	Domba	45	5
5.	Ayam Kampung	7790	-
6.	Ayam Broiler	9000	-
7.	Itik	216	-
8.	Entok	245	-
9.	Angsa	94	-

Sumber: Tingkat Perkembangan Desa Slamparejo, 2010

Berdasarkan kondisi sumber daya pangan ini dilakukan perbandingan dengan standard PPH, namun yang dapat dibandingkan hanya hasil pertanian dan perkebunan karena sulit untuk mengetahui data jumlah pangan hewani per kapita per hari. Berikut adalah perbandingan dengan standard PPH:

**Tabel 4.9 Tabel Perbandingan Produksi Pangan Lokal dengan Standard PPH**

Jenis Tanaman Pangan	Hasil Panen (Ton/Th)	Konversi Hasil Panen (Gr/kap/hr)	Standard PPH (Gr/kap/hr)	Perbandingan dengan Standard
Padi-padian	656	369,38	300	Memenuhi
Umbi-umbian	65	105,7	100	
Biji/buah berminyak	40,62	22,6	10	
Kacang-kacangan	18	10,17	35	Dibawah Standard
Buah dan sayur	9	4,9	250	

Berdasarkan hasil perbandingan dengan standard PPH diatas diketahui potensi sumber pangan lokal Desa Slamparejo masih belum memenuhi ketersediaan pangan secara mandiri yang berbasis sumber daya lokal. Hal ini disebabkan kurangnya penganekaragaman produksi pangan lokal, yaitu untuk jenis tanaman buah dan sayur. Hasil produksi masih rendah dibandingkan standard PPH, sehingga tidak memenuhi kebutuhan keseluruhan masyarakat Desa Slamparejo secara mandiri.

#### 4.2.2 Kondisi Sosial Ekonomi dan Kependudukan

Berdasarkan Data Dasar Profil Desa/ Kelurahan Slamparejo Kecamatan Jabung, jumlah penduduk keseluruhan Desa Slamparejo pada tahun 2010 adalah sebesar 4925 jiwa dengan luas wilayah 867,982 Ha. Dari data yang didapat, jumlah penduduk selalu mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan.

### A. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

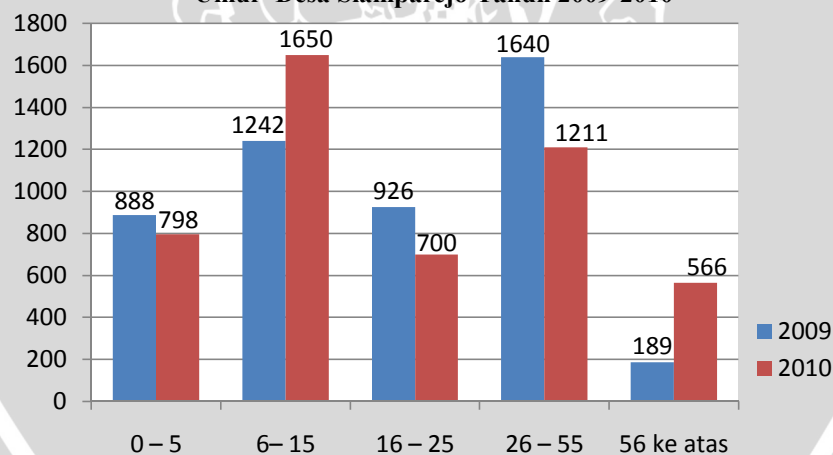
Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Slamparejo pada tahun 2010 adalah sebanyak 1488 KK. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2010 sebesar 4925 jiwa, sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 4885 jiwa. Mayoritas penduduk Desa Slamparejo berumur antara 10 tahun. Adapun jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada Tabel 4.22 dan Gambar 4.4.

**Tabel 4.10 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Slamparejo Tahun 2009-2010**

Kelompok Umur	Tahun 2009		Tahun 2010			
	Jumlah (jiwa)	Prosentase (%)	Jumlah (jiwa)		Prosentase (%)	
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0 – 5	888	18,18	391	407	15,63	16,80
6 – 15	1242	25,42	831	819	33,21	33,80
16 – 25	926	18,95	361	339	14,43	13,99
26 – 55	1640	33,58	621	590	24,82	24,35
56 ke atas	189	3,87	298	268	11,91	11,06
<b>Total</b>	<b>4885</b>	<b>100</b>	<b>2502</b>	<b>2423</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: Profil Desa Slamparejo, 2009-2010

**Gambar 4.12 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Slamparejo Tahun 2009-2010**



### B. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dilihat dari tingkat pendidikannya, pada tahun 2010 penduduk Desa Slamparejo mayoritas tamat SD/ sederajat sebanyak 2732 jiwa, tamat SLTP/ sederajat sebanyak 67, tamat SLTA sebanyak 13, sedangkan sisanya tersebar antara usia 7 tahun ke atas yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD/ sederajat. Untuk lebih jelasnya



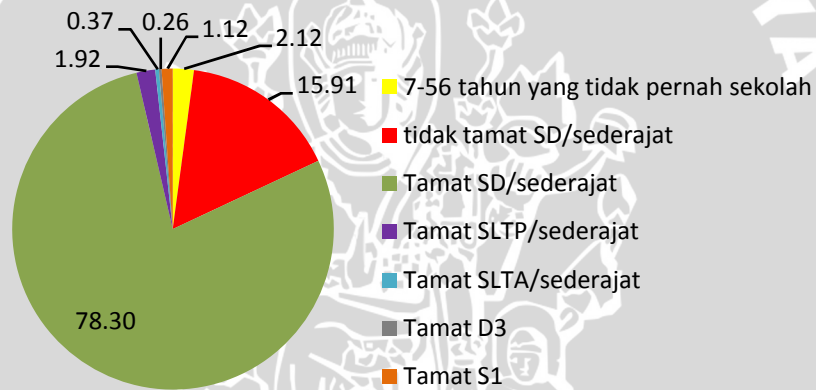
jumlah penduduk Desa Slamparejo menurut tingkat pendidikan tahun 2008 terdapat pada Tabel 4.13

**Tabel 4.11 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Slamparejo Tahun 2010**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)		Prosentase
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Penduduk usia 7-56 tahun yang tidak pernah sekolah	18	56	2.12
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	353	202	15.91
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	1414	1318	78.30
4.	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	43	24	1.92
5.	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	9	4	0.37
6.	Penduduk Tamat D3	5	4	0.26
7.	Penduduk Tamat S1	17	22	1.12

Sumber : Data Dasar Profil Desa/Kelurahan Slamparejo, 2010

**Gambar 4.13 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Slamparejo Tahun 2010**



**C. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian**

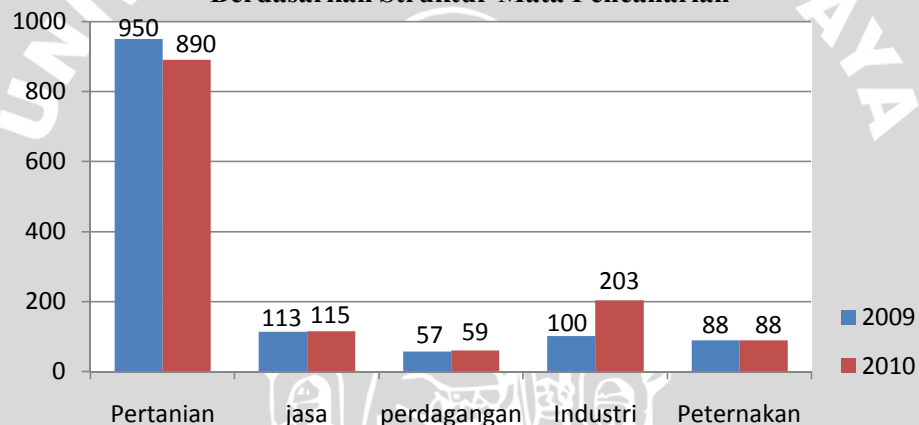
Berdasarkan data profil desa, pada tahun 2009 penduduk Desa Slamparejo mayoritas memiliki usaha dalam sektor pertanian. Penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani sebanyak 950 orang. Namun dari jumlah tersebut mayoritas sebagai buruh tani yaitu sebanyak 693 orang. Sedangkan penduduk lainnya bekerja dalam sektor jasa/perdagangan, industri, dan beberapa sebagai PNS. Kondisi ini mengalami perubahan pada tahun 2010. Pada tahun 2010, penduduk yang bekerja dalam sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 890 orang, sedangkan yang sebagai buruh tani sebanyak 650 orang. Sedangkan mata pencaharian untuk sektor lain mengalami peningkatan.

**Tabel 4.12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian Desa Slamparejo Tahun 2009-2010**

No.	Struktur Mata Pencaharian Penduduk	Jumlah (jiwa)	
		2009	2010
1.	Sektor Pertanian	950	890
2.	Sektor jasa	113	115
3.	Sektor perdagangan	57	59
4.	Sektor Industri	100	203
5.	Sektor Peternakan	88	88

Sumber : Data Dasar Profil Desa Slamparejo, 2010

**Gambar 4.14 Jumlah Penduduk Desa Slamparejo Berdasarkan Struktur Mata Pencaharian**



Meskipun penduduk Desa Slamparejo telah memiliki berbagai macam mata pencaharian dalam sektor-sektor tertentu, namun masih banyak penduduk yang bekerja sebagai buruh. Buruh tani merupakan mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Slamparejo yaitu sebanyak 650 orang, dan dari 1488 KK sebanyak 372 KK merupakan keluarga buruh tani. Sedangkan penduduk yang bermatapencaharian sebagai buruh disektor lain memiliki jumlah yang lebih sedikit, antara lain 850 orang di sektor peternakan, 24 di sektor jasa, dan 2 orang di sektor perdagangan. Hal ini dapat disimpulkan dari 1355 orang jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan, 47,97 % bekerja sebagai buruh.

Rendahnya kualitas SDM menjadi penyebab banyaknya penduduk Desa Slamparejo yang bekerja sebagai buruh. Mayoritas penduduk Desa Slamparejo tamat

SD/ sederajat bahkan masih ada penduduk usia kerja yang tidak pernah tamat SD/ sederajat. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.11.

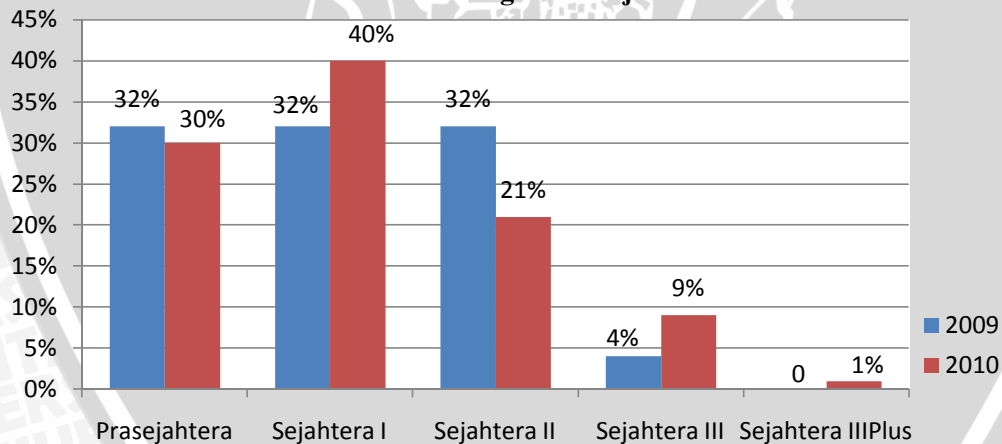
Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah berpengaruh dalam tingkat kesejahteraan keluarga. Rata-rata penduduk desa slamparejo hanya memiliki pendapatan 25.000 rupiah per hari. Namun, tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Slamparejo ini naik dari tahun 2009-2010. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.13.

**Tabel 4.13 Kesejahteraan Keluarga Desa Slamparejo Tahun 2009-2010**

No.	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah (KK)			
		2009		2010	
		Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
1.	Keluarga prasejahtera	479	32 %	451	30 %
2.	Keluarga Sejahtera I	486	32 %	588	40 %
3.	Keluarga Sejahtera II	480	32 %	310	21 %
4.	Keluarga Sejahtera III	59	4 %	127	9%
5.	Keluarga Sejahtera III Plus	-	-	12	1 %
Total Jumlah KK		1504		1488	

Sumber : Data Dasar Profil Desa Slamparejo, 2010

**Gambar 4.15 Prosentase Jumlah Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan**



Berdasarkan Tabel 4.13 dan Gambar 4.15, jumlah keluarga prasejahtera mengalami penurunan dari tahun 2009-2010. Meski dari segi jumlah menurun namun dalam prosentasenya penurunan tidak begitu signifikan. Tahun 2009 memiliki prosentase keluarga prasejahtera sebesar 31,84 % sedangkan tahun 2010 sebesar 30,31 %, sehingga mengalami penurunan 1,53 %.



### 4.2.3 Kondisi Kerawanan Pangan Masyarakat Desa Slamparejo

Kondisi kerawanan pangan yang dialami suatu keluarga disebabkan karena banyak faktor. Menurut Hanafie dalam bukunya pengantar ekonomi pertanian, menyebutkan sebab kerawanan pangan adalah kurang atau tidak adanya akses memperoleh pangan. Akses ini terdiri dari akses fisik dan ekonomi (pendapatan). Berikut adalah tabel yang menunjukkan rendahnya akses pangan Desa Slamparejo.

**Tabel 4.14 Kondisi Rendahnya Akses Pangan Desa Slamparejo**

Akses Pangan	Sub Variabel	Kondisi Eksisting
Akses Fisik	Struktur Tata Ruang	Dusun Busu yang memiliki struktur ruang terpisah dari pusat desa dan desa-desa lainnya serta satu-satunya akses jalan menuju kesana rusak menyulitkan masyarakat Dusun Busu menuju ke pusat desa maupun ke desa-desa lainnya.
	Prasarana	Selain jalan yang menuju Dusun Busu, irigasi juga memiliki kondisi rusak.
	Produksi Pangan Lokal	Berdasarkan hasil perbandingan dengan standard PPH pada sub bab sebelumnya diketahui potensi sumber pangan lokal Desa Slamparejo masih belum memenuhi ketersediaan pangan
	Penggunaan Lahan	Penggunaan lahan yang sekarang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memenuhi produksi pangan lokal yang sesuai standard PPH.
Akses Ekonomi	Pendapatan	Rendahnya pendapatan masyarakat, bahkan yang bekerja sebagai buruh tani memiliki pendapatan hanya delapan ribu rupiah per hari.
	Tingkat Kesejahteraan	30 % KK Desa Slamparejo berada pada tingkat pra sejahtera

Desa Slamparejo memiliki kondisi fisik yang belum mampu mendukung kemudahan masyarakat memperoleh bahan pangan, khususnya masyarakat Dusun Busu. Berdasarkan hasil survai kondisi prasarana, seperti irigasi dan jalan, juga masih buruk atau rusak. Irigasi yang ada tidak dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat, akibat kondisi yang rusak dan tidak pernah mendapat perbaikan. Jalan menuju Dusun Busu memiliki kondisi rusak dan belum terdapat penerangan jalan.

Kondisi struktur tata ruang Desa Slamparejo menunjukkan Dusun Krajan sebagai pusat desa. Sedangkan Dusun Busu secara fisik terpisah dan satusatunya akses jalan menuju kesana juga susah. Hal ini akan mempengaruhi kemudahan masyarakat Dusun Busu menuju ke pusat desa maupun ke desa-desa lainnya. Selain itu, akan berpengaruh pada distribusi hasil produksi pangan lokal Desa Slamparejo.

Produksi pangan lokal Desa Slamparejo belum sepenuhnya mendukung ketahanan pangan desa. Berdasarkan hasil perbandingan dengan standard PPH pada sub bab sebelumnya diketahui potensi sumber pangan lokal Desa Slamparejo masih belum memenuhi ketersediaan pangan secara mandiri yang berbasis sumber daya lokal. Hal ini disebabkan kurangnya penganeekaragaman produksi pangan, yaitu untuk jenis tanaman buah dan sayur. Hasil produksi jenis tanaman buah dan sayur masih rendah dibandingkan standard PPH, sehingga tidak memenuhi kebutuhan keseluruhan masyarakat Desa Slamparejo. Hasil produksi pangan yang kurang beranekaragam ini menyebabkan rendahnya pola konsumsi penganeekaragaman pangan.

Akses ekonomi masyarakat miskin Desa Slamparejo juga belum memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat miskin Desa Slamparejo rata-rata adalah 25 ribu rupiah, namun sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh tani memiliki pendapatan per hari hanya 8 ribu rupiah. Akibatnya daya beli masyarakat akan pangan rendah. Karena ketika pendapatan kurang, masyarakat lebih memilih mengurangi kebutuhan pangan dari pada kebutuhan lain, seperti biaya sekolah anak. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi pola konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat.

#### **4.2.4 Identifikasi Program Pendukung Upaya Desa Slamparejo Menuju Desa Mandiri Pangan**

Ada beberapa program yang dijalankan di Desa Slamparejo setelah desa ini ditetapkan sebagai desa rawan pangan. Program yang paling utama dalam mengatasi masalah kerawanan pangan di Desa Slamparejo adalah program aksi desa mandiri pangan. Selain itu juga ada beberapa rprogram yang bersinergi dengan program ini. Berikut adalah identiffikasi program-program tersebut:

##### **A. Program Aksi Desa Mandiri Pangan**

Desa Slamparejo sebagai salah satu lokasi program desa mandiri pangan merupakan desa rawan pangan di Kabupaten Malang yang memiliki kondisi kecukupan dan akses pangan yang masih rendah. Program tersebut telah berlangsung selama dua tahun dan saat ini menuju pada tahapan pengembangan, sedangkan tahapan persiapan dan penumbuhan telah dilalui.

Pada bagian pembahasan ini, akan dilakukan identifikasi program desa mandiri pangan di Desa Slamparejo khususnya pada tahapan persiapan dan penumbuhan. Identifikasi hanya dibatasi pada dua tahun pelaksanaan program disamping karena saat ini tahapan program baru



jalan pada tahun ketiga atau tahap pengembangan juga dikarenakan pada dua tahun pertama inilah merupakan dasar dari pelaksanaan program secara keseluruhan dimana kegiatan yang ada didalamnya banyak melibatkan peran aktif masyarakat. Diharapkan dengan melakukan identifikasi, dapat diputuskan bahwa apakah program yang telah ditetapkan tersebut telah sesuai dengan kondisi desa yang sebenarnya dan mampu di dukung SDA yang ada serta partisipasi aktif warga desa. Hal ini dikarenakan suatu program/kegiatan pembangunan yang bersifat *top-down* harus sesuai dengan kondisi objeknya.

Seleksi desa merupakan kegiatan awal yang dilakukan untuk mengetahui daftar nama desa miskin sebagai calon penerima program desa mandiri pangan. Proses seleksi dilakukan berdasarkan data pemetaan rawan pangan nasional dan ditindaklanjuti pemetaan desa-desa miskin yang ada di kabupaten tersebut sesuai data sekunder yang diperoleh dari BPS. Sasaran pelaksanaan seleksi desa diarahkan kepada desa miskin yang memenuhi syarat sesuai yang ditetapkan dalam pedoman umum program aksi desa mandiri pangan dan diutamakan desa yang belum pernah mendapat proyek atau program pemerintah sebelumnya. Tahapan pelaksanaan seleksi desa tingkat kabupaten dimulai dengan pertemuan program desa mandiri pangan di tingkat kabupaten yang dihadiri oleh dinas terkait di tingkat kabupaten dan pemerintah daerah. Berikut adalah kriteria penetapan desarawan pangan yang meliputi;

- ✓ Merupakan kriteria desa miskin dengan jumlah KK miskin sebesar 30%
- ✓ Mempunyai potensi (SDA dan SDM) mendukung program pembangunan ketahanan pangan
- ✓ Keterbatasan sarana dan prasarana

Daftar desa miskin dimaksud disampaikan bahwa desa-desa yang sesuai dengan kriteria miskin terutama desa yang belum pernah menerima kegiatan proyek dari Dinas/instansi. Kemudian dibuat prioritas desa miskin yang dipilih untuk menerima program pada tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Penentuan prioritas desa ini ditentukan oleh jarak desa dari pemerintahan kabupaten, berat ringannya permasalahan yang dihadapi sekurang-kurangnya dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi desa tersebut terkait dengan kriteria desa miskin.



**Tabel 4.15 Kesesuaian Seleksi Desa Slamparejo sebagai Sasaran Program Desa Mandiri Pangan**

No.	Kebijakan	Kesesuaian Penetapan Lokasi
1	Keputusan Bupati Malang Nomor 180/242/KEP/421.013/2010 Tentang Penetapan Lokasi Desa Kegiatan Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Malang Tahun anggaran 2010	Desa Slamparejo Kecamatan Jabung dan tiga desa lain di Kabupaten Malang ditetapkan sebagai Lokasi Desa Mandiri Pangan.
2	Data SKPG Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Desa Slamparejo masuk dalam zona rawan pangan
3	Kriteria desa rawan pangan berdasarkan Pedoman Umum Program Desa Mandiri Pangan : <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Merupakan kriteria desa miskin dengan jumlah KK miskin sebesar 30%</li> <li>✓ Mempunyai potensi (SDA dan SDM) mendukung program pembangunan ketahanan pangan</li> <li>✓ Keterbatasan sarana dan prasarana</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Merupakan desa miskin dengan jumlah KK miskin sebesar 451 yaitu 32,33%</li> <li>✓ Mempunyai potensi (SDA dan SDM) mendukung program pembangunan ketahanan pangan</li> <li>✓ Keterbatasan sarana dan prasarana</li> </ul>

Berdasarkan kesesuaian dengan kebijakan daerah Kabupaten Malang, Desa Slamparejo merupakan desa rawan pangan yang sesuai sebagai sasaran program desa mandiri pangan. Setelah dilakukan penetapan lokasi, disusunlah Data Dasar Rumah Tangga dan Survei Rumah Tangga untuk mengetahui kondisi rumah tangga miskin di Desa Slamparejo.

Proses perencanaan program didasarkan pada hasil pendataan kondisi awal (DDRT dan SRT). Penyusunan perencanaan dilakukan secara partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat yang difasilitasi oleh pendamping. Proses penyusunan rencana diawali dengan pemberian uang sejumlah seratus juta oleh Pemerintah melalui BKP3 untuk dikelola dalam sebuah usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Hasil proses penyusunan perencanaan program, masyarakat memilih usaha ternak sapi sebagai usaha dalam program desa mandiri pangan. Dari uang 100 Juta tersebut digunakan untuk membeli sapi sejumlah 20 ekor. Sapi ini dibagikan kepada 4 kelompok afinitas yang dibentuk. Sehingga ada 5 sapi yang diberikan kepada setiap kelompok. Dari setiap 1 ekor sapi yang didapat nantinya akan dijual ketika telah bunting 8 bulan. Hasil penjualan sapi akan digunakan untuk membeli sapi kembali sejumlah 2 ekor dan wajib menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000 kepada Lembaga Keuangan Desa sebagai dana kelompok. Hal ini dilakukan hingga semua anggota kelompok memperoleh 1 ekor sapi.

Rencana kelompok yang mencakup perencanaan penguatan kelompok dan perencanaan pengembangan usaha kelompok diatas selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan

Kelompok (RKK). RKK yang telah disusun dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan rencana di tingkat desa. Penyusunan perencanaan desa dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan perangkat desa, pemangku kepentingan (tokoh masyarakat) dan tokoh pemuda atau karang taruna untuk dapat mengumpulkan informasi kondisi desa, permasalahan-permasalahan terkait kerawanan pangan (lahan, air, iklim, teknologi, input produksi, SDM), serta potensi dan alternatif pemecahan secara mandiri.

### **B. Sinergitas Program-Program Upaya Desa Slamparejo Menuju Desa Mandiri Pangan**

Program desa mandiri pangan ini juga mengintegrasikan program-program pembangunan yang sudah dan akan ada di Desa Slamparejo. Bentuk sinergitas ini baik dalam hal pembangunan fisik sarana-prasarana maupun pembangunan sumberdaya manusia dalam hal pembinaan maupun bentuk lain yang menunjang pengembangan pedesaan menuju desa mandiri pangan. Program-program tersebut antara lain:

#### ✓ Rumah Kompos

Desa Slamparejo memiliki dua rumah kompos yang terletak di masing-masing dusun. Rumah kompos merupakan program percontohan dari dinas pertanian dan dinas peternakan. Didalam rumah ini juga disediakan alat pengolahan dan alat pengangkut berupa motor roda tiga. Program ini telah diimplementasikan sejak tahun 2010. Rumah kompos sangat mendukung program aksi desa mandiri pangan yang di Desa Slamparejo berupa ternak sapi. Limbah ternak sapi ini mampu diolah kembali menjadi pupuk dan bahan bakar gas (biogas). Limbah ini digunakan sebagai bahan baku memproduksi pupuk organik yang nantinya digunakan masyarakat dalam bercocoktanam. Selain digunakan sendiri, pupuk ini juga sebagian dijual. Rencana kedepan masyarakat akan bekerja sama dengan instansi yang mampu mengembangkan produk pupuk organik ini namun masyarakat masih terkendala dengan pemasaran keluar daerah. Oleh karena itu rumah kompos selain mendukung program aksi desa mandiri pangan juga membantu masyarakat dalam mengatasi masalah limbah ternak sapi yang terlalu banyak dan mengotori lingkungan.





**Gambar 4.16 Rumah Kompos**

✓ **Lumbung Pangan Desa**

Program lumbung desa di Desa Slamparejo merupakan program percontohan dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian yang dirintis sejak tahun 2010 untuk mendukung Program Aksi Desa Mandiri Pangan yang telah dirintis tahun sebelumnya. Namun sampai saat ini lumbung ini belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat Desa Slamparejo terkait program kemandirian pangan. Sementara ini, yang memanfaatkan hanya kelompok Tani Sumberuko 1 yaitu digunakan untuk menyimpan gabah yang dibeli dari anggota kelompok serta pupuk. Pupuk dan gabah ini nantinya akan dijual kembali kepada masyarakat. Selain itu, beberapa penduduk juga telah memanfaatkan lumbung desa untuk menyimpan hasil pertaniannya seperti kopi, jagung, dan ketela pohon.



**Gambar 4.17 Lumbung Pangan Desa**

✓ **Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)**

Tujuan program ini adalah mendorong kesadaran dan kepedulian keluarga miskin akan pentingnya penganekaragaman konsumsi pangan melalui kegiatan pelatihan memasak bahan non beras dan sosialisasi guna meningkatkan pengetahuan penganekaragaman pangan. Berikut adalah kegiatan dalam lingkup program P2KP.

a. **Pemanfaatan Lahan Pekarangan**

Program ini merupakan program percontohan yang berasal dari Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKP3) sama dengan program



lambung desa. Rumah-rumah warga yang memiliki pekarangan yang cukup luas dapat memanfaatkannya sebagai lahan perkebunan tanaman musiman, ternak lele, dan kegiatan lain yang mendukung. Hasil perkebunan ini dikonsumsi sendiri dengan tujuan mampu menganekaragamkan konsumsi pangan secara mandiri.

b. Pembagian Susu Gratis

Kegiatan ini dilaksanakan di sekolah-sekolah dasar yang ada di Desa Slamparejo yang merupakan bantuan pemberian susu gratis dari BKP3 Kabupaten Malang. Susu secara gratis ini diberikan selama tiga bulan. Program percontohan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan gizi anak.

c. Sosialisasi dan Pelatihan memasak bahan makanan non beras

Sosialisasi dan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan pelatihan kepada masyarakat tentang cara memasak bahan makanan non beras. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin ketergantungannya masyarakat akan beras, selain itu juga mendukung upaya diversifikasi konsumsi pangan. Pelatihan dan sosialisasi ini dilakukan di rumah-rumah penduduk dengan peserta ibu-ibu PKK didampingi oleh fasilitator.

✓ Biogas

Sejak tahun 1992 biogas telah digunakan di Desa Slamparejo sebagai percontohan. Kemudian tahun 2002 mulai dikembangkan dengan bantuan dana dari AIFOS perusahaan dari Belanda. Potensi ternak sapi yang dimiliki Desa Slamparejo sangat mendukung pengembangan biogas disana. Terutama setelah adanya program aksi desa mandiri pangan, biogas akan saling mendukung dengan program tersebut. Saat ini ada 28 unit biogas yang digunakan oleh  $\pm$  50 KK. Biogas ini digunakan oleh masyarakat untuk bahan bakar memasak, namun terkadang juga dipakai untuk penerangan ketika listrik padam.



**Gambar 4.18 Pemanfaatan Biogas**

✓ **PNPM**

Program PNPM yang telah dilaksanakan antara lain pembuatan TPT dan PIPANISASI. Untuk pembuatan TPT telah ada sejak tahun 2009 di Dusun Busu dengan total yang dibangun sepanjang 3050 m. Selanjutnya pembagunan TPT dilaksanakan di Dusun Krajan di tahun 2010 dengan lokasi di RW 2 sepanjang 1000 m dan RW 1 2400 m. Sedangkan untuk proyek pipanisasi hanya Dusun Krajan yang merasakan manfaatnya, karena di Dusun Busu sampai saat ini belum pernah mendapatkan proyek ini.



**Gambar 4.19 TPT dan Pipanisasi Proyek PNPM Mandiri**

#### **4.3 Kajian Partisipasi Masyarakat Dalam Program Upaya Desa Slamparejo Desa Mandiri Pangan**

Kondisi partisipasi masyarakat sudah ada sebelumnya antara lain dengan memanfaatkan kelembagaan lokal yang ada seperti kelompok tani dan PKK, namun belum optimal. Perlu adanya peningkatan SDM dari pelaku dengan menumbuhkan dan lebih mengoptimalkan peran kelembagaan yang ada sehingga akan mampu mengelola SDA yang ada secara optimal dan terdistribusi merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam melakukan fungsi pengelolaan dan layanan. Pada program desa mandiri pangan Desa Slamparejo peningkatan kapasitas SDM dilakukan melalui kegiatan berupa pelatihan teknis,



pengelolaan administrasi, pengorganisasian, peningkatan keterampilan masyarakat di bidang pertanian, peternakan dan memasak sehingga dapat menerapkan strategi pengembangan menuju kemandirian.

Survei telah dilakukan terhadap keluarga miskin di Desa Slamparejo untuk mengetahui kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan. Beberapa variabel yang menjadi fokus survei antara lain pengetahuan masyarakat akan program, peran/pengaruh masyarakat dalam program, proses pengambilan keputusan, dan wewenang dalam program. Berikut adalah identifikasi partisipasi masyarakat berdasarkan hasil survei dengan metode kuisioner :

**Tabel 4.16 Hasil Survei Identifikasi Partisipasi Masyarakat**

Skala Linkert	Variabel (%)				
	Pengetahuan Program	Peran / Pengaruh dalam program	Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan	Kewenangan	
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	0.00	9.20	12.64	0.00	0.00
3	21.84	32.18	41.38	19.54	19.54
4	65.52	51.72	42.53	33.33	33.33
5	12.64	6.90	3.45	47.13	47.13

Berdasarkan hasil survei diketahui masyarakat sebagian besar hanya sekedar tahu mengenai program desa mandiri pangan yaitu 65,52% , sedangkan masyarakat yang tahu tujuan dan dampak program hanya 12,64%. Meskipun demikian 51,72% masyarakat merasa memiliki pengaruh yang cukup dalam pelaksanaan program. Bahkan dalam pengambilan keputusan saat pertemuan rutin antar kelompok atau pun dengan Tim Pengawas (Tim pangan desa dan LKD) yang dilakukan dengan bebas dan terdapat penjangkaran pendapat, masyarakat merasa berpengaruh dalam proses tersebut yaitu sebanyak 42,53% responden menyatakan hal yang sama. Partisipasi aktif dari masyarakat ini di dukung oleh pemerintah dengan adanya pembagian kewenangan antar masyarakat (kelompok afinitas) dan Tim Pengawas (Tim pangan desa dan LKD) yaitu masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana operasional program sedangkan pemerintah sebagai pendamping dan pengarah program. Berdasarkan kondisi partisipasi masyarakat yang telah teridentifikasi, berikut dilakukan penilaian sesuai pembobotan dan analisis untuk mengetahui kualitas dan tingkat partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan di Desa Slamparejo Kabupaten Malang.



**Tabel 4.17 Penilaian Identifikasi Partisipasi Masyarakat**

Indikator	Prosentase Responden (a)	Nilai (b)	Total Nilai (a*b)/20
Tingkat pengetahuan program	12.64	5	13.10
	65.52	4	3.28
	21.84	3	1.73
	6.90	5	10.34
Peran/pengaruh dalam Program	51.72	4	4.83
	32.18	3	0.92
	9.20	2	0.86
	3.45	5	8.51
Proses pengambilan keputusan	42.53	4	6.21
	41.38	3	1.26
	12.64	2	11.78
Pembagian kewenangan	47.13	5	6.67
	33.33	4	2.93
	19.54	3	13.10
			<b>75.58</b>

**Tabel 4.18 Penilaian Kualitas Partisipasi Masyarakat**

No	Kualitas Partisipasi	Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian Identifikasi Partisipasi Masyarakat
1	Kurang	indikator dipenuhi oleh 0% - 25% dari jumlah total responden	Total nilai partisipasi masyarakat sebesar 75,58%. Hal ini menunjukkan kualitas partisipasi masyarakat <b>sangat aktif</b> .
2	Rata-rata	indikator dipenuhi oleh 25,01% - 50% dari jumlah total responden	
3	Aktif	indikator dipenuhi oleh 50,01% - 75% dari jumlah total responden	
4	Sangat aktif	indikator dipenuhi oleh 75,01% - 100% dari jumlah total responden	

Selain menggunakan analisis kuantitatif dengan skala likert, juga dilakukan analisis secara kualitatif dengan membandingkan kondisi eksisting dengan kriteria kualitas partisipasi berdasarkan teori . Berikut adalah tabel analisis kualitas partisipasi masyarakat.

**Tabel 4.19 Analisis Kualitas Partisipasi Masyarakat Desa Slamparejo Dalam Program Desa Mandiri Pangan**

Kriteria (Teori Sumarto)	Eksisting	Kualitas Partisipasi
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kuantitas masyarakat desa yang terlibat dalam perencanaan dan implementasi</li> <li>▪ Keterlibatan masyarakat desa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan</li> <li>▪ Kebebasan berpendapat, berbicara dan keaktifan</li> <li>▪ Komposisi peserta pertemuan desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daftar hadir pertemuan rutin terakhir menunjukkan masyarakat yang hadir 62 orang, hampir seluruh undangan hadir</li> <li>▪ Masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan secara aktif</li> <li>▪ Ada proses penjangaran pendapat secara bebas (hasil survai kuisioner menunjukkan 47,13%)</li> <li>▪ komposisi kehadiran perempuan 16,13% dan masyarakat miskin 11,29%</li> </ul>	Berdasarkan perbandingan antara kriteria menurut andri (2003:339) dan kondisi eksisting maka <b>kualitas partisipasi</b> masyarakat Desa Slamparejo tergolong <b>Sangat aktif</b> .

Hasil analisis kualitas partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat Desa Slamparejo tergolong sangat aktif dalam program desa mandiri pangan. Kondisi ini sangat mendukung kegiatan program desa mandiri pangan. Berdasarkan kondisi eksisting pemerintah telah membagi wewenang yang jelas antara masyarakat (Kelompok afinitas), Tim Pangan Desa dan LKD. Selain itu juga telah ada kerjasama dengan KAN Jabung yang sangat membantu kegiatan pemasaran produksi susu yang dihasilkan Desa Slamparejo ke perusahaan susu yang terkenal yaitu Nestle. Berikut analisis tingkat partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan melakukan penilaian identifikasi partisipasi masyarakat dengan skala likert dan membandingkan kondisi eksisting berdasarkan hasil wawancara dengan teori arstein.

**Tabel 4.20 Penilaian Tingkatan Partisipasi Masyarakat**

No	Tingkatan Partisipasi	Kriteria Penilaian	Hasil Penilaian Identifikasi Partisipasi Masyarakat
1	Manipulasi ( <i>manipulation</i> )	indikator dipenuhi oleh 0% - 12,5% dari jumlah total responden	Total nilai partisipasi masyarakat sebesar 75,58%. Hal ini menunjukkan tingkatan partisipasi masyarakat berdasarkan teori arstein menunjukkan pada tingkatan delegasi wewenang ( <i>delegated power</i> ).
2	Terapi ( <i>therapy</i> )	indikator dipenuhi oleh 12,51% - 25% dari jumlah total responden	
3	Informasi ( <i>information</i> )	indikator dipenuhi oleh 25,01% - 37,5% dari jumlah total responden	
4	Konsultasi ( <i>consultation</i> )	indikator dipenuhi oleh 37,51% - 50% dari jumlah total responden	
5	Penenteraman ( <i>placation</i> )	indikator dipenuhi oleh 50,01% - 62,5% dari jumlah total responden	
6	Kemitraan ( <i>partnership</i> )	indikator dipenuhi oleh 62,51% - 75% dari jumlah total responden	
7	Delegasi wewenang ( <i>delegated power</i> )	indikator dipenuhi oleh 75,01% - 87,5% dari jumlah total responden	
8	Kontrol Masyarakat ( <i>citizen control</i> )	indikator dipenuhi oleh 87,51% - 100% dari jumlah total responden	

**Tabel 4.21 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Slamparejo Dalam Program Desa Mandiri Pangan**

No	Tingkatan Partisipasi	Kriteria	Eksisting	Derajat Pembagian Wewenang
1	Manipulasi (manipulation)	Tercatat sebagai anggota panitia (masyarakat tidak tahu sama sekali terhadap tujuan, tapi hadir dalam forum)	100 orang tercatat sebagai anggota kelompok afinitas Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Data Sekunder)	
2	Terapi (therapy)	Pendidikan terhadap masyarakat (mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan informasi atau usulan-usulan)	Pendidikan berupa penyuluhan dan pelatihan terhadap masyarakat terutama kelompok afinitas (Survai Wawancara)	Tidak ada partisipasi
3	Informasi (information)	Pemberian informasi hak, tanggungjawab dan pilihan masyarakat tanpa adanya kemungkinan umpan balik	Kegiatan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memberi informasi mengenai program kemandirian pangan desa yang sustainable (Survai Wawancara)	
4	Konsultasi (consultation)	Pendapat masyarakat didengar tetapi tidak ada jaminan dilaksanakan atau ada perubahan.	Konsultasi adanya pengadaan pangan selain beras yang sesuai dengan kondisi dan potensi SDA Desa Slamparejo (Survai Wawancara)	
5	Penenteraman (placation)	Saran diterima tetapi belum tentu ditindaklanjuti sesuai kedudukan dan kemampuan masyarakat yang memberi saran.	Saran masyarakat diterima dan diolah untuk kemudian didiskusikan dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan atas keputusan bersama (Survai Kuisisioner)	Tingkat wewenang dihargai (degrees of tokenism)
6	Kemitraan (partnership)	Timbal balik dirundingkan	Lingkup partisipasi terdapat di Desa Slamparejo karena timbul timbal balik partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program aksi desa mandiri pangan. (Survai Wawancara)	Terdapat kemitraan baik dengan instansi atau perusahaan yang mampu mendukung pengembangan Desa Slamparejo menuju desa mandiri pangan
7	Delegasi wewenang (delegated power)	Masyarakat mengelola sebagian atau seluruh program	Anggota kelompok afinitas mengelola seluruh proaksimapan, dengan mendapat penyuluhan, pelatihan serta pendampingan dari Badan Penyuluh dan Pelaksana Pertanian (Survai Wawancara)	instansi tersebut adalah KAN Jabung yang bekerjasama dengan Nestle.



No	Tingkatan Partisipasi	Kriteria	Eksisting	Derajat Pembagian Wewenang
8	Kontrol Masyarakat (citizen control)	Kendali oleh masyarakat (kewenangan penuh tanpa ada campur tangan pemerintah)	Masyarakat yang mengendalikan kegiatan pengelolaan program desa mandiri pangan. Salah satunya dengan pertemuan rutin yang diselenggarakan masyarakat untuk membahas permasalahan yang menghambat maupun dalam pengambilan keputusan namun masih didampingi dan diawasi oleh pemerintah melalui Tim Pengawas yaitu Tim Pangan Desa dan Lembaga Keuangan Desa. (Survai Wawancara)	

Berdasarkan hasil survai diketahui 100 orang menjadi anggota kelompok afinitas dalam program desa mandiri pangan. Mereka telah mengikuti berbagai program sosialisasi terkait dengan program kemandirian pangan desa. Pelatihan dan penyuluhan terkait penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan usaha ternak sapi, serta kegiatan administrasi telah diikuti masyarakat selama pelaksanaan program. Masyarakat juga mengadakan pertemuan rutin baik antar kelompok maupun dengan pihak pendamping dan pengawas program. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas permasalahan, kendala atau pun peluang dalam pelaksanaan program desa mandiri pangan di Desa Slamparejo ini. Saran dan tanggapan dari masyarakat dalam pertemuan-pertemuan tersebut diolah dan didiskusikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh masyarakat sendiri dengan didampingi oleh fasilitator dan Tim Pangan Desa sebagai pengawas program. Selain itu masyarakat Desa Slamparejo telah bekerja sama dengan KAN Jabung dalam pemasaran produksi susu sapi ke perusahaan susu Nestle.

Berdasarkan identifikasi partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan, masyarakat telah mampu mengelola program sendiri namun program tidak dapat secara penuh diserahkan kepada masyarakat. Pemerintah masih harus mengarahkan dan mendampingi dalam pelaksanaan program melalui pendamping (fasilitator) dan Tim Pangan Desa. Berdasarkan teori Arstein, tingkatan partisipasi masyarakat Desa Slamparejo dalam program desa mandiri pangan adalah *Delegated Power* (Delegasi Wewenang) yaitu Anggota kelompok

afinitas mengelola seluruh proaksimapan dengan mendapat penyuluhan, pelatihan serta pendampingan dari Badan Penyuluh dan Pelaksana Pertanian (BKP3).

#### **4.4 Potensi dan Peluang Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Menuju Desa Mandiri Pangan**

Dalam kajian ini dijelaskan potensi dan permasalahan Desa Slamparejo maupun dalam operasional pelaksanaan program desa mandiri pangan. Potensi dan permasalahan ini akan digunakan sebagai tinjauan dalam melakukan evaluasi peluang desa dalam upaya menuju desa mandiri pangan dan kegiatan apa saja yang seharusnya dilakukan dalam rangka mencapai kemandirian pangan pada upaya selanjutnya, serta strategi dalam pelibatan segenap potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

##### **4.4.1 Analisis Evaluasi Sumber Daya Lahan**

Aspek sumber daya lahan Desa Slamparejo merupakan aspek yang menunjang produksi pangan local dalam upaya kemandirian pangan desa. Oleh karena itu digunakan analisis fisik sumber daya lahan yang meliputi kemampuan lahan dan kesesuaian lahan. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui potensi sumber daya lahan dalam mendukung produksi pertanian pangan menuju diversifikasi produksi pangan guna mencapai kemandirian pangan Desa Slamparejo.

##### **4.4.1.1 Kemampuan Lahan**

Kemampuan lahan merupakan salah satu teknik analisis aspek fisik dan lingkungan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan, sebagai acuan bagi arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2007, terdapat sembilan satuan kemampuan lahan (SKL) yang dijadikan faktor pembatas untuk menentukan kelas kemampuan lahan, yaitu morfologi, kemudahan untuk dikerjakan, kestabilan lereng, kestabilan pondasi, ketersediaan air, drainase, erosi, pembuangan limbah, dan bencana alam.

##### **a. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Morfologi**

Analisis SKL morfologi dilakukan untuk memilah bentuk bentang alam/morfologi pada wilayah atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. Penilaian SKL Morfologi didasarkan pada tingkat kelerengan lahan. Semakin besar tingkat kelerengan lahan (morfologi tinggi), maka nilainya semakin rendah. Sebaliknya,



semakin kecil tingkat kelerengan lahan (morfologi sedang), maka semakin mudah untuk dilakukan pengembangan, dan nilainya semakin besar. Untuk lebih jelas mengenai satuan kemampuan lahan morfologi di wilayah Desa Slamparejo dapat dilihat pada gambar 4.26.

**Tabel 4.22 Nilai SKL Morfologi**

Tingkat Kelerengan	Morfologi	SKL Morfologi	Nilai
>40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Kemampuan lahan dari morfologi tinggi	1
25-40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Kemampuan lahan dari morfologi cukup	2
15-25%	Bukit/perbukitan	Kemampuan lahan dari morfologi sedang	3
2-15%	Datar	Kemampuan lahan dari morfologi kurang	4
0-2%	Datar	Kemampuan lahan dari morfologi rendah	5

#### b. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kemudahan Dikerjakan

Analisis SKL kemudahan dikerjakan dilakukan untuk mengetahui tingkat kemudahan lahan di wilayah/kawasan untuk dapat dimatangkan dalam proses pembangunan/pengembangan wilayah/kawasan. Tingkat kemudahan dikerjakan ditentukan berdasarkan tingkat kekerasan batuan/jenis tanah dan kemudahan untuk dicapai. Jenis tanah di Desa Slamparejo merupakan jenis tanah subur yang baik untuk dilakukan kegiatan pertanian. Selain itu, tingkat kekerasan batuan juga memadai untuk dilakukan pembangunan. Oleh karena itu, tingkat kemudahan lahan ditentukan berdasarkan kemudahan pencapaian, yang didasarkan pada kelerengan. Semakin tinggi kelerengan, maka semakin curam dan sulit untuk dicapai sehingga memiliki nilai yang kecil, begitu pula sebaliknya. Untuk lebih jelas mengenai satuan kemampuan lahan kemudahan dikerjakan di wilayah Desa Slamparejo dapat dilihat pada gambar 4.27.

**Tabel 4.23 Nilai SKL Kemudahan Dikerjakan**

Tingkat Kelerengan	Morfologi	SKL Kemudahan Dikerjakan	Nilai
>40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Kemampuan lahan dari kemudahan dikerjakan rendah	1
25-40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Kemampuan lahan dari kemudahan dikerjakan kurang	2
15-25%	Bukit/perbukitan	Kemampuan lahan dari kemudahan dikerjakan sedang	3
2-15%	Datar	Kemampuan lahan dari kemudahan dikerjakan cukup	4
0-2%	Datar	Kemampuan lahan dari kemudahan dikerjakan tinggi	5

#### c. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Lereng

Analisis SKL kestabilan lereng dilakukan untuk mengetahui tingkat kemantapan lereng di wilayah/kawasan pengembangan dalam menerima beban. Tingkat kestabilan lereng

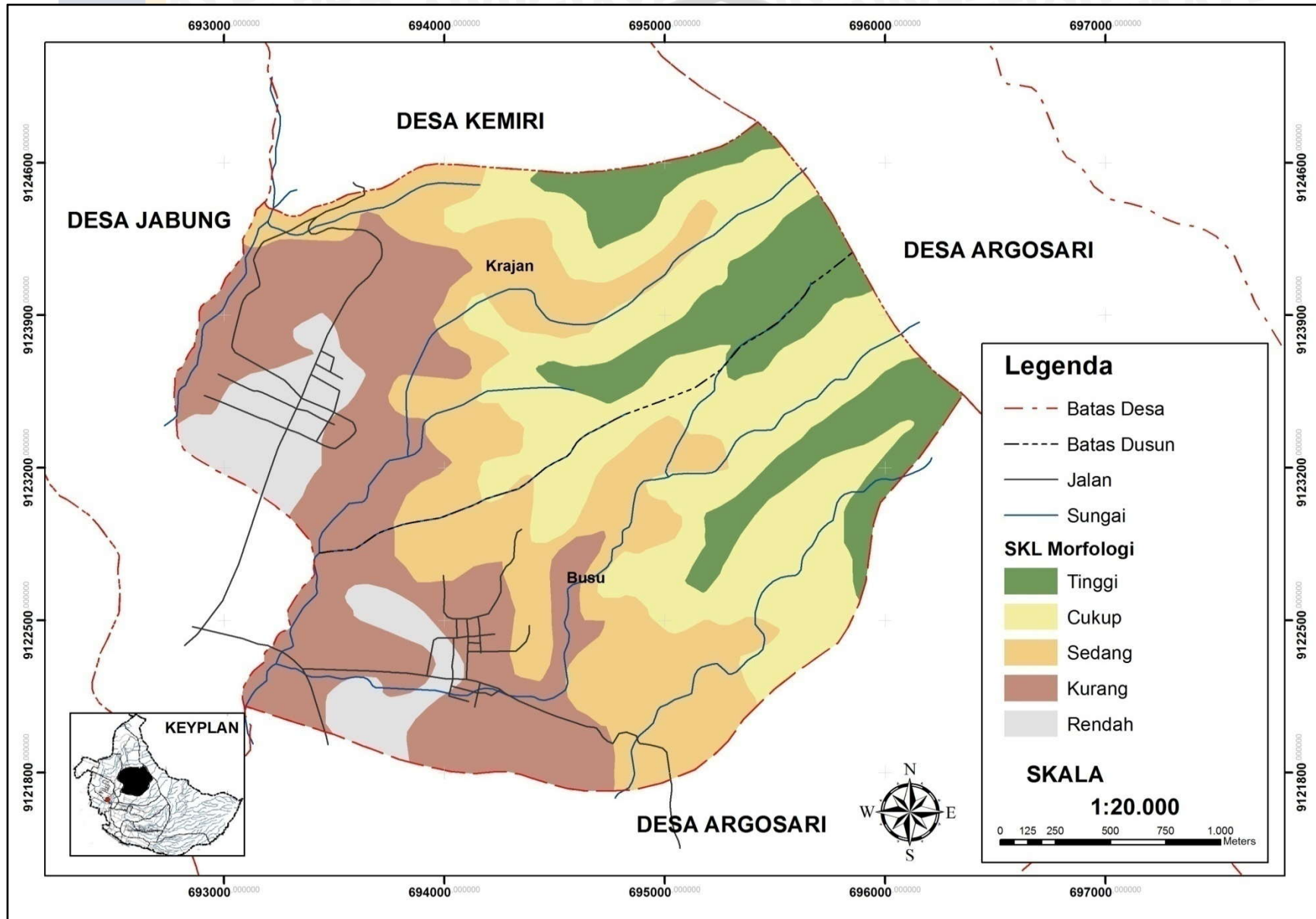


ditentukan berdasarkan kemiringan lereng. Suatu lahan dikatakan memiliki kestabilan lereng rendah berarti lahan tersebut tidak stabil, mudah bergerak, mudah longsor, tidak aman untuk dikembangkan. Untuk lebih jelas mengenai satuan kemampuan lahan kestabilan lereng di wilayah Desa Slamparejo dapat dilihat pada gambar 4.28.

**Tabel 4.24 Nilai SKL Kestabilan Lereng**

Tingkat Kelerengan	Morfologi	SKL Kestabilan Lereng	Nilai
>40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Kestabilan lereng rendah	1
25-40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Kestabilan lereng kurang	2
15-25%	Bukit/perbukitan	Kestabilan lereng sedang	3
2-15%	Datar	Kestabilan lereng cukup	4
0-2%	Datar	Kestabilan lereng tinggi	5

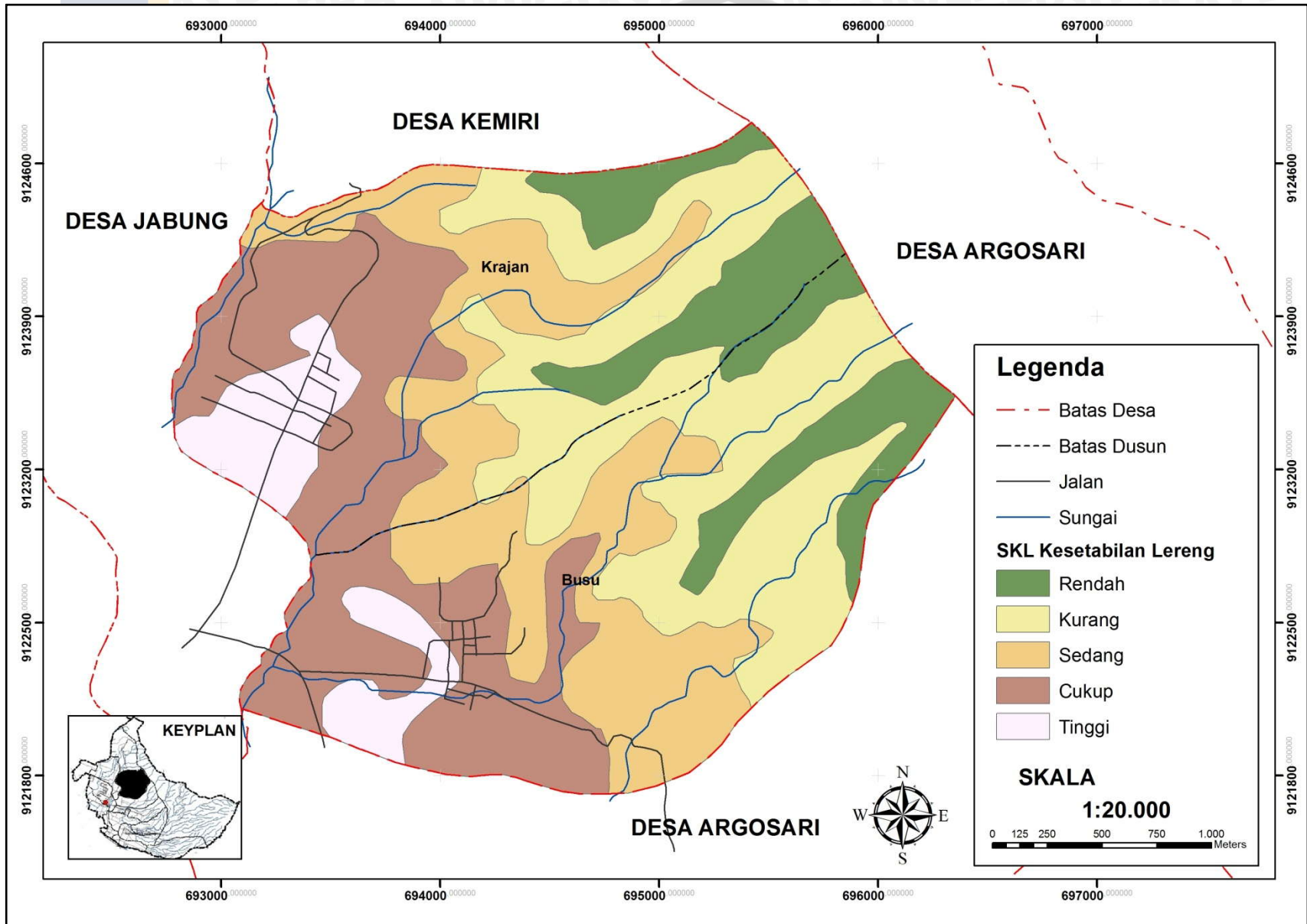




Gambar 4.20 Peta SKL Morfologi







Gambar 4.22 Peta SKL Kestabilan Lereng

#### d. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Kestabilan Pondasi

Tujuan dari dilakukannya analisis SKL Kestabilan Pondasi adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mendukung bangunan berat, serta jenis-jenis pondasi yang sesuai untuk masing-masing tingkatan. Penentuan tingkat kestabilan pondasi dapat dilihat dari tingkat kestabilan lereng. Suatu wilayah dengan tingkat kestabilan lereng rendah sudah pasti memiliki tingkat kestabilan pondasi yang rendah pula, begitu pula sebaliknya. Untuk lebih jelas mengenai satuan kemampuan lahan kestabilan pondasi di wilayah Desa Slamparejo dapat dilihat pada gambar 4.29.

**Tabel 4.25 Nilai SKL Kestabilan Pondasi**

SKL Kestabilan Lereng	SKL Kestabilan Pondasi	Nilai
Kestabilan lereng rendah	Daya dukung dan kestabilan pondasi rendah	1
Kestabilan lereng kurang	Daya dukung dan kestabilan pondasi kurang	2
Kestabilan lereng sedang		3
Kestabilan lereng cukup		4
Kestabilan lereng tinggi	Daya dukung dan kestabilan pondasi tinggi	5

#### e. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Ketersediaan Air

Tujuan dilakukannya analisis SKL ketersediaan air adalah untuk mengetahui tingkat ketersediaan air dan kemampuan penyediaan air dalam rangka pengembangan wilayah/kawasan. Geohidrologi sudah menunjukkan ketersediaan air. Geohidrologi pun sudah terdiri dari kelas-kelas, mulai tinggi, sedang, hingga rendah. Untuk lebih jelas mengenai satuan kemampuan lahan ketersediaan air di wilayah Desa Slamparejo dapat dilihat pada gambar 4.30.

**Tabel 4.26 Nilai SKL Ketersediaan Air**

Tingkat Kelerengan	Morfologi	SKL Ketersediaan Air	Nilai
>40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Ketersediaan air sangat rendah	1
25-40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Ketersediaan air rendah	2
15-25%	Bukit/perbukitan	Ketersediaan air sedang	3
2-15%	Datar		4
0-2%	Datar	Ketersediaan air tinggi	5

#### f. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Drainase

Analisis SKL drainase digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam mematuskan air hujan secara alami, sehingga kemungkinan genangan baik berifat lokal maupun meluas dapat dihindari. Penentuan tingkat kemudahan pematusan berdasarkan pada kondisi morfologi, kemiringan lereng, dan topografi. Selain itu juga perlu dilihat kondisi geologi untuk mengetahui kemampuan batuan menyerap air. Untuk lebih jelas mengenai

satuan kemampuan lahan drainase di wilayah Desa Slamparejo dapat dilihat pada gambar 4.31.

**Tabel 4.27 Nilai SKL Drainase**

Tingkat Kelerengan	Morfologi	Topografi/Ketinggian	SKL Drainase	Nilai
>40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Tinggi	Drainase tinggi	5
25-40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Cukup tinggi		4
15-25%	Bukit/perbukitan	Sedang	Drainase cukup	3
2-15%	Datar	Rendah	Drainase kurang	2
0-2%	Datar	Sangat rendah		1

#### g. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Erosi

Tujuan dilakukannya analisis SKL erosi adalah untuk mengetahui daerah-daerah yang mengalami keterkikisan tanah, sehingga dapat diketahui tingkat ketahanan lahan terhadap erosi serta antisipasi dampaknya pada daerah hilir. Tingkat erosi suatu daerah dapat dilihat dari morfologi dan kelerengannya. daerah dengan kelerengan yang curam (gunung/bukit) memiliki potensi erosi yang lebih besar daripada daerah dengan tingkat kelerengan yang rendah (dataran). Untuk lebih jelas mengenai satuan kemampuan lahan terhadap erosi di wilayah Desa Slamparejo dapat dilihat pada gambar 4.31.

**Tabel 4.28 Nilai SKL Erosi**

Tingkat Kelerengan	Morfologi	SKL Erosi	Nilai
>40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Erosi tinggi	1
25-40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Erosi cukup tinggi	2
15-25%	Bukit/perbukitan	Erosi sedang	3
2-15%	Datar	Erosi sangat rendah	4
0-2%	Datar	Tidak ada erosi	5

#### h. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Pembuangan Limbah

Program desa mandiri pangan menambang jumlah sapi yang ada di Desa Slamparejo. Jumlah sapi yang bertambah akan mengakibatkan limbah ternak ini juga akan bertambah, sehingga perlu juga dianalisis kemampuan lahan dalam hal pembuangan limbah. Analisis SKL pembuangan limbah bertujuan untuk mengetahui daerah-daerah yang mampu untuk ditempati sebagai lokasi penampungan akhir dan pengolahan limbah, baik limbah padat maupun cair. Untuk lebih jelas mengenai satuan kemampuan lahan pembuangan limbah di wilayah Desa Slamparejo dapat dilihat pada gambar 4.32.



**Tabel 4.29 Nilai SKL Pembuangan Limbah**

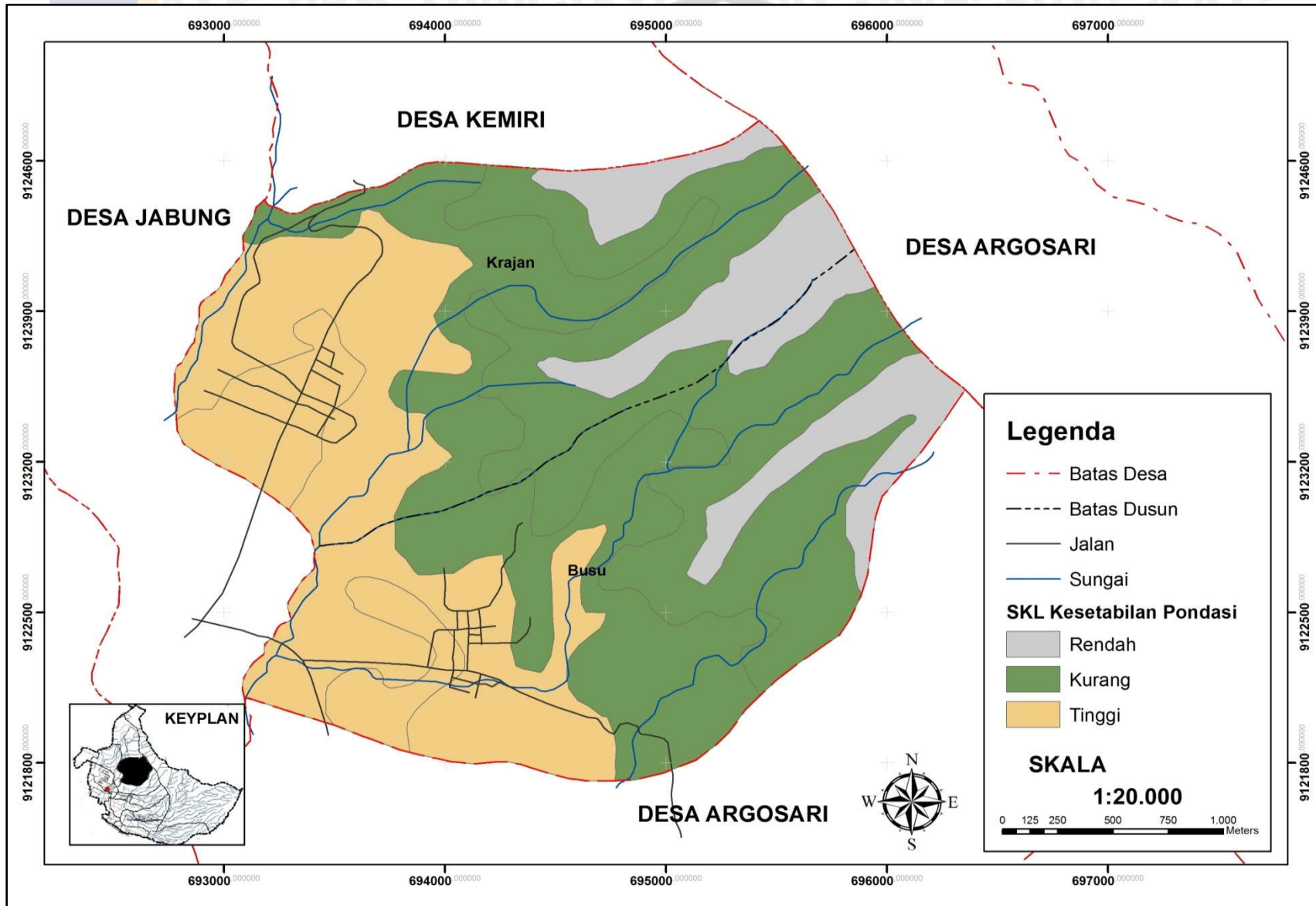
Tingkat Kelerengan	Morfologi	SKL Pembuangan Limbah	Nilai
>40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah kurang	1
25-40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah sedang	2
15-25%	Bukit/perbukitan	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah cukup	3
2-15%	Datar	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah cukup	4
0-2%	Datar	Kemampuan lahan untuk pembuangan limbah cukup	5

#### i. Analisis Satuan Kemampuan Lahan (SKL) Bencana Alam

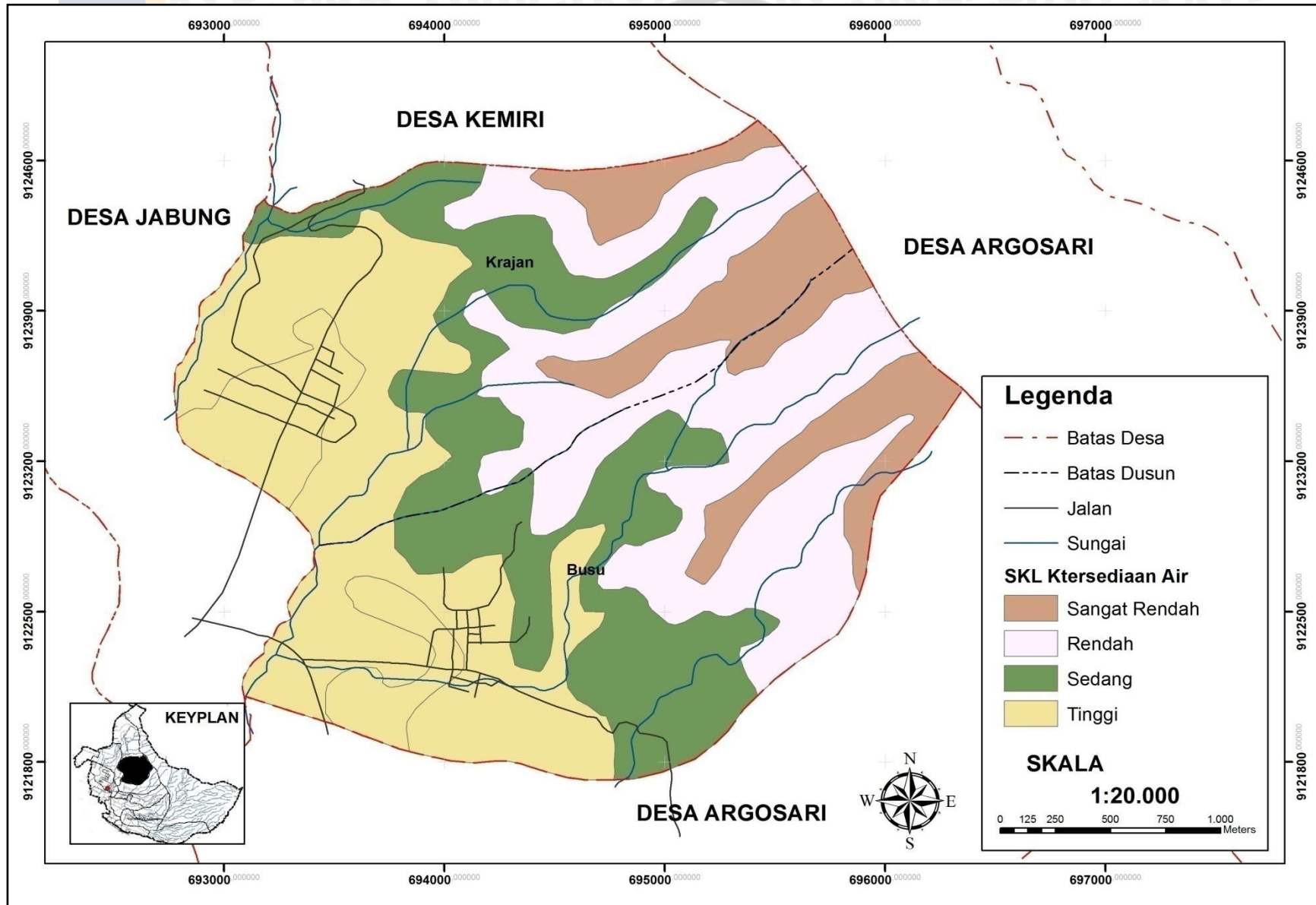
Desa Slamparejo merupakan wilayah dengan morfologi yang kompleks, mulai datar hingga pegunungan dengan lereng yang curam, sehingga ada beberapa daerah yang sering terjadi bencana alam berupa tanah longsor maupun banjir. Dalam pengembangan sumber daya lahan untuk mendukung kemandirian pangan desa, tentu harus dilakukan pada lokasi yang tidak memiliki potensi bencana alam, ataupun memiliki potensi bencana alam yang relatif kecil dan masih bisa diatasi oleh masyarakat sekitar. Analisis SKL bencana alam dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan lahan dalam menerima bencana alam khususnya dari sisi geologi, untuk menghindari/mengurangi kerugian dan korban akibat bencana tersebut. Untuk lebih jelas mengenai satuan kemampuan lahan bencana alam di wilayah Desa Slamparejo dapat dilihat pada gambar 4.33.

**Tabel 4.30 Nilai SKL Bencana Alam**

Tingkat Kelerengan	Morfologi	SKL Bencana Alam	Nilai
>40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Potensi bencana alam tinggi.	1
25-40%	Gunung/pegunungan dan bukit/perbukitan	Potensi bencana alam sedang	2
15-25%	Bukit/perbukitan	Potensi bencana alam rendah	3
2-15%	Datar	Potensi bencana alam rendah	4
0-2%	Datar	Potensi bencana alam rendah	5

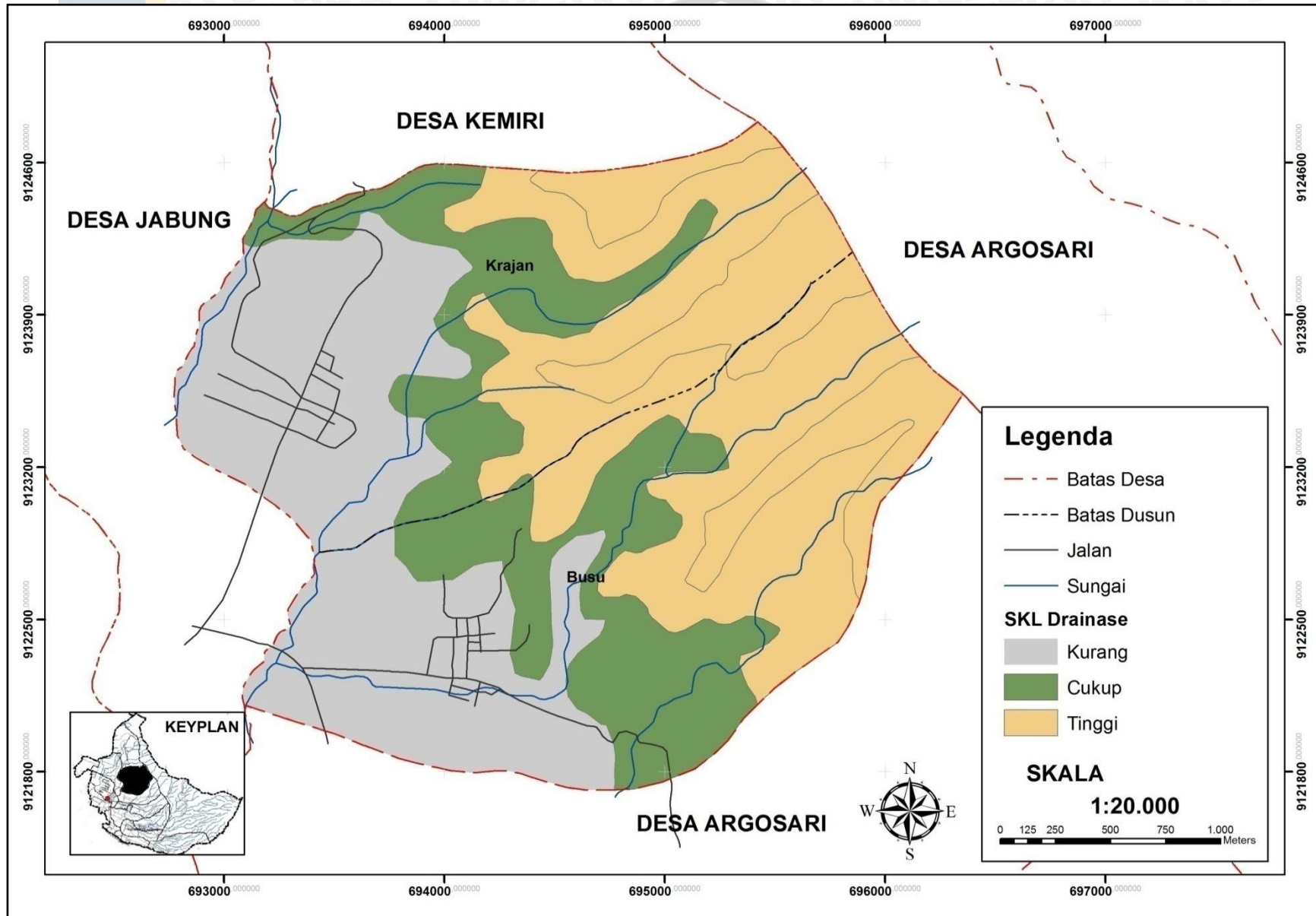


Gambar 4.23 Peta SKL Kestabilan Pondasi

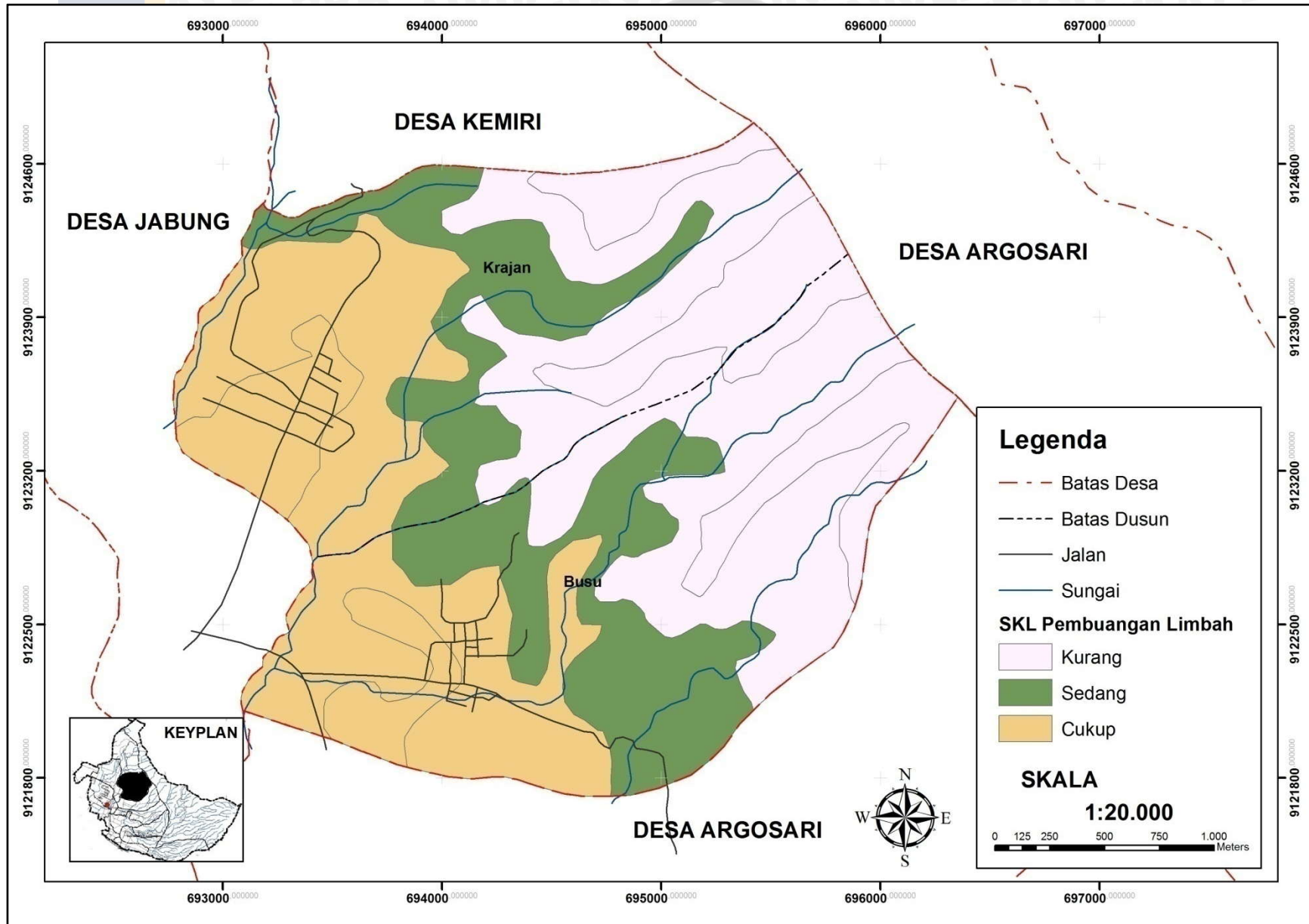


Gambar 4.24 Peta SKL Ketersediaan Air





Gambar 4.25 Peta SKL Drainase



Gambar 4.26 Peta SKL Pembuangan Limbah





Setelah dilakukan analisis pada setiap satuan kemampuan lahan (SKL) dan diperoleh nilai dan peta dari masing-masing SKL. Nilai yang telah diperoleh dikalikan dengan bobot masing-masing SKL. Bobot ini berdasarkan seberapa besar pengaruh setiap SKL pada pengembangan wilayah/kawasan. Sedangkan peta tiap SKL dapat dianalisis menggunakan teknik *overlay* untuk dapat mengidentifikasi kawasan-kawasan yang memiliki kemampuan lahan yang sesuai untuk tanaman pangan dalam mendukung kemandirian pangan desa. Hasil *superimpose* semua SKL Desa Slamparejo dapat dilihat pada Tabel 4.30.

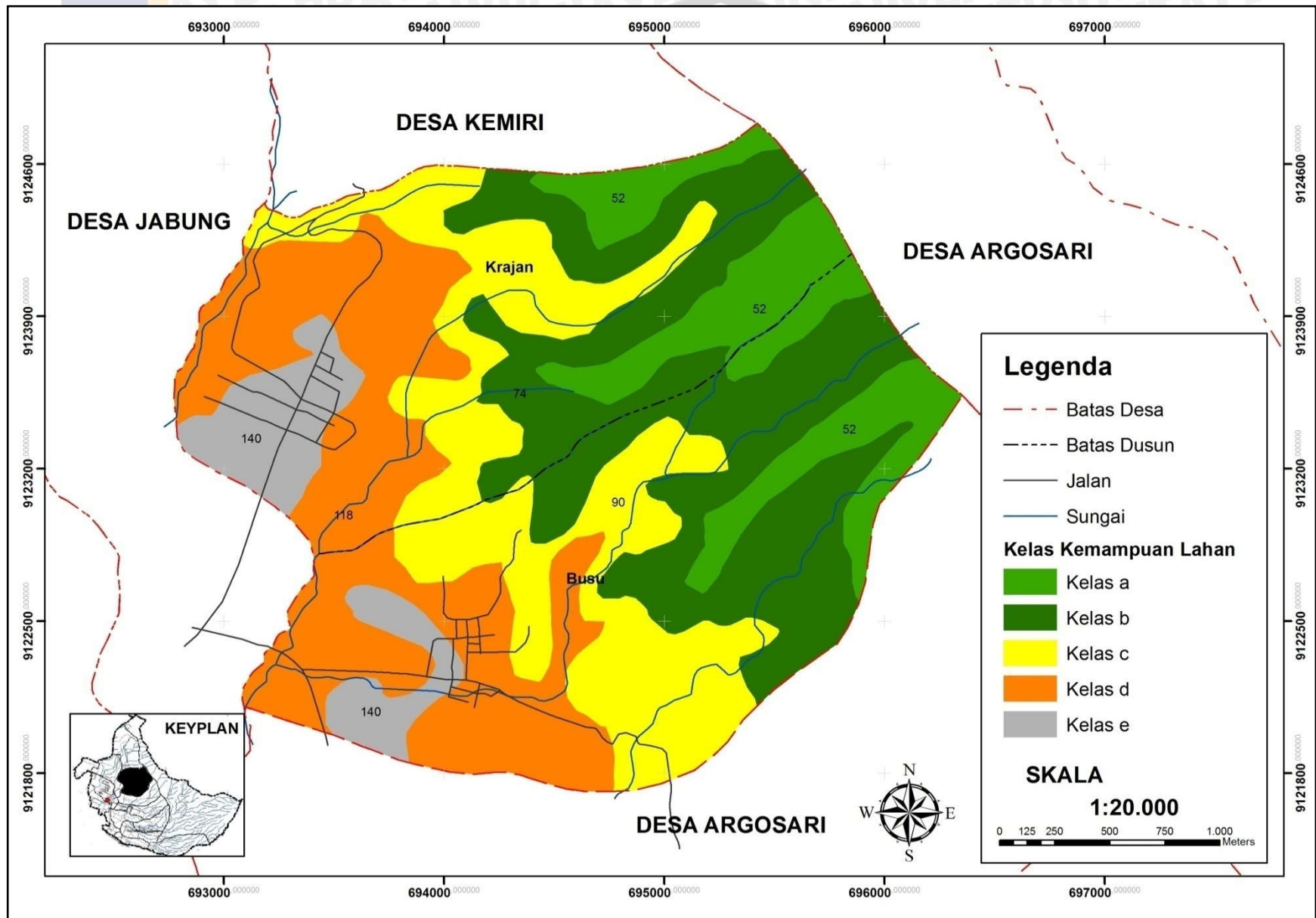
**Tabel 4.31 Nilai Kemampuan Lahan Desa Slamparejo**

Kelerengan	SKL Morfologi	SKL Kemudahan Dikerjakan	SKL Kestabilan Lereng	SKL Kestabilan Pondasi	SKL Ketersediaan Air	SKL Terhadap Erosi	SKL Drainase	SKL Pembuangan Limbah	SKL Bencana Alam	Kemampuan Lahan	
	Bobot: 5	Bobot: 1	Bobot: 5	Bobot: 3	Bobot: 5	Bobot: 3	Bobot: 5	Bobot: 0	Bobot: 5	Total Nilai	
Nilai	0-2%	25	5	25	15	25	15	5	0	25	140
	2-15%	20	4	20	12	20	12	10	0	20	118
	15-25%	15	3	15	9	15	9	15	0	15	96
	25-40%	10	2	10	6	10	6	20	0	10	74
	>40%	5	1	5	3	5	3	25	0	5	52

**Tabel 4.32 Kelas Kemampuan Lahan Desa Slamparejo**

Total Nilai	Kelas Kemampuan Lahan	Klasifikasi Pengembangan	Luas (Ha)
32-58	Kelas a	Kemampuan pengembangan sangat rendah	101.84
59-83	Kelas b	Kemampuan pengembangan rendah	212.06
84-109	Kelas c	Kemampuan pengembangan sedang	186.73
110-134	Kelas d	Kemampuan pengembangan tinggi	58.81
135-160	Kelas e	Kemampuan pengembangan sangat tinggi	201.42

Berdasarkan hasil perhitungan dan *overlay* semua peta SKL, diketahui bahwa wilayah Desa Slamparejo memiliki lahan dengan kelas kemampuan lahan yang kompleks, mulai kelas kemampuan lahan A sampai dengan E. Lahan di wilayah Desa Slamparejo memiliki klasifikasi kemampuan lahan yang hampir rata di tiga kelas kemampuan lahan yaitu B, C & E. Kelas kemampuan lahan yang bervariasi di Desa Slamparejo ini akan memberikan potensi lahan sesuai dengan penggunaan dalam kelas masing-masing untuk mendukung upaya pengembangan desa menuju desa mandiri pangan berbasis sumber daya lokal. Untuk lebih jelas mengenai persebaran dan luasan masing-masing kelas kemampuan lahan di Desa Slamparejo dapat dilihat pada Gambar 4.34.



Gambar 4.28 Peta Kelas Kemampuan Lahan Desa Slamparejo

#### 4.4.1.2 Kesesuaian Lahan

Tahap selanjutnya setelah dilakukan analisis kemampuan lahan adalah analisis kesesuaian lahan. Analisis kesesuaian lahan dilakukan untuk mengetahui lahan yang sesuai untuk pengembangan desa mandiri pangan. Berdasarkan Permen PU No.20/PRT/M/2007, lahan yang sesuai untuk kegiatan pertanian adalah lahan dengan kelas kemampuan C, D, dan E. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.32 dan Gambar 4.35.

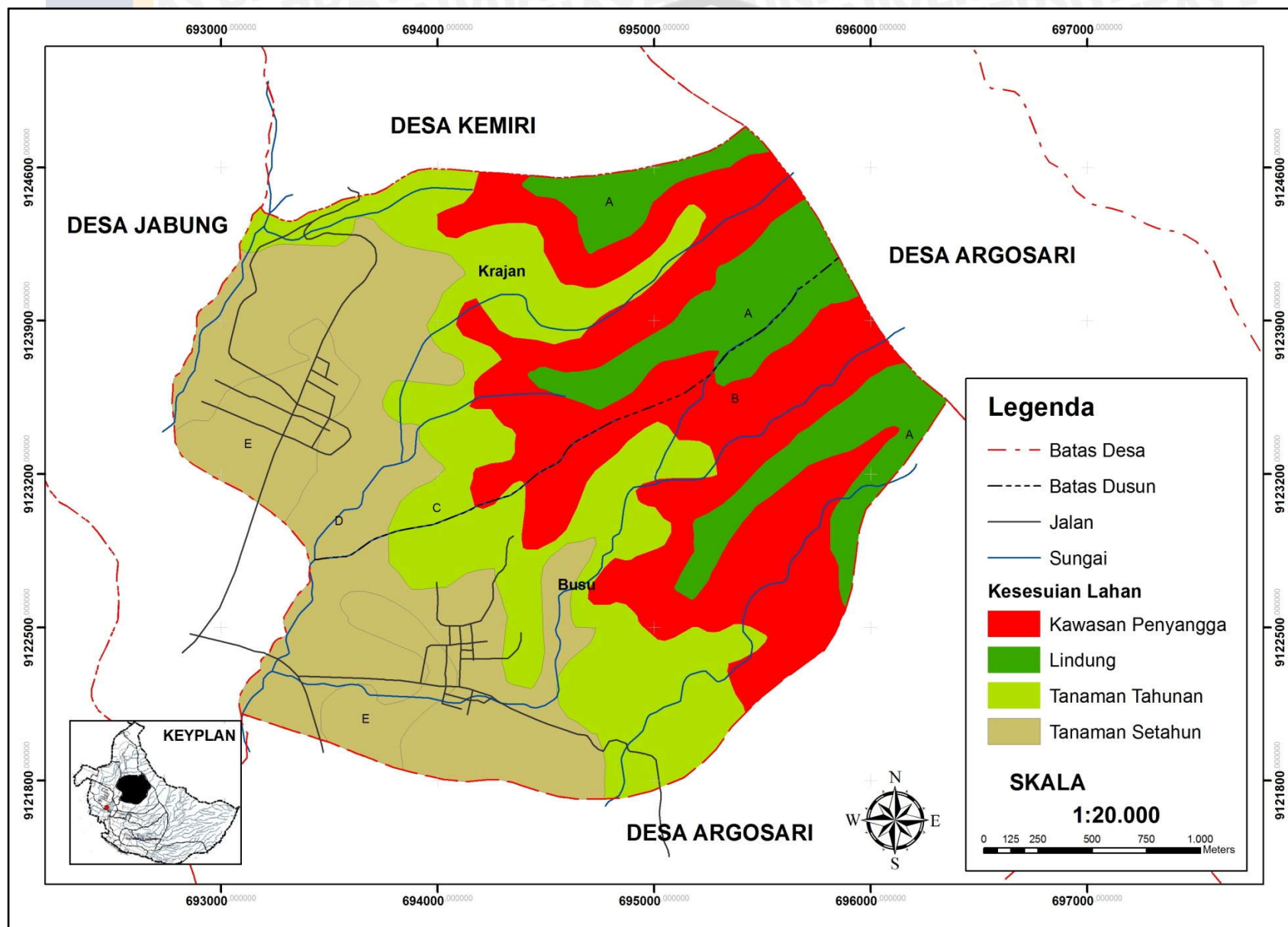
**Tabel 4.33 Kesesuaian Lahan Pertanian**

Kelas	Kemampuan Lahan Kemampuan Pengembangan	Kesesuaian Lahan Pertanian	Luas (Ha)
Kelas A	Kemampuan pengembangan sangat rendah	Lindung	101.84
Kelas B	Kemampuan pengembangan rendah	Kawasan penyangga	212.06
Kelas C	Kemampuan pengembangan sedang	Tanaman tahunan	186.73
Kelas D	Kemampuan pengembangan tinggi	Tanaman setahun	260.23
Kelas E	Kemampuan pengembangan sangat tinggi	Tanaman setahun	

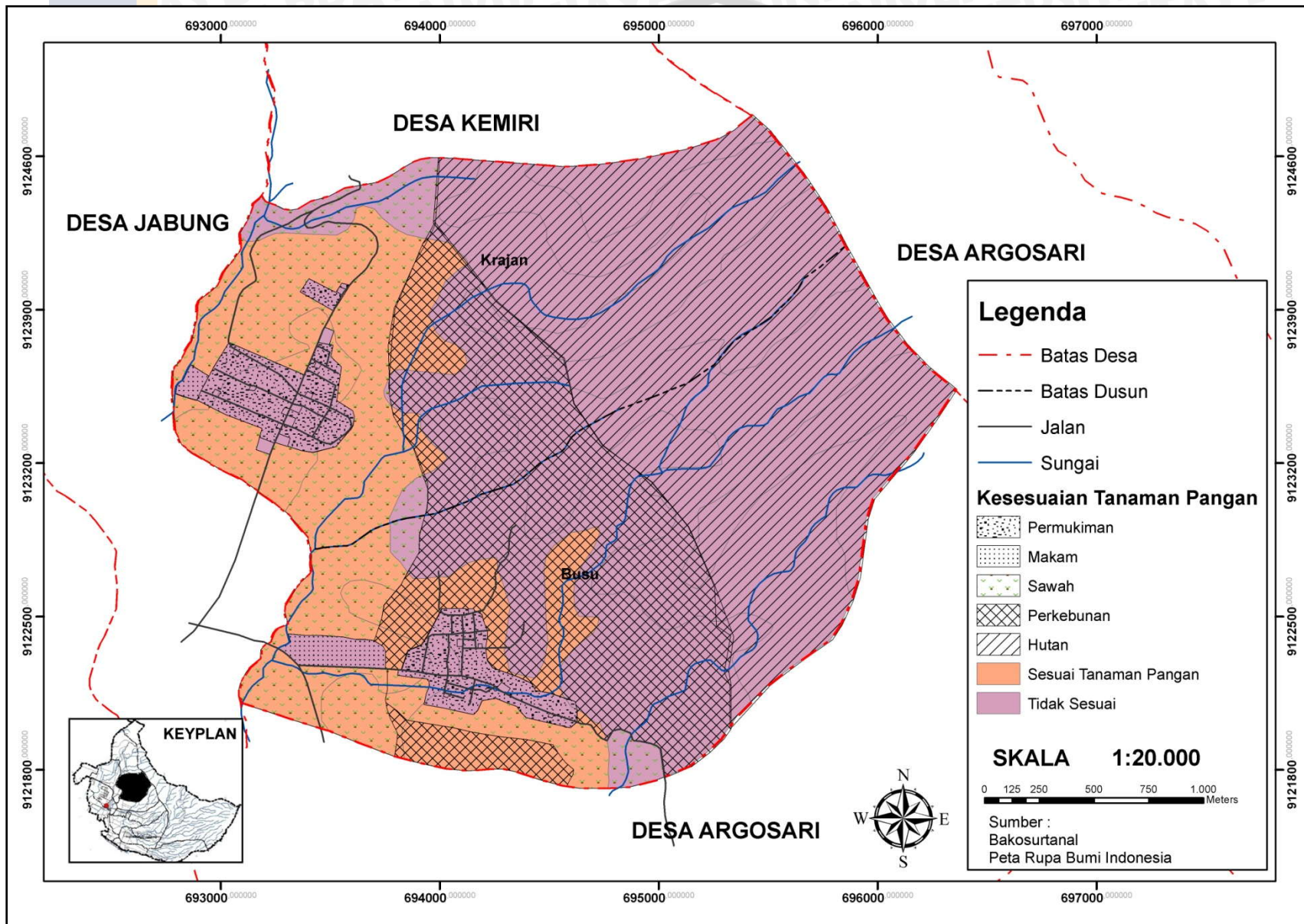
Sumber: Permen PU No.20/PRT/M/2007

Berdasarkan kelas kemampuan lahan untuk kegiatan pertanian di Desa Slamparejo, kelas D dan E sesuai untuk pengembangan tanaman pangan yang merupakan tanaman setahun. Luasan lahan yang sesuai untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian pangan (kelas kemampuan D dan E) adalah 120,74 Ha. Ini merupakan potensi yang dimiliki Desa Slamparejo sebagai area pengembangan penganeekaragaman produksi tanaman pangan yang berbasis sumber daya lokal. Kegiatan penganeekaragaman produksi pangan dapat meningkatkan ketahanan pangan desa, sehingga nantinya Desa Slamparejo dapat keluar dari zona rawan pangan. Berikut adalah gambar persebaran kesesuaian lahan dapat dilihat pada Gambar 4.29 dan gambar kesesuaian lahan pertanian tanaman pangan pada gambar 4.30.





Gambar 4.29 Kesesuaian Lahan Pertanian Desa Slamparejo



Gambar 4.30 Kesesuaian Lahan Pertanian Tanaman Pangan Desa Slamparejo



#### 4.4.2 Evaluasi Program dan Upaya Desa Slamparejo Menuju Desa Mandiri Pangan

Program Aksi Desa Mandiri Pangan merupakan kegiatan strategis dengan maksud untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pengembangan ketahanan pangan nasional dimulai dari wilayah terkecil yaitu desa, dengan melihat keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi pangan rumah tangga dan potensi desa. Rumah tangga sebagai unsur terkecil merupakan titik awal arah pengembangan ketahanan pangan suatu wilayah. Oleh karena itu evaluasi dilakukan terhadap anggota kelompok afinitas yaitu keluarga yang telah tergabung dalam program aksi desa mandiri pangan Desa Slamparejo.

Program aksi desa mandiri pangan Desa Slamparejo pada tahun kedua ini berada pada tahap penumbuhan. Evaluasi program didasarkan atas indikator tahap penumbuhan yang terdapat dalam pedoman program aksi desa mandiri pangan, antara lain:

1. Meningkatnya kinerja kelompok
2. Meningkatnya modal
3. Meningkatnya penganekaragaman produksi pangan
4. Meningkatnya intensifikasi usaha
5. Meningkatnya pemenuhan cadangan pangan
6. sistem distribusi (pemasaran) kolektif.
7. Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan
8. Meningkatnya teknologi pengolahan dan produksi pangan
9. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian terhadap pangan lengkap (3B dan aman)
10. pengembangan sarana dan prasarana prioritas

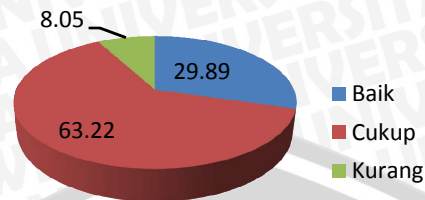
Indikator diatas dipakai dalam mengevaluasi pencapaian tujuan program aksi desa mandiri pangan Desa Slamparejo pada tahap penumbuhan. Berdasarkan hasil survai dengan menggunakan metode kuisisioner dapat diidentifikasi program aksi desa mandiri pangan di Desa Slamparejo. Berikut adalah identifikasi program berdasarkan indikator diatas:

##### a. Kinerja Kelompok

Kelompok afinitas merupakan kelompok yang menjadi sasaran program. Kelompok ini yang nantinya akan dilatih dan didampingi dalam pelaksanaan program desa mandiri pangan. Berdasarkan hasil survai menggunakan metode kuisisioner dengan responden anggota kelompok, sebanyak 63,22 % menjawab bahwa kelompok afinitas telah memiliki kinerja cukup baik. Sedangkan 29,89%



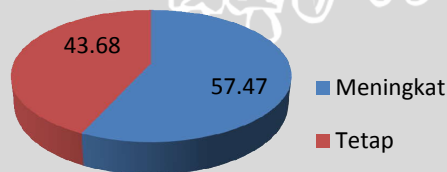
responden mengatakan kinerja kelompok baik dan hanya 8,05% yang mengatakan kinerja masih kurang.



**Gambar 4.31 Kinerja Kelompok**

#### b. Modal

Keuangan dan permodalan dalam program desa mandiri pangan di Desa Slamparejo dikelola oleh Lembaga Keuangan Desa (LKD). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno, modal awal program yang merupakan dana yang langsung dari pemerintah sebesar seratus juta telah dibelikan sapi sebanyak 20 ekor dan dibagikan ke empat kelompok afinitas. Sampai saat ini, modal tersebut belum bertambah. Berdasarkan kesepakatan sapi yang telah dibagi akan dijual jika telah bunting 8 bulan untuk dibelikan lagi sapi sebanyak 2 ekor dan setiap hasil penjualan akan dipotong sebesar sebesar 500 ribu untuk dibayarkan ke LKD sebagai simpanan kelompok. Sampai saat ini sapi yang dipelihara belum siap untuk dijual sehingga modal yang berupa uang masih tetap atau belum meningkat. Namun jika dinilai sesuai harga sapi, modal dapat dikatakan telah meningkat karena sapi yang dipelihara memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan saat pembelian. Hal ini sesuai dengan keterangan dari responden yaitu 57,47% menyatakan modal telah bertambah sedangkan sisanya 43,68% menyatakan modal tetap dan tidak ada yang mengatakan modal berkurang.

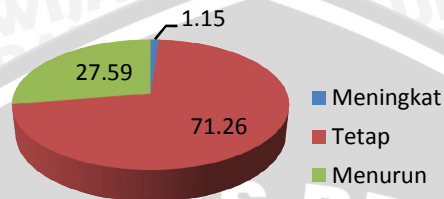


**Gambar 4.32 Modal**

#### c. Penganekaragaman Produksi Pangan

Tanaman pangan yang ditanam di Desa Slamparejo tidak hanya padi. Ada beberapa tanaman lain yang ditanam secara berkala, antara lain ketela pohon dan jagung. Namun karena beberapa kendala seperti musim yang tidak menentu dan hama menyebabkan produksi tanaman pangan selain padi ini kurang begitu optimal

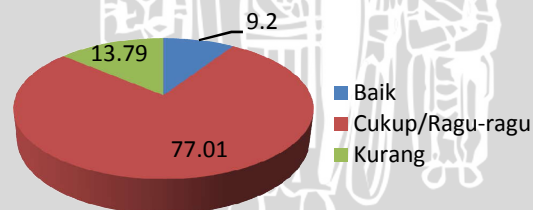
dilakukan. Berdasarkan pernyataan responden hasil wawancara kuisisioner perkembangan usaha penganekaragaman produksi pangan di Desa Slamparejo tergolong tetap, 71,26% responden memberikan informasi seperti ini. Namun ada sekitar 27,59% responden yang mengatakan produksi tanaman pangan selain padi menurun dan hanya 1,15% yang menyatakan meningkat.



**Gambar 4.33**  
Penganekaragaman Produksi Pangan

#### d. Sistem distribusi (pemasaran).

Masyarakat miskin Desa Slamparejo memasarkan hasil pertanian pangannya dengan berbagai cara namun sebagian besar adalah dijemput oleh pembeli/tengkulak. Berdasarkan pedoman desa mandiri pangan masyarakat seharusnya mampu menjual secara kolektif hasil panen pertanian pangannya. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat terutama masyarakat miskin Desa Slamparejo akan system pemasaran yang baik masih kurang. Sebesar 77,01% menilai system pemasaran yang dipakai masih cukup baik, sedangkan 13,79% kurang baik dan yang menilai sudah baik sebanyak 9,2%.



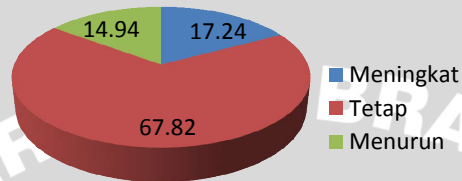
**Gambar 4.34** Sistem Pemasaran

#### e. Pemenuhan Cadangan Pangan

Masyarakat Desa Slamparejo memperoleh bahan pangan pokok sebagian besar berasal dari kebun atau hasil pertanian mereka sendiri. Meskipun lahan bukan milik sendiri namun ada kesepakatan untuk membagi hasil panen antara pemilik lahan dan buruh tani. Kesepakatan yang biasanya dipakai adalah 4:1. Selain dari kebun terkadang warga miskin ini juga memperoleh bahan pangan dengan membeli. Dalam mengusahakan bahan pangan ini, masyarakat miskin di Desa Slamparejo mengalami beberapa kendala, antara lain penghasilan yang kurang dan



gagal panen. Jika hal ini terjadi mereka akan menggunakan bahan makanan cadangan dan apabila sangat terpaksa mereka akan menjual aset yang mereka miliki, seperti hewan ternak, televisi, perabot, atau motor. Hasil kuisioner menunjukkan 67.82% usaha pemenuhan kebutuhan pangan mereka tetap setelah adanya program desa mandiri pangan. Sedangkan 17.24% merasa usaha pemenuhan cadangan pangan keluarganya meningkat setelah adanya program, namun 14.94% masyarakat menilai tidak ada perkembangan bahkan menurun.



**Gambar 4.35 Usaha Pemenuhan Cadangan Pangan**

#### f. Penganekaragaman Konsumsi Pangan

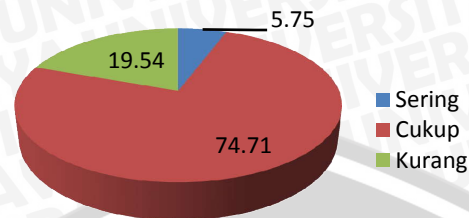
Penganekaragaman pangan tidak sebatas pada jenis pangan yang memberikan sumber energi, tetapi mencakup zat gizi lain sehingga memenuhi kebutuhan akan pangan dan gizi yang seimbang ditinjau dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kelompok pangan utama yang memenuhi kebutuhan pangan dan gizi tersebut antara lain (Hanafie, 285:2010) :

1. Pangan Sumber Karbohidrat dan energy (serelia, umbi-umbian, minyak dan lemak, serta buah/biji berminyak)
2. Pangan sumber protein/lauk-pauk (kacang-kacangan dan pangan hewani)
3. Pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah)
4. Pangan lainnya (aneka minuman dan bumbu)

Pada umumnya pemahaman masyarakat di Desa Slamparejo tentang penganekaragaman konsumsi pangan sebatas mengganti makanan pokok beras dengan bahan pangan lain seperti jagung, ubi, atau sumber karbohidrat lainnya. Masyarakat merasa telah mampu menganekaragamkan pangan dengan sebatas mengganti beras dengan ketela pohon dan jagung. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat mampu mengkonsumsi pangan yang lengkap rata-rata hanya 6-10 hari, intensitas ini dianggap cukup sering oleh masyarakat miskin. Sedangkan berdasarkan survai menggunakan metode kuisioner masyarakat miskin di Desa Slamparejo yang memiliki intensitas cukup sebesar 74,71%, 19,54% memiliki



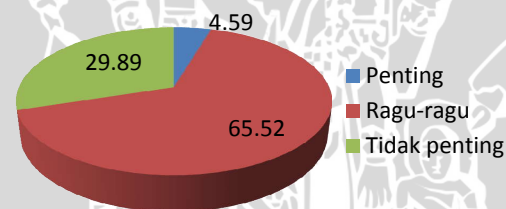
intensitas kurang, dan 5,75% memiliki intensitas sering dalam memenuhi kebutuhan pangan yang beranekaragam.



**Gambar 4.36 Intensitas Penganekaragaman Konsumsi Pangan**

#### g. Kesadaran Dan Kepedulian Terhadap Pangan Lengkap

Pangan yang lengkap tentunya adalah pangan yang beranekaragam yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi. Pandangan masyarakat akan pangan yang beranekaragam masih salah maka dalam hal kesadaran dan kepedulian terhadap pangan yang lengkap pun masih kurang. Hasil kuisisioner menunjukkan masyarakat yang memiliki kesadaran dan kepedulian akan pentingnya pangan yang lengkap hanya 4,59%, sebagian besar masyarakat masih ragu-ragu yaitu 65,52%. Sedangkan masyarakat yang menganggap hal tersebut tidak penting 29,89%.

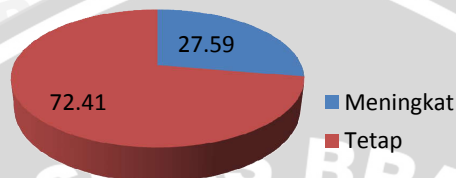


**Gambar 4.37 Penganekaragaman Pangan bergizi dan aman**

#### h. Meningkatnya Intensifikasi Usaha

Matapencaharian utama penduduk Desa Slamparejo sebagian besar pada sector pertanian yaitu sebagai buruh tani. Namun masyarakat tidak hanya menggantungkan hidupnya pada sektor ini saja, selain sebagai buruh tani ada beberapa warga yang berternak meskipun bukan milik sendiri. Ternak itu antara lain sapi dan kambing. Ada perjanjian atau kesepakatan antara pemilik ternak dan warga desa yang merawatnya, sehingga ketika dijual warga desa dapat memperoleh keuntungan sesuai kesepakatan. Sedangkan yang berternak sapi titipan dapat menjual susunya. Selain sebagai peternak, ada juga istri-istri buruh tani ini yang bekerja membuat tusuk makanan dari bambu. Meskipun usaha-usaha ini tidak memberikan keuntungan besar namun warga tetap menjalaninya sebagai tambahan

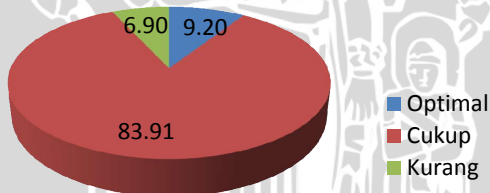
penghasilan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Setelah adanya program desa mandiri pangan, usaha-usaha ini ada yang mengalami perkembangan namun ada juga yang tetap. Hasil wawancara dengan metode kuisioner menunjukkan 72.41% responden menyatakan usahanya tetap belum mengalami perkembangan namun ada juga yang responden yang mengatakan usahanya mengalami peningkatan yaitu 27,59%.



**Gambar 4.38 Intensifikasi Usaha**

#### i. Meningkatkan Teknologi Pengolahan Dan Produksi Pangan

Teknologi pengolahan di Desa Slamparejo masih belum ada. Masyarakat hanya memakai mesin selep padi, itu pun bukan mesin milik warga Slamparejo, yaitu milik Warga Desa Jabung. Teknologi pengolahan pangan ini mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Hasil suve kuisioner menunjukkan 83,91% masyarakat menilai alat ini berfungsi cukup optimal, 9,20% kurang berfungsi, dan 6,90% berfungsi optimal.



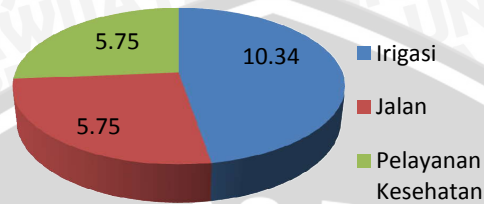
**Gambar 4.39 Teknologi Pengolahan dan Produksi Pangan**

#### j. Pengembangan Sarana Dan Prasarana Prioritas

Sarana dan prasarana berdasarkan pedoman desa mandiri pangan yang terkait dengan kemandirian pangan adalah air bersih, listrik, jalan, irigasi, dan pelayanan kesehatan. Sarana dan prasarana di Desa Slamparejo memiliki kondisi yang berbeda-beda. Hasil survai kuisioner menunjukkan sarana dan prasarana memiliki kondisi rata-rata cukup baik atau sedang seperti ditunjukkan pada tabel 4.34.

**Tabel 4.34 Kondisi Sarana dan Prasarana Hasil Survei Kuisisioner**

Skala/Rating	Air Bersih (%)	Listrik (%)	Jalan (%)	Irigasi (%)	Pelayanan Kesehatan (%)
Buruk/Rusak	0.00	0.00	5.75	<b>10.34</b>	5.75
Cukup baik	86.21	19.54	83.91	87.36	63.22
Baik	13.79	80.46	10.34	2.30	31.03



**Gambar 4.40 Perbaikan Sarana dan Prasarana Prioritas**

Berdasarkan hasil survei tersebut, kondisi sarana dan prasarana yang memiliki kondisi buruk atau rusak adalah jalan, irigasi dan sarana pelayanan kesehatan. Irigasi memiliki kondisi yang paling buruk dibandingkan dengan jalan dan pelayanan kesehatan. Hasil survei ini sesuai dengan rencana pengembangan sarana dan prasarana prioritas dari hasil Musyrenbangdes 2011 dan kondisi eksisting. Rencana pengembangan sarana dan prasarana hasil Musyrenbangdes 2011 dapat dilihat pada tabel 4.35..

**Tabel 4.35 Kesesuaian Perbaikan Sarana Dan Prasarana Prioritas Hasil Survei dengan hasil Musyrenbangdes 2011**

No.	Hasil Survei/Eksisting	Hasil Musyrenbangdes		
		Masalah	Tindakan	Status Kegitana
1.		Jalan menuju Dusun Busu bersebelahan dengan sungai, terjadi longsor tiap musim hujan, semakin menyempit akibat tanah longsor.	Membangun Chek Dam di Dusun Busu (3 Unit)	Lanjutan
2.	<b>Jalan</b>	Jalan penghubung menuju Dusun Busu yang melalui desa jabung rusak disebabkan tidak adanya saluran air permanen sehingga lapisan aspal terkikis oleh air.	- Perbaikan jalan - Pembangunan TPT (Plengsengan jalan)	Lanjutan
3		Kondisi jalan kampung Dusun Busu yang becek saat musim hujan.	Membangun rabat cor / paving stone	Baru

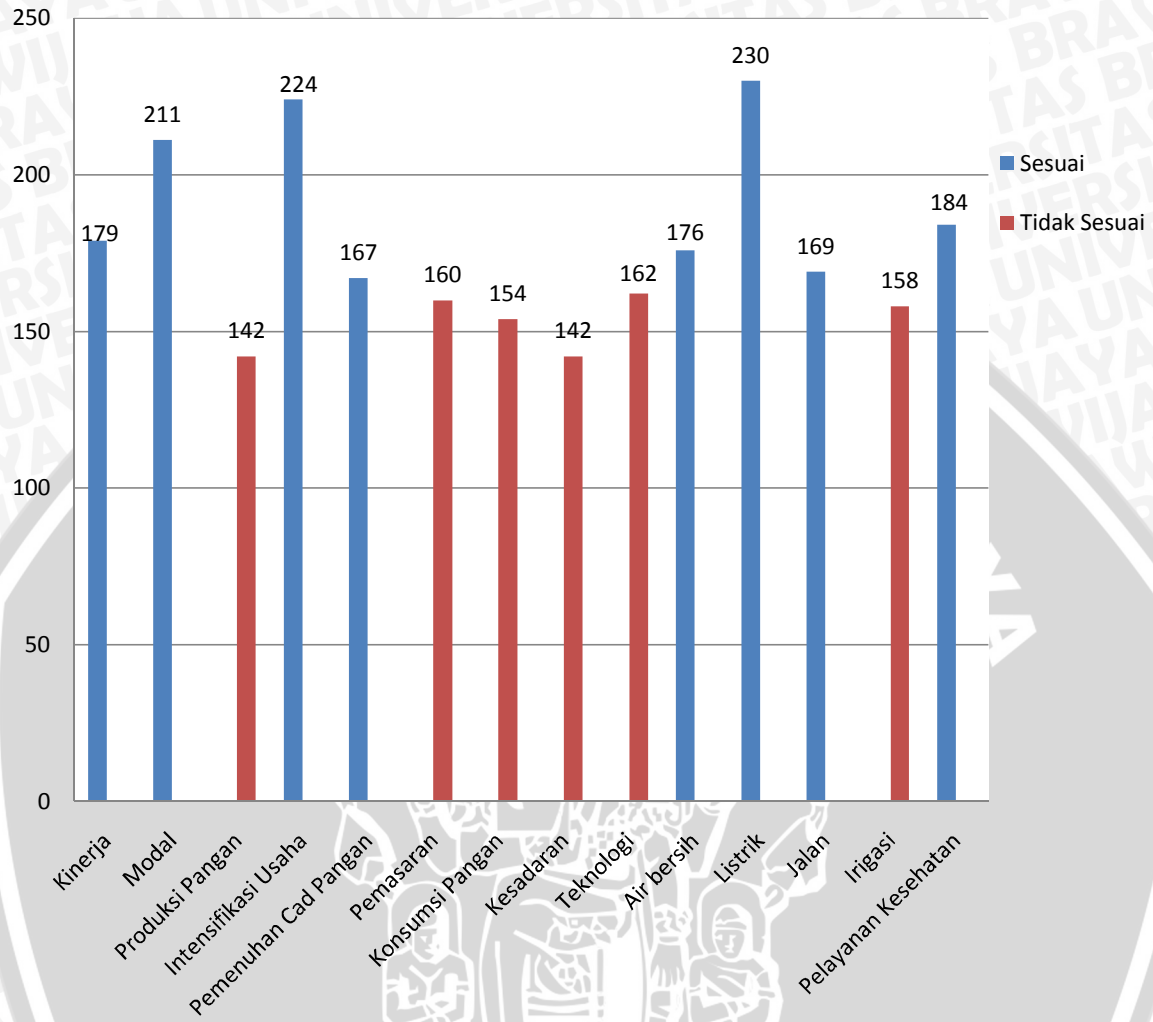


No.	Hasil Survai/Eksisting	Hasil Musyrenbangdes		
		Masalah	Tindakan	Status Kegitana
4		Saluran drainase jalan raya Desa Slamparejo yang belum permanen menyebabkan air meluap saat hujan yang dapat mengakibatkan aspal mudah rusak.	Membangun saluran drainase permanen	Lanjutan
5.	<b>Sarana Kesehatan</b>	Halaman gedung Polindes Dusun Busu becek jika hujan, pelayanan kesehatan kurang optimal.	Pavingisasi halaman polindes	Baru
6	<b>Kesehatan Masyarakat</b>	Kematian Ibu Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bantuan biaya penyuluhan</li> <li>✓ Biaya pemeriksaan ibu hamil gratis</li> <li>✓ Persalinan dan nifas gratis bagi keluarga miskin</li> <li>✓ Bubuk ABT</li> <li>✓ Ambulan desa</li> <li>✓ Pengadaan leaflet</li> <li>✓ PMT</li> </ul>	Baru
7	<b>Irigasi</b>	Saluran irigasi primer dan sekunder rusak berat akibat banjir dan tidak pernah ada perbaikan.	Membangun total saluran irigasi primer	Lanjutan

Sumber : Hasil survai dan Laporan Hasil Musyrenbangdes Slamparejo, 2011

Berdasarkan skala peniaian daftar pertanyaan kuisioner antara 1-3 dengan jumlah sampel 82 KK, maka dengan asumsi nilai dua adalah nilai pembatas variable untuk masing-masing criteria, diketahui beberapa variable yang tidak sesuai. Variabel yang tidak sesuai memiliki nilai dibawah 164 (nilai total pembatas dengan jumlah sampel 82). Variabel yang tidak memenuhi kriteria antara lain ditunjukkan Gambar 4.40.

**Gambar 4.41 Evaluasi Program Desa Mandiri Pangan Berdasarkan Kesesuaian Kriteria Pedoman Proaksimapan**



Berikut evaluasi pencapaian tujuan program desa mandiri pangan Desa Slamparejo ditunjukkan pada tabel 4.36.

**Tabel 4.36 Evaluasi Pencapaian Tujuan Program Desa Mandiri Pangan Desa Slamparejo Kabupaten Malang**

No	Variabel	Kriteria	Evaluasi Pencapaian Program
1	Persiapan Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi sesuai dengan wilayah kerawanan pangan</li> <li>Terdapat data yang dibutuhkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai keputusan Bupati Malang 180/242/KEP/421.013/2010</li> <li>Masuk ke dalam Zona kewaspadaan pangan sesuai data SKPG BKP3 Malang</li> <li>Sesuai Kriteria desa rawan pangan berdasarkan Pedoman Umum Program Desa Mandiri Pangan</li> <li>Terdapat DDRT &amp; SRT dan sudah menjadi data hasil olahan</li> </ul>

No	Variabel	Kriteria	Evaluasi Pencapaian Program
2	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya Pokja Mandiri Pangan</li> <li>• Pertemuan Pokja Mandiri Pangan</li> <li>• Terbentuknya Tim Pangan Desa</li> <li>• Pertemuan Tim Pangan Desa</li> <li>• Terbentuknya Kelompok Afinitas</li> <li>• Kriteria Kelompok Afinitas</li> <li>• Pertemuan Kelompok Afinitas</li> <li>• Meningkatkan kinerja kelompok</li> <li>• Bertambahnya modal usaha kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbentuknya pokja mandiri pangan Desa Slamparejo yang terdiri dari 4 kelompok afinitas, Tim Pangan Desa dan LKD</li> <li>• Pertemuan rutin dilakukan tiap-tiap kelompok di awal bulan sedangkan pertemuan dengan Tim Pengawas (Tim Pangan Desa, LKD dan pendamping) di akhir bulan untuk evaluasi dan monitoring</li> </ul>
3	Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya pendampingan</li> <li>• Terlaksananya pelatihan</li> </ul>	<p>Pendampingan dan pelatihan telah terlaksana sesuai dengan rencana program dan sekarang masih dalam proses operasional program.</p>
4	Sistem ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya diversifikasi produksi pangan</li> <li>• Berkembangnya intensifikasi usaha</li> <li>• Meningkatnya usaha pemenuhan cadangan pangan</li> <li>• Hasil pemasaran kolektif dan terbentuk lembaga pemasaran desa</li> <li>• Meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya local</li> <li>• Kesadaran dan kepedulian terhadap pangan 3B dan aman</li> <li>• Tersedianya teknologi pengolahan dan produk pangan</li> </ul>	<p>Berdasarkan hasil analisis hasil survai kuisioner diketahui beberapa variabel tidak memenuhi kriteria, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diversifikasi produksi pangan</li> <li>• pemasaran (belum kolektif dan tidak ada lembaga pemasaran desa)</li> <li>• penganekaragaman konsumsi pangan</li> <li>• kesadaran dan kepedulian terhadap pangan 3B dan aman</li> <li>• tidak terdapatnya teknologi pengolahan dan produk pangan</li> </ul>
5	Sarana dan Prasarana	Adanya perbaikan sarana dan prasarana prioritas	Perbaikan sarana dan prasarana prioritas telah sesuai dengan hasil Musyrenbangdes yaitu pembangunan irigasi, perbaikan jalan dan sarana pelayanan kesehatan.
6	Partisipasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat mengetahui program dan lokasinya</li> <li>• Masyarakat mengetahui program dan dampaknya</li> <li>• Masyarakat mampu memberikan masukan</li> <li>• Masyarakat mampu berinteraksi dengan pihak lain</li> <li>• Masyarakat mampu mengambil keputusan dalam program</li> </ul>	<p>Berdasarkan hasil analisis diketahui kualitas partisipasi masyarakat adalah aktif dan memiliki tingkatan partisipasi <i>delegated power</i>. Hal ini sesuai dengan kondisi eksisting antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 12,64 % masyarakat mengetahui program dan dampaknya dan 65,52 % hanya sekedar tahu.</li> <li>▪ Daftar hadir pertemuan rutin terakhir menunjukkan masyarakat yang hadir 62 orang dengan komposisi kehadiran perempuan 16,13% dan masyarakat miskin 11,29%</li> <li>▪ Masyarakat terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan secara aktif</li> <li>▪ Ada proses peninjauan pendapat secara bebas (hasil survai kuisioner menunjukkan 47,13%)</li> </ul>



No	Variabel	Kriteria	Evaluasi Pencapaian Program
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat kemitraan baik dengan instansi atau perusahaan yang mampu mendukung pengembangan Desa Slamparejo menuju desa mandiri pangan instansi tersebut adalah KAN Jabung yang bekerjasama dengan Nestle.</li> </ul>

Keberadaan program telah memberikan dampak yang cukup baik terutama dalam hal peningkatan pendapatan keluarga miskin. Hal ini dapat dilihat dari data KK miskin yang terus meningkat dari awal penentuan lokasi di Desa Slamparejo yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2010. Sebelum pelaksanaan program KK miskin mencapai 472 KK dari 1485 KK (32,33%) dan pada tahun 2010 KK miskin ini berkurang menjadi 405 KK dari 1558 KK (25,86%). Masyarakat merasa sangat terbantu dan akan secara aktif mendukung keberhasilan program. Bahkan adanya program lain yang mendukung program telah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Slamparejo meskipun belum secara maksimal, seperti rumah kompos, lumbung desa, pemanfaatan pekarangan rumah, pengolahan bahan pangan non beras.

Berdasarkan Tabel 4.51 diatas terlihat adanya perbedaan antara pedoman program yang dikehendaki dengan kondisi yang ada pada saat ini. Perbedaan ini dianggap wajar karena program sedang dalam proses pelaksanaan. Namun jika di bandingkan dengan kriteria pencapaian tujuan program pada tahap penumbuhan, ada beberapa variabel tidak memenuhi criteria. Hal ini akan memperlambat proses pencapaian Desa Slamparejo menuju desa mandiri pangan. Adanya beberapa potensi yang perlu ditingkatkan dan masalah yang perlu diselesaikan guna memperoleh peluang dalam upaya mencapai kemandirian pangan desa.

#### 4.4.3 Kondisi Ketahanan Pangan Masyarakat

Kondisi ketahanan pangan masyarakat Desa Slamparejo setelah adanya program yang mendukung upaya menuju desa mandiri pangan telah mengalami perkembangan. Berdasarkan hasil survai ketahanan pangan masyarakat mulai meningkat. Kajian untuk mengetahui system ketahanan pangan masyarakat dilakukan melalui survai kuisisioner. Berikut adalah pembahasan mengenai system ketahanan pangan masyarakat Desa Slamparejo setelah adanya program desa mandiri pangan.

Sistem ketahanan pangan dalam pedoman program aksi desa mandiri pangan terdiri atas tiga sub sistem utama yang saling berkaitan, antara lain sub system ketersediaan pangan, sub system distribusi, dan sub system konsumsi pangan. Karakteristik ketahanan

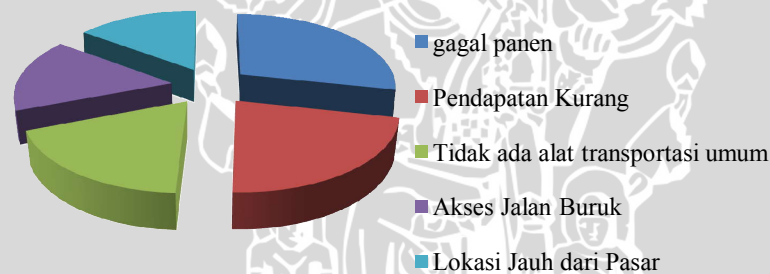
pangan masyarakat berikut akan dibahas dalam masing-masing sub system ketahanan pangan.

#### a. Subsistem Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan masuk dalam sistem pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Pangan dapat diperoleh masyarakat melalui berbagai cara. Masyarakat miskin Desa Slamparejo memperoleh bahan pangan pokok sebagian besar dari hasil kebun dan sawah yang mereka kelola. Berdasarkan kesepakatan dengan pemilik lahan pembagian hasil panen dilakukan dengan perbandingan 4:1, empat untuk pemilik lahan dan 1 untuk petani penggarap.

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat miskin Desa Slamparejo merasa terkadang mengalami kesulitan dalam usaha memperoleh bahan pangan. Hal tersebut disebabkan antara lain gagal panen (28,40 %), kurangnya pendapatan (22,22%), tidak adanya alat transportasi umum (18,52%), akses jalan yang buruk menuju pasar (16,05%) dan lokasi jauh dari pasar (14,81%).

**Gambar 4.42 Kesulitan Dalam Usaha Memperoleh Bahan Pangan**



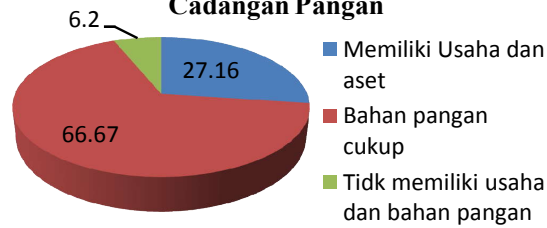
Berdasarkan wawancara dengan masyarakat di kedua dusun di Desa Slamparejo permasalahan aksesibilitas (akses jalan buruk, tidak adanya alat transportasi umum, dan lokasi jauh dari pasar) mayoritas dikeluhkan masyarakat Dusun Busu. Hal ini terkait dengan kondisi prasarana yang jalan buruk menuju Dusun Busu, belum adanya angkutan umum dan struktur ruang Dusun Busu yang terpisah dengan Dusun Krajan sebagai pusat desa dan desa-desa sekitar.

Kesulitan masyarakat dalam memperoleh bahan pangan pokok dapat dihadapi masyarakat dengan melakukan usaha pemenuhan cadangan pangan atau memanfaatkan aset yang dimiliki (uang/barang) untuk membeli bahan makanan. Berdasarkan hasil wawancara 66,67% masyarakat miskin Desa Slamparejo tidak memiliki usaha pemenuhan cadangan pangan namun mereka merasa telah memiliki persediaan bahan makanan yang cukup. Sedangkan 27,16% masyarakat memiliki usaha dalam memenuhi cadangan pangan



atau aset yang dimanfaatkan untuk membeli bahan pangan dan 6,2% masyarakat tidak memiliki usaha maupun aset dalam pemenuhan cadangan pangan.

**Gambar 4.43 Usaha Pemenuhan Cadangan Pangan**



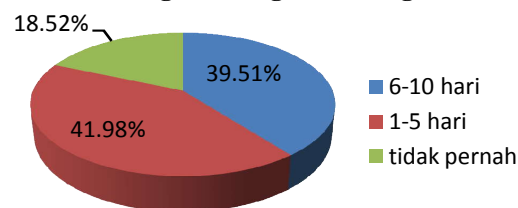
#### b. Subsistem Distribusi Pangan

Ketersediaan pangan juga terkait dengan upaya pendistribusian hasil pertanian tanaman pangan. Selama ini, system yang dipakai masyarakat Desa Slamparejo dalam memasarkan hasil panen tanaman pangan adalah melalui tengkulak. Meskipun sistem pemasaran ini dirasa kurang menguntungkan oleh masyarakat namun tetap dipakai karena keterbatasan SDM dan akses distribusi keluar daerah.

#### c. Subsistem Konsumsi Pangan

Produksi pangan dalam memenuhi ketersediaan pangan mempengaruhi pola konsumsi pangan masyarakat Desa Slamparejo. Pola konsumsi pangan yang beranekaragam akan mendukung pemenuhan gizi yang cukup. Masyarakat Desa Slamparejo belum mampu menyediakan pola pangan yang beranekaragam sesuai kebutuhan gizi. Selain hasil produksi pangan local, kebiasaan dan kesadaran masyarakat belum mendukung pola penganeekaragaman konsumsi pangan. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Slamparejo memiliki intensitas pemenuhan kebutuhan penganeekaragaman pangan yang berbeda-beda antara lain 41,98% 1-5 hari, 39,51% 6-10 hari dan 18,52% tidak pernah mengkonsumsi pangan yang beranekaragam. Namun karena tingkat pengetahuan mereka tentang pola konsumsi penganeekaragaman yang rendah, mereka makan dengan lauk dari pangan hewani tanpa ada susu dan buah sudah merasa mengkonsumsi pangan yang beranekaragam.

**Gambar 4.44 Intensitas Konsumsi Penganeekaragaman Pangan**





#### 4.4.4 Analisis Potensi dan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi karakteristik Desa Slamparejo terkait upaya menuju desa mandiri pangan, tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya tersebut, serta evaluasi upaya menuju desa mandiri pangan dilakukan analisis potensi masalah untuk mengetahui permasalahan yang menghambat dan potensi yang dapat dikembangkan dalam upaya mencari peluang untuk mendukung keberhasilan Desa Slamparejo menuju desa mandiri pangan. Potensi dan peluang serta masalah ini dibagi menjadi :

##### 1. Kondisi fisik dan non-fisik Desa Slamparejo

###### a. Akses Fisik

Kondisi struktur tata ruang menunjukkan bahwa Dusun Krajan merupakan pusat desa, sedangkan Dusun Busu sebagai sub pusat terpisah 3 km dengan pusat desa maupun dengan sub pusat kegiatan lainnya. Akses yang dilalui menuju Dusun Busu sulit disebabkan kondisi jalan yang rusak, selain itu penerangan jalan belum ada. Akibatnya rawan terjadi tindak kejahatan dan kriminalitas. Kondisi jalan yang rusak ini mengakibatkan aksesibilitas dari dan ke Dusun Busu sulit. Akibatnya menyulitkan masyarakat dalam memperoleh atau mendistribusikan bahan pangan.

Sedangkan irigasi yang dimiliki Desa Slamparejo dalam kondisi rusak berat dan selama ini tidak pernah mendapat perbaikan. Kondisi fisik jalan yang rusak dapat menyebabkan rendahnya akses masyarakat Dusun Busu dalam memperoleh bahan pangan.

###### b. SDM

Berdasarkan hasil survai, pada tahun 2009 jumlah keluarga miskin mencapai 32,33 %. Setelah adanya program desa mandiri pangan pada tahun 2010 terjadi penurunan yaitu menjadi 25 %. Selain karena 35,45% dari jumlah penduduk usia kerja adalah pengangguran, 47,97 % masyarakat Desa Slamparejo bekerja sebagai buruh. Kondisi masyarakat seperti ini wajar dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. 78,30% masyarakat hanya tamat SD yang menyebabkan daya beli masyarakat rendah sehingga sulit mengakses pangan.

Selain hal diatas, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi panganekaragam pangan masih rendah. Pada umumnya pemahaman masyarakat di Desa Slamparejo tentang panganekaragaman konsumsi pangan sebatas mengganti makanan pokok beras dengan bahan

pangan lain seperti jagung, ubi, atau sumber karbohidrat lainnya. Masyarakat merasa telah mampu menganeekaragaman pangan dengan sebatas mengganti beras dengan ketela pohon dan jagung. SDM yang rendah dan pengetahuan yang kurang tentang pola keragaman makanan yang sehat dapat menjadi penyebab rendahnya tingkat kesehatan masyarakat (Hanafie, 2010).

Kurangnya penganekaragaman konsumsi pangan ini juga dipengaruhi oleh ketersediaan pangan local yang masih belum beranekaragam. Diversifikasi produksi pangan Desa Slamparejo hanya Padi, jagung, ubi kayu, kelapa, kacang tanah. Bila digolongkan sesuai golongan pangan dalam PPH belum cukup dalam ketersediaan penganekaragaman pangan yang berbasis sumber daya lokal, sedangkan sayur-sayuran tidak diproduksi disana.

c. Sumber Daya Lahan

Berdasarkan kelas kemampuan lahan untuk kegiatan pertanian di Desa Slamparejo, kelas D dan E sesuai untuk pengembangan tanaman pangan yang merupakan tanaman setahun dengan luasan adalah 120,74 Ha. Ini merupakan potensi yang dimiliki Desa Slamparejo sebagai area pengembangan penganekaragaman produksi tanaman pangan yang berbasis sumber daya lokal. Kegiatan penganekaragaman produksi pangan dapat meningkatkan ketahanan pangan desa, sehingga nantinya Desa Slamparejo dapat keluar dari zona rawan pangan. Sumber daya lahan ini semestinya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Desa Slamparejo untuk mendukung kemandirian pangan desa berbasis sumber daya pangan lokal.

d. Sumber Pangan Lokal

Hasil pertanian pangan Desa Slamparejo antara lain : Padi, jagung, ubi kayu, kelapa, kacang tanah. Hasil pertanian pangan lokal Desa Slamparejo dibandingkan dengan kebutuhan minimal per kapita per hari dalam skor PPH cukup memenuhi, antara lain:

- Padi-padian 369,38 Gr/kap/hr (standard PPH 300 Gr/kap/hr)
- Umbi-umbian 105,7 Gr/kap/hr (standard PPH 100 Gr/kap/hr)
- Biji/buah berminyak 22,6 Gr/kap/hr (standard PPH 10 Gr/kap/hr)

Berdasarkan hasil perbandingan dengan standard PPH diketahui potensi sumber pangan lokal Desa Slamparejo masih belum memenuhi ketersediaan pangan secara mandiri yang berbasis sumber daya lokal. Hal ini disebabkan



kurangnya penganeekaragaman produksi pangan, yaitu untuk jenis tanaman buah dan sayur. Hasil produksi masih rendah dibandingkan standard PPH, sehingga tidak memenuhi kebutuhan keseluruhan masyarakat Desa Slamparejo. Hasil produksi pangan yang kurang beranekaragam ini menyebabkan rendahnya pola konsumsi penganeekaragaman pangan.

e. Pemasaran

Masyarakat Desa Slamparejo memasarkan hasil pertanian pangannya dengan berbagai cara namun sebagian besar adalah dijemput oleh pembeli/tengkulak. Berdasarkan pedoman desa mandiri pangan masyarakat seharusnya mampu menjual secara kolektif hasil panen pertanian pangannya. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat terutama masyarakat miskin Desa Slamparejo akan system pemasaran yang baik masih kurang.

f. Teknologi

Teknologi pengolahan di Desa Slamparejo masih belum ada. Masyarakat hanya memakai mesin selep padi, itu pun bukan mesin milik warga Slamparejo, yaitu milik warga Desa Jabung. Belum adanya teknologi pengolahan ini akan menghambat keberhasilan program.

2. Partisipasi Masyarakat

Tingkatan partisipasi masyarakat Desa Slamparejo dalam program desa mandiri pangan adalah *Delegated Power* (Delegasi Wewenang) yaitu Masyarakat secara aktif telah mampu mengelola program sendiri namun program tidak secara penuh diserahkan kepada masyarakat, pemerintah masih harus mengarahkan dan mendampingi. Selain itu, masyarakat Desa Slamparejo telah bekerja sama dengan KAN Jabung dalam pemasaran produksi susu sapi ke perusahaan susu Nestle

Berikut analisis potensi dan masalah program desa mandiri pangan Desa Slamparejo pada tabel 4.37.

**Tabel 4.37 Analisis Potensi Dan Masalah dalam Upaya Desa Slamparejo Menuju Desa Mandiri Pangan**

Variabel	Masalah	Potensi
SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 32,33 % merupakan KK miskin</li> <li>• 35,45% dari jumlah penduduk usia kerja adalah pengangguran.</li> <li>• 47,97 % bekerja sebagai buruh</li> <li>• 78,30% masyarakat hanya tamat SD.</li> <li>• SDM yang rendah dan pengetahuan yang kurang tentang</li> </ul>	Ada beberapa penduduk yang mampu mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi yaitu 1,38% dari jumlah penduduk total.



Variabel	Masalah	Potensi
Tingkat Kesejahteraan	<p>pola keragaman makanan yang sehat dapat menjadi penyebab rendahnya tingkat kesehatan masyarakat (Hanafie, 2010). Rata-rata penduduk desa slamparejo memiliki pendapatan 25.000 rupiah per hari. Kondisi ini dirasa kurang cukup oleh penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat pendapatan yang rendah juga menyebabkan kurangnya kesadaran dan kemampuan memenuhi penganekaragaman konsumsi pangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat kesejahteraan keluarga masyarakat Desa Slamparejo naik dari tahun 2009-2010</li> <li>• Jumlah keluarga prasejahtera mengalami penurunan 1,53 % dari tahun 2009-2010</li> </ul>
Tingkat Kesehatan Masyarakat	-	<p>Pada tahun 2009 masih terdapat bayi lahir mati sebanyak 3 anak. Sedangkan kondisi ini tidak terjadi lagi di tahun 2010 semua bayi lahir selamat begitu juga ibunya.</p> <p>a. Hasil pertanian pangan lokal Desa Slamparejo dibandingkan dengan kebutuhan minimal per kapita per hari dalam PPH cukup memenuhi skor, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padi-padian 369,38 Gr/kap/hr (standard 300 Gr/kap/hr)</li> <li>• Umbi-umbian 105,7 Gr/kap/hr (standard 100 Gr/kap/hr)</li> <li>• Biji/buah berminyak 22,6 Gr/kap/hr (standard 10 Gr/kap/hr)</li> </ul> <p>b. Berdasarkan analisis kesesuaian lahan Desa Slamparejo memiliki area kesesuaian lahan untuk tanaman pangan yang cukup luas yaitu 120,74 Ha. Hal ini dapat dikembangkan dalam penyediaan pangan berbasis sumber daya local.</p>
SDA	<p>Hasil pertanian pangan Desa Slamparejo antara lain: Padi, jagung, ubi kayu, kelapa, kacang tanah. Bila digolongkan sesuai golongan pangan dalam PPH belum cukup dalam ketersediaan penganekaragaman pangan yang berbasis sumber daya lokal. Hal ini disebabkan Desa Slamparejo tidak menghasilkan tanaman sayuran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah produksi tanaman pangan</li> <li>• Sumber Daya Lahan</li> </ul>
Aksesibilitas	<p>Dusun Busu struktur tata ruangnya terpisah secara fisik dengan dusun Krajan dan desa-desa lainnya. Akses jalan menuju Dusun Busu mengalami kondisi rusak dan rawan terjadi kriminalitas.</p>	-
Sarana dan Prasarana	<p>Sarana dan Prasarana yang perlu di perbaiki sesuai dengan hasil survai antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jalan dan penerangan, terutama yang menuju Dusun Busu</li> <li>• Irigasi, kondisi irigasi rusak dan tidak pernah mendapat perbaikan</li> </ul>	<p>Desa Slamparejo memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap meski ada beberapa sarana dan prasarana yang rusak.</p>
Kelembagaan	-	<p>Adanya koordinasi yang baik antar stakeholder dalam mendukung kemandirian pangan Desa Slamparejo, terbukti dengan adanya program-program lain yang mendukung program desa mandiri</p>



Variabel	Masalah	Potensi
Partisipasi Masyarakat Dalam Program	-	<p>pangan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah Kompos</li> <li>• Lumbung Pangan Desa</li> <li>• Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)</li> <li>• Biogas</li> <li>• PNPM</li> </ul> <p>Berdasarkan identifikasi partisipasi masyarakat dalam program desa mandiri pangan, masyarakat secara aktif telah mampu mengelola program sendiri namun pemerintah masih harus mengarahkan dan mendampingi dalam pelaksanaan program melalui pendamping (fasilitator) dan Tim Pangan Desa. Berdasarkan tingkatan Partisipasi Arstein Partisipasi masyarakat Desa Slamparejo berada pada tingkatan <i>Delegated Power</i>.</p>

#### 4.4.5 Strategi Peningkatan Potensi dan Peluang Desa Slamparejo Menuju Menjadi Desa Mandiri Pangan

Strategi untuk Desa Slamparejo dalam upaya menuju Desa Mandiri pangan diketahui melalui evaluasi potensi dan peluang yang dilakukan dengan membandingkan hasil analisis kondisi sumber daya lokal desa, partisipasi masyarakat, maupaun program-program yang mendukung kemandirian pangan Desa Slamparejo Kabupaten Malang.

Berdasarkan hasil evaluasi program serta analisis potensi dan masalah diketahui potensi dan peluang yang dimiliki Desa Slamparejo dalam mendukung kemandirian pangan desa adalah sebagai berikut:

- Hasil pertanian tanaman pangan dan sumber daya lahan berpotensi untuk dikembangkan dalam mendukung produksi penganekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal.
- Program telah berjalan dengan partisipasi aktif masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat yaitu *Delegated Power*.
- Adanya koordinasi yang baik antar stakeholder dalam mendukung kemandirian pangan Desa Slamparejo, terbukti dengan adanya program-program lain yang mendukung program desa mandiri
- Perbaikan sarana dan prasarana prioritas telah sesuai dengan hasil Musyrenbangdes yaitu pembangunan irigasi, perbaikan jalan dan sarana pelayanan kesehatan.



Selain potensi sumber daya lokal yang berupa produksi tanaman pangan yang cukup memenuhi kebutuhan bahan pangan penduduk dan penggunaan lahan cukup luas yang sesuai dengan kemampuannya, juga terdapat potensi keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan program. Jika didasarkan pada tangga partisipasi Arstein, partisipasi masyarakat Desa Slamparejo ada pada tingkatan *Delegated Power* yaitu masyarakat secara aktif telah mampu mengelola program sendiri namun pemerintah masih harus mengarahkan dan mendampingi dalam pelaksanaan program melalui pendamping (fasilitator) dan Tim Pangan Desa.

Berdasarkan analisis potensi dan masalah yang dimiliki Desa Slamparejo dapat dilakukan identifikasi komponen-komponen dalam analisis SWOT. Identifikasi komponen merupakan hasil analisis kondisi sumber daya lokal desa, partisipasi masyarakat, maupun program-program yang mendukung kemandirian pangan Desa Slamparejo Kabupaten Malang. Berikut identifikasi komponen-komponen TOWS klasik Desa Slamparejo guna mengetahui alternative pemecahan masalah dalam upaya menuju desa mandiri pangan ditunjukkan pada tabel 4.38.

**Tabel 438 Identifikasi Komponen-Komponen TOWS Klasik**

Aspek	Potensi	Masalah	Peluang	Ancaman
Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil pertanian tanaman pangan lokal sesuai standard PPH</li> <li>Desa Slamparejo memiliki area kesesuaian lahan untuk tanaman pangan cukup luas yaitu 120,74 Ha</li> <li>Ada beberapa penduduk yang mampu mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi yaitu 1,38% dari jumlah penduduk total</li> </ul>	Produksi pertanian belum mampu mendukung penganekaragaman konsumsi pangan lokal	Sumber daya lahan untuk tanaman pangan	
SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Partisipasi masyarakat Desa Slamparejo berada pada tingkatan <i>Delegated Power</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat pendapatan yang rendah</li> <li>SDM rendah dan pengetahuan yang kurang tentang pola keragaman makanan yang sehat.</li> </ul>	Partisipasi masyarakat Desa Slamparejo	
Kelembagaan	masyarakat Desa Slamparejo telah bekerja sama dengan KAN	Pemasaran (belum kolektif dan tidak ada lembaga pemasaran desa	Koordinasi yang baik antar stakeholder	



Aspek	Potensi	Masalah	Peluang	Ancaman
	Jabung dalam pemasaran produksi susu sapi			Aksesibilitas yang sulit dirasakan oleh masyarakat Dusun Busu dikarenakan Dusun Busu struktur tata ruangnya terpisah secara fisik dengan dusun Krajan dan desa lainnya, sedangkan satu-satunya jalan menuju Dusun Busu mengalami kondisi rusak.
Aksesibilitas	Kondisi jalan baik selain yang menuju ke Dusun Busu.	Jalan menuju Dusun Busu kondisinya rusak serta rawan terjadi kriminalitas	Perbaikan sarana dan prasarana prioritas telah sesuai dengan hasil Musyrenbangdes	
Sarana & Prasarana	Desa Slamparejo memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap meski ada beberapa sarana dan prasarana yang rusak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan menuju Dusun Busu kondisinya rusak</li> <li>Irigasi rusak dan tidak pernah mendapat perbaikan</li> </ul>		

Berdasarkan hasil identifikasi komponen-komponen TOWS pada tabel diatas diketahui beberapa strategi untuk peningkatan potensi dan pelaksanaan program dalam pengembangan desa mandiri pangan di Desa Slamparejo Kabupaten Malang melalui analisis TOWS klasik. Berikut berikut ditunjukkan pada tabel 4.39.

**Tabel 4.39 Analisis TOWS Klasik Desa Slamparejo**

<b>INTERNAL</b>          <b>EKSTERNAL</b>	<b>Kekuatan (S)</b>	<b>Kelemahan (W)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Area kesesuaian lahan untuk tanaman pertanian cukup luas yaitu pangan cukup luas yaitu 120,74 Ha</li> <li>Partisipasi masyarakat Desa Slamparejo berada pada tingkatan <i>Delegated Power</i></li> <li>Desa Slamparejo memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap meski ada beberapa sarana dan prasarana yang rusak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produksi pertanian belum mampu mendukung penganeekaragaman konsumsi pangan lokal</li> <li>Tingkat pendapatan yang rendah</li> <li>SDM rendah dan pengetahuan yang kurang tentang pola keragaman makanan yang sehat</li> <li>Jalan menuju Dusun Busu kondisinya rusak</li> <li>Irigasi rusak dan tidak pernah mendapat perbaikan</li> </ul>
<b>Peluang (O)</b>	<b>Strategi S-O</b>	<b>Strategi W-O</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber daya lahan untuk tanaman pangan</li> <li>Masyarakat Desa Slamparejo telah bekerja sama dengan KAN Jabung dalam pemasaran produksi susu sapi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>produksi pertanian berupa buah dan sayuran perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lahan berdasarkan kesesuaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pengamanan dan perluasan lahan sawah irigasi, hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki prasarana irigasi terlebih dahulu.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi yang baik antar stakeholder ditunjukkan dengan adanya program-program lain yang mendukung kemandirian pangan.</li> <li>• Perbaikan sarana dan prasarana prioritas telah sesuai dengan hasil Musyrenbangdes</li> </ul>	<p>lahan tanaman pangan Desa Slamparejo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas kelembagaan pangan melalui pemanfaatan secara maksimal program-program lain yang mendukung kemandirian pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengadaan teknologi pengolahan hasil pangan</li> <li>• Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui program pemerintah yaitu perekayasa sosial terhadap pola konsumsi pangan masyarakat seperti sosialisasi dan pelatihan mengolah bahan pangan non-beras.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>Ancaman (T)</b></p> <p>Aksesibilitas yang sulit dirasakan oleh masyarakat Dusun Busu dikarenakan Dusun Busu struktur tata ruangnya terpisah secara fisik dengan dusun Krajan dan desa lainnya, sedangkan satu-satunya jalan menuju Dusun Busu mengalami kondisi rusak.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi S-T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan area kesesuaian lahan tanaman pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan dimasing-masing dusun.</li> <li>• Pemanfaatan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan program-program lain yang mendukung kemandirian pangan</li> <li>• Perbaikan Jalan menuju Dusun Busu yang kondisinya rusak</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Strategi W-T</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan ketersediaan pangan yang beranekaragam berupa sayur dan buah</li> <li>• Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan</li> <li>• peningkatan pelayanan infrastruktur desa, terutama jalan agar mendukung sistem distribusi pangan</li> </ul>

Berikut strategi berdasarkan analisis SWOT untuk peningkatan potensi dan pelaksanaan program dalam pengembangan desa mandiri pangan di Desa Slamparejo Kabupaten Malang berbasis sumber daya lokal melalui penguatan sistem ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

**1. Sub Sistem Ketersediaan**

- a. Penanganan ketersediaan pangan berbasis sumber daya local, baik sumber daya alam, manusia, teknologi dan social, antara lain:
  - ✓ pengamanan dan perluasan lahan sawah irigasi, hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki prasarana irigasi yang saat ini kondisinya rusak.
  - ✓ optimalisasi areal pertanian berdasarkan kesesuaian lahan terutama untuk tanaman pangan khususnya sayuran dan buah-buahan guna mendukung diversifikasi produksi pangan lokal.
  - ✓ pengadaan teknologi pengolahan hasil pangan melalui pengadaan alat dan mesin pertanian untuk pascapanen, serta pembangunan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil. Saat ini Desa Slamparejo belum memiliki teknologi pengolahan hasil.



- ✓ Pemanfaatan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan program-program lain yang mendukung kemandirian pangan

- b. Penganekaragaman pangan melalui peningkatan ketersediaan produksi pangan. Berdasarkan perbandingan dengan standard PPH, produksi pangan berupa buah dan sayuran perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lahan Desa Slamparejo melalui beberapa program diversifikasi produksi pangan lokal.

## 2. Sub Sistem Distribusi

Peningkatan distribusi pangan yang mampu menjamin keterjangkauan masyarakat terhadap pangan melalui:

- ✓ penguatan kapasitas kelembagaan pangan seperti kelompok tani maupun koperasi (KAN Jabung) dalam mendistribusikan hasil produksi pertanian pangan secara kolektif.
- ✓ Berdasarkan hasil analisis, perlu dilakukan perbaikan jalan yang menuju Dusun Busu guna memudahkan akses fisik masyarakat dalam memperoleh dan mendistribusikan bahan pangan.

## 3. Sub Sistem Konsumsi

Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui perekayasaan sosial terhadap pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola penganekaragaman pangan yang memiliki mutu semakin meningkat, serta peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/lokal. Hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan seperti sosialisasi dan pelatihan mengolah bahan pangan non-beras, dengan memanfaatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Strategi ini berupa pemecahan masalah yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam meningkatkan upaya pemandirian pangan desa dengan memprioritaskan sesuai kemampuan dan keinginan masyarakat. Strategi ini jika dibandingkan dengan program yang ada di Desa Slamparejo dapat saling mendukung dalam upaya menuju desa mandiri pangan, berikut perbandingan strategi pemecahan masalah Desa Slamparejo dengan program yang ada ditunjukkan pada tabel 4.40..



**Tabel 4.40 Perbandingan Strategi dengan Program Di Desa Slamparejo**

No.	Alternatif Pemecahan Masalah	Program di Desa Slamparejo	Sinergitas Program dengan Pemecahan Masalah
1.	Perbaikan jalan yang menuju Dusun Busu dan Perbaikan Prasarana Irigasi	Biogas Pembuatan TPT dan PIPANISASI	Perbaikan jalan dan irigasi, biogas, pembuatan TPT dan pipanisasi merupakan penyediaan prasarana yang dapat mendukung upaya menuju desa mandiri pangan. Dengan adanya rumah kompos masyarakat mampu menyediakan sendiri pupuk untuk meningkatkan hasil pertanian terutama tanaman pangan melalui:
2.	Pengamanan dan perluasan sawah irigasi	Rumah Kompos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengamanan dan perluasan sawah irigasi</li> <li>• Optimalisasi areal pertanian berdasarkan kesesuaian lahan</li> </ul>
3.	Optimalisasi areal pertanian berdasarkan kesesuaian lahan khususnya untuk tanaman sayuran dan buah-buahan guna mendukung upaya diversifikasi pangan.	Lumbung Pangan Desa	Hasil produksi pertanian pangan melalui optimalisasi area pertanian berdasarkan kesesuaian lahan dapat disimpan sebagai cadangan pangan di lumbung pangan desa.
4.	Pengadaan alat dan mesin pertanian pascapanen		Hasil produksi pertanian pangan akan mempunyai nilai lebih jika diolah menggunakan alat pertanian pascapanen, hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
5.	Penguatan Kapasitas Kelembagaan seperti KAN Jabung dalam mendistribusikan hasil produksi pertanian pangan.	Ternak Sapi	Hasil dari ternak sapi berupa susu dapat didistribusikan ke KAN Jabung untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
7.	Perekayasa sosial terhadap pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola panganekaragaman pangan	Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan, melalui:	Partisipasi aktif masyarakat dalam program desa mandiri pangan dapat dimanfaatkan dalam program-program lain untuk mempercepat pencapaian kemandirian pangan desa.
8.	Pemanfaatan partisipasi aktif masyarakat dalam memanfaatkan program-program yang mendukung kemandirian pangan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan Lahan Pekarangan</li> <li>• Pembagian Susu Gratis</li> <li>• Sosialisasi dan Pelatihan memasak bahan pangan non beras</li> </ul>	